



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2021

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(B P K A D)

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
2022

KATA PENGANTAR

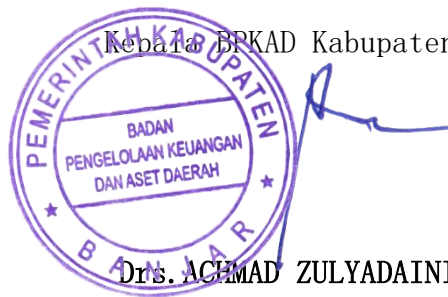
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan bimbingan dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar dapat terselesaikan dengan baik dan lengkap. Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta sebagai upaya melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah menuju tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam laporan ini, disajikan pencapaian sasaran kinerja dalam kurun waktu 1 Januari 2021 - 31 Desember 2021 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2021 dengan fokus pada program-program prioritas. Selain itu, penyusunan laporan ini juga dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Banjar Tahun 2021 dan merupakan bagian dari evaluasi untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan di masa mendatang.

Semoga LKjIP ini dapat bermanfaat bagi daerah Kabupaten Banjar khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan, tertib, akuntabel dan profesional serta dalam rangka mewujudkan misi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Amanah melalui Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan prosedur dan perundang - undangan yang berlaku, Meningkatkan fasilitasi penyaluran bantuan keuangan dan sosial pada masyarakat dan Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai dengan azas profesionalisme dan standar pelayanan prima.

Martapura, Januari 2022

Kepala BPKAD Kabupaten Banjar



Drs. ACHMAD ZULYADAINI, M. Si.

NIP. 19660104 198602 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP BPKAD Kabupaten Banjar tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja BPKAD Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti – bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra BPKAD Kabupaten Banjar 2021 – 2026 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2021 telah berhasil dicapai.

LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2021 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan, tertib, akuntabel dan profesional serta dalam rangka mewujudkan misi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Amanah melalui Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan prosedur dan perundang – undangan yang berlaku, selanjutnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar menetapkan 1 (satu) sasaran strategis, dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran tersebut merupakan ikhtisar dari beberapa hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas

pokok dan fungsi BPKAD. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja atas sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK (WTP)	Nilai capaian kinerja keuangan.Opini BPK, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.	Opini WTP dapat berhasil dicapai setelah setelah memenuhi indikator keberhasilan dalam : penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis AkruaI, Kecukupan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan Efektifitas Sistem Pengendalian Intern terhadap keberadaan aset serta kelengkapan bukti dan nilai aset.	BPK

Sumber : Surat Keputusan IKU BPKAD TA. 2021

Dari ilustrasi tabel di atas dapat dijelaskan untuk sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan indikator Opini BPK terhadap LKPD pada tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik. Tantangan keberhasilan akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Banjar yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, sumber daya manusia bidang pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan BPKAD Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi BPKAD dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Total pagu yang tersedia sebesar Rp. 255.415.827.740,- dengan realisasi keuangan s.d 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 248.537.497.395,- atau 97,31%, dengan realisasi fisik sebesar 105,55%. Dengan rincian realisasi keuangan pada program utama sebesar Rp. 221.606.128.096,- dari total pagu sebesar Rp. 221.957.103.500,-. Sedangkan realisasi keuangan pada program pendukung sebesar Rp. 25.212.341.170,- dari total pagu sebesar Rp. 31.448.601.140,-.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Maksud dan Tujuan..... 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi..... 2

C. Identifikasi Permasalahan..... 29

D. Isu Strategis..... 30

E. Sistematika Penyajian..... 32

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 34

A. Indikator Kinerja Utama..... 34

B. Perjanjian Kinerja..... 37

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 53

A. Capaian Kinerja Organisasi..... 53

B. Analisis Capaian Kinerja Sasaran..... 125

C. Realisasi Anggaran..... 148

D. Analisis Efesiensi..... 164

E. Tindak Lanjut Atas Evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2019..... 177

BAB IV PENUTUP..... 181

A. Kesimpulan..... 181

B. Saran - Saran..... 183

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keadaan Pejabat Struktural BPKAD.....	4
Tabel 1.2	Jumlah PNS BPKAD.....	4
Tabel 1.3	Permasalahan BPKAD.....	30
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	36
Tabel 2.2	Penerapan Kinerja Tahun 2021.....	38
Tabel 3.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja.....	54
Tabel 3.2	Hasil Monitoring Target Jangka Menengah.....	56
Tabel 3.3	Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	57
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2021..	80
Tabel 3.5	Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja.....	
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	103
Tabel 3.7	Realisasi Indikator BPKAD Tahun 2021	125
Tabel 3.8	Pagu Realisasi Anggaran Triwulan I.....	142
Tabel 3.9	Pagu Realisasi Anggaran Triwulan II.....	143
Tabel 3.10	Pagu Realisasi Anggaran Triwulan III.....	145
Tabel 3.11	Pagu Realisasi Anggaran Triwulan IV.....	147
Tabel.3.12	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021.....	150
Tabel 3.13	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	166

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi BPKAD..... 29

Gambar 3.1 Grafik Realisasi Kinerja Tahun 2021..... 78

Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja 2021. 101

Gambar 3.3 Grafik Renstra BPKAD Kab. Banjar 2021–2026..... 102

Gambar 3.4 Grafik Realisasi Kinerja Tahun 2021 & Target Periode
Akhir Renstra..... 125

Gambar 3.5 Grafik Komposisi Belanja BPKAD..... 164

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia.

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

Dengan disusunnya laporan kinerja instansi pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjar
2. Mendorong Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kinerjanya
4. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 tahun.
5. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
6. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas
7. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A. 2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bupati.
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar; dan
- g. Peraturan Bupati Banjar Nomor 105 Tahun 2017 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja BPKAD.

B.1 KEDUDUKAN :

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertugas membantu pemerintah daerah dalam urusan penunjang keuangan

B.2 TUGAS :

Berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar bertugas membantu Kepala Daerah dalam urusan penunjang keuangan.yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.3 FUNGSI :

B.3.1 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

B.3.1.1 Kondisi riil pegawai berdasar jabatan

- a. Pejabat Struktural

Pejabat Struktural di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar Eselon III terdiri dari 5 orang laki-laki, sedangkan eselon IV terdiri dari 5 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di BPKAD kabupaten Banjar. Jumlah pejabat struktural di BPKAD Kabupaten Banjar dijelaskan pada gambar 1 berikut :

Tabel 1.1 Keadaan Pejabat Struktural BPKAD Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Eselon II/b	1	–	1
2	Eselon III/a	1	–	1
3	Eselon III/b	4	–	4
4	Eselon IV/a	5	10	15
Jumlah		11	10	21

Sumber : Data Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	IV/c	1
2	IV/b	–
3	IV/a	4
4	III/d	13
5	III/c	12
6	III/b	6
7	III/a	3

8	II/d	-
9	II/c	2
10	II/b	-
11	II/a	-
Jumlah		42

Sumber : Data Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banjar

Berdasarkan gambar tabel diatas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki pangkat/golongan III sebanyak 34 orang, pangkat/golongan IV sebanyak 5 orang, pangkat/golongan II sebanyak 2 orang, realita tersebut menunjukkan bahwa kalau ditinjau dari segi kepangkatan/golongan menunjukkan bahwa BPKAD telah memiliki sumber daya manusia dengan kapasitas yang cukup baik. Hal ini didapat dari proporsi jumlah pegawai yang memiliki pangkat/golongan III dan IV mencapai 39 orang atau 93% dari total pagawai yang dimiliki BPKAD pada tahun 2021.

B. 3.1.2 Kondisi riil pegawai berdasarkan pendidikan

Kebutuhan pegawai untuk tiap jenis jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada posisi jabatan struktural kebutuhan sebanyak 21 jabatan pada tahun 2021 , jumlah jabatan tersebut telah dapat terisi sepenuhnya dengan baik, baik pada posisi jabatan eselon II, eselon III dan eselon IV.
2. Kebutuhan Jabatan Fungsional Umum BPKAD diasumsikan setiap eselon IV pada masing-masing bidang minimal memiliki staf sebanyak 2 orang dan setiap eselon IV pada sekretariat memiliki 3 orang staf, maka pegawai fungsional umum yang diperlukan adalah sebanyak 33 orang. Namun pada saat ini BPKAD

hanya memiliki sebanyak 23 orang tenaga fungsional umum, dengan demikian BPKAD masing membutuhkan sebanyak 12 orang tenaga fungsional umum untuk menunjang jalannya kegiatan di BPKAD.

B. 3.1.3 Tenaga kontrak waktu tertentu

Selain pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPKAD di dukung oleh tenaga kontrak waktu tertentu, tercatat sebanyak 27 orang, dengan rincian 1 orang petugas kebersihan, 1 orang sopir dan 25 orang tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan yang disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan dalam mendukung berjalannya tugas sehari-hari pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi , Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjar memiliki Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang, urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

- Adapun Rincian Uraian Tugas Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar adalah :

1. Kepala Badan

1. Ringkasan Tugas Jabatan:

Memimpin badan dalam perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dibidang akuntansi, perbendaharaan, aset, anggaran serta kesekretariatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Rincian Tugas Jabatan :

- a. Merumuskan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja Badan;

- b. Merumuskan kebijakan teknis bidang perbendaharaan, bidang anggaran, bidang akuntansi, dan bidang aset daerah;
- c. Menyelenggarakan kegiatan bidang perbendaharaan, bidang anggaran, bidang akuntansi, dan bidang aset daerah;
- d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan serta pelaksanaan operasional kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Badan;
- e. Mengawasi dan mengendalikan bidang perbendaharaan, bidang anggaran, bidang akuntansi, dan bidang aset daerah;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait bidang Perbendaharaan, bidang Anggaran, bidang Akuntansi, dan bidang Aset Daerah.
- g. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah bidang Perbendaharaan, bidang Anggaran, bidang Akuntansi, dan bidang Aset Daerah;
- h. Menyelenggarakan standar pelayanan minimal di bidang Pengelolaan Keuangan dan bidang Aset Daerah;
- i. Membina administrasi, organisasi, tata laksana dan personil di lingkungan Badan;
- j. Merumuskan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta tugas-tugas pembantuan lainnya;
- k. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar dipimpin oleh seorang kepala badan yang membawahi 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang di dalam struktur organisasinya. Penjabaran mengenai tugas dan fungsi setiap komponen kepemimpinan yang ada di BPKAD adalah sebagai.

2. Sekretaris

1. Ringkasan Tugas Jabatan :

Memimpin sekretariat dalam merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan urusan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Rincian Tugas Jabatan

- a. Menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Badan;
- b. Memonitor pengelolaan anggaran di lingkungan Badan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
- c. Menyelenggarakan urusan surat menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan badan;
- d. Menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan badan dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas badan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan badan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan

badan; dan

- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Dalam menjalankan tugasnya Sekretariat didukung oleh 3 (tiga) Sub Bagian yang memiliki tugas masing-masing, yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, memiliki tugas :
 - a. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - c. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - d. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
 - e. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
 - f. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor dan rumah tangga di lingkungan Badan;
 - g. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan badan;
 - h. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan prasarana dan sarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
 - i. Mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
 - j. Menghimpun bahan penyusunan dokumen uraian tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan

dan Beban Kerja serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Badan;

- k. Menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
 - l. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penjaminan kenaikan pangkat pegawai, penjaminan kenaikan gaji berkala, penjaminan cuti, absensi pegawai;
 - m. Melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Badan;
 - n. Menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas SDM dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
2. Sub Bagian Perencanaan, memiliki tugas :
- a. merencanakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) badan;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan Badan beserta dokumen penunjangnya;
 - d. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - e. menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan badan;

- f. menyusun profil pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Badan;
 - g. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - h. menyusun laporan program dan kegiatan badan secara berkala berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan badan;
 - i. menghimpun bahan penyusunan laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawab, Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan berdasarkan masukan unit-unit di lingkungan Badan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
3. Sub Bagian Keuangan, memiliki tugas :
- a. merencanakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan;
 - c. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan dan akuntansi keuangan Badan;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun laporanpertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
 - e. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;

- f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar, memiliki tugas, yaitu :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran, Perencanaan Anggaran, dan Pengendalian Anggaran;
- b. menyusun rencana kerja dan program Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran, Perencanaan Anggaran, dan Pengendalian Anggaran;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pada Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran, Perencanaan Anggaran, dan Pengendalian Anggaran;
- d. menyelenggarakan teknis pengelolaan urusan pada Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran, Perencanaan Anggaran, dan Pengendalian Anggaran;
- e. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran, Perencanaan Anggaran, dan Pengendalian Anggaran; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Dalam menjalankan tugasnya Bidang Anggaran didukung oleh 3 (tiga) Sub Bidang yang memiliki tugas masing-masing, yaitu :

- 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran memiliki tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja

Perencanaan Anggaran;

- b. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - c. melaksanakan identifikasi permasalahan yang berkenaan dengan urusan perencanaan anggaran;
 - d. menyusun program dan kegiatan terkait strategi kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan kegiatan perencanaan anggaran;
 - e. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
 - f. menyusun Rencana Kerja Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (RKA PPKD), Rencana Kerja Anggaran Perubahan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah RKA-P PPKD;
 - g. melaksanakan proses penyusunan RKA SKPD dan RKA-P SKPD menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD;
 - h. menyiapkan jawaban atas pandangan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - i. menyusun dan memproses persetujuan pergeseran anggaran;
 - j. melaksanakan sosialisasi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan Perencanaan Anggaran;
- dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran memiliki tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Pengendalian Anggaran;
 - b. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran sub bidang Pengendalian Anggaran;
 - c. melaksanakan kegiatan verifikasi permohonan Surat Penyediaan Dana (SPD) dengan menyesuaikan anggaran yang terdapat dalam DPA SKPD dan anggaran kas SKPD;
 - d. melaksanakan pengendalian Surat Penyediaan Dana (SPD) terhadap kemampuan saldo kas daerah dan pelaksanaan penerbitan SPD;
 - e. melaksanakan penyusunan dan pembagian sumber dana terhadap pendapatan dan kas daerah;
 - f. melaksanakan kegiatan pemindahbukuan pada kas daerah apabila terjadi kesalahan rekening;
 - g. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang penganggaran dan belanja kepada semua SKPD;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan Pengendalian Anggaran; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
3. Sub Bidang Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran memiliki tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran;
 - b. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran sub bidang Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran;

- c. melaksanakan identifikasi permasalahan yang berkenaan dengan analisis perencanaan dan pengendalian anggaran;
- d. menyusun petunjuk teknis dan kebijakan terkait penganggaran;
- e. melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian APBD;
- f. menyusun Nota Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan sosialisasi hasil analisis peraturan perundang-undangan penganggaran kepada SKPD di Kabupaten Banjar; dan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

3. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar, memiliki tugas, yaitu :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Belanja Langsung, Belanja Tidak langsung dan Pembiayaan, dan belanja Pegawai;
- b. menyusun rencana kerja dan program Belanja Langsung, Belanja Tidak langsung dan Pembiayaan, dan Belanja Pegawai;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pada Belanja Langsung, Belanja Tidak langsung dan Pembiayaan, dan Belanja Pegawai;
- d. menyelenggarakan teknis pengelolaan urusan pada Belanja Langsung, Belanja Tidak langsung dan Pembiayaan, dan Belanja Pegawai;

- e. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Belanja Langsung, Belanja Tidak langsung dan Pembiayaan, dan Belanja Pegawai; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Dalam menjalankan tugasnya Bidang Perbendaharaan didukung oleh 3 (tiga) Sub Bidang yang memiliki tugas masing-masing, yaitu :

- 1. Sub Bidang Belanja Langsung, Memiliki Tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Belanja Langsung;
 - b. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran sub bidang Belanja Langsung;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyimpanan dan penempatan uang daerah, pencocokan data (rekonsiliasi) atas pengelolaan dan penempatan uang pemerintah daerah, pemantauan suku bunga bank;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. menerapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

- h. melaksanakan penempatan uang daerah, menyimpan uang daerah di kas daerah
 - i. melaksanakan pengelolaan penatausahaan investasi;
 - j. mengendalikan pengelolaan uang persediaan pada SKPD lingkup Kabupaten Banjar;
 - k. melaksanakan kebijakan penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) untuk belanja langsung;
 - l. menetapkan penerbitan dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait Belanja Langsung; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan, Memiliki Tugas :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - b. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran sub bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - c. melaksanakan kebijakan penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Belanja Tidak Langsung;
 - d. menetapkan penerbitan dan surat penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Tidak Langsung;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan teknis, monitoring, dan evaluasi terhadap bantuan sosial, hibah, penyertaan modal

- dan dana tak diduga serta bantuan keuangan partai politik, bantuan keuangan pemerintah desa dan bagi hasil pajak kepada pemerintah desa; serta pelaksanaan proses belanja yang tidak direncanakan pada Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial dan BLUD Ratu Zalecha Martapura;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait penetapan kebijakan pencairan dana bantuan sosial, hibah, penyertaan modal daerah dan dana tak diduga serta bantuan keuangan partai politik, bantuan keuangan pemerintah desa, serta pelaksanaan proses belanja yang tidak direncanakan pada SOPD Dinas Kesehatan, BPBD Kabupaten Banjar, Dinas Sosial Kabupaten Banjar dan BLUD Ratu Zaleha Martapura;
- g. menyiapkan bahan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan- kebijakan strategis yang berkaitan dengan bantuan sosial dan hibah serta penyertaan modal daerah dan penyaluran dana tak diduga serta bantuan keuangan partai politik, bantuan keuangan pemerintah desa dan bagi hasil pajak kepada pemerintah desa, pelaksanaan proses belanja yang tidak direncanakan pada SKPD Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial dan BLUD Ratu Zaleha Martapura;
- h. melaksanakan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat maupun instansi vertikal yang berkenaan dengan penyaluran bantuan sosial dan hibah serta penyertaan modal daerah dan penyaluran dana tak diduga serta bantuan keuangan partai politik, bantuan keuangan pemerintah desa dan bagi hasil pajak kepada pemerintah desa, pelaksanaan proses belanja yang tidak direncanakan

pada SKPD Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Ratu Zaleha Martapura;

- i. melaksanakan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah, penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyimpanan dan penempatan uang daerah, pencocokan data (rekonsiliasi) atas pengelolaan dan penempatan uang pemerintah daerah, pemantauan suku bunga bank;
 - j. melaksanakan fungsi manajemen kas pada kas daerah di Bank Pemegang Kas Daerah berupa rekonsiliasi kas, pencocokan kas serta arus kas dan aliran kas;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
3. Sub Bidang Belanja Pegawai, Memiliki Tugas :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Belanja Pegawai;
 - b. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran sub bidang Belanja Pegawai;
 - c. melaksanakan perhitungan perubahan gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar atas dasar kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan promosi jabatan;
 - d. melaksanakan pencetakan daftar gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi Belanja Pegawai Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi pembayaran

- tambahan penghasilan dan tunjangan sertifikasi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kabupaten Banjar;
- g. menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran gaji pegawai, tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah, tambahan penghasilan serta tunjangan sertifikasi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banjar;
 - h. menyiapkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang purna tugas (pensiun) dan meninggal dunia, serta Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mutasi kerja antar kabupaten/kota dan antar propinsi;
 - i. melaksanakan perhitungan dan rekapitulasi serta penatausahaan Perhitungan Pihak Ketiga dan Iuran Pemerintah Daerah untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - j. melaksanakan perhitungan dan rekapitulasi serta penatausahaan Iuran Pemerintah Daerah untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banjar;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait Belanja Pegawai; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

4. BIDANG AKUNTANSI

Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar, memiliki tugas, yaitu :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pada Akuntansi I, Akuntansi II dan Akuntansi III;
- b. menyusun rencana kerja dan program Akuntansi I, Akuntansi II dan Akuntansi III;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pada Akuntansi I, Akuntansi II dan Akuntansi III;

- d. menyelenggarakan teknis pengelolaan urusan pada Sub Bidang Akuntansi I, Akuntansi II dan Akuntansi III;
- e. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan pada Akuntansi I, Akuntansi II dan Akuntansi III; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Dalam menjalankan tugasnya Bidang Akuntansi didukung oleh 3 (tiga) Sub Bidang yang memiliki tugas masing-masing, yaitu :

1. Sub Bidang Akuntan I, memiliki tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pada Akuntansi I;
 - b. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Akuntansi I;
 - c. merencanakan penyusunan program, petunjuk teknis penyusunan laporan Neraca,
 - d. melaksanakan Posting transaksi Dinas ke dalam buku besar secara periodik;
 - e. melaksanakan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada Dinas;
 - f. melaksanakan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas;
 - g. melaksanakan bahan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan dari aset, kewajiban dan ekuitas;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan Akuntansi I; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
2. Sub Bidang Akuntan II, memiliki tugas :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pada Akuntansi II;
 - b. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Akuntansi II;
 - c. melaksanakan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada Badan Layanan Umum Daerah, Puskesmas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. melaksanakan posting transaksi Badan Layanan Umum Daerah, Puskesmas, Inspektorat, Badan, dan Satuan Polisi Pamong Praja ke dalam buku besar secara periodik;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan dari Pendapatan, Laporan Operasional dan Beban;
 - f. menyiapkan bahan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. menyiapkan bahan penyertaan modal pemerintah daerah;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait Akuntansi II; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
3. Sub Bidang Akuntan III, memiliki tugas :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pada Akuntansi III;
 - b. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Akuntansi III;
 - c. merencanakan penyusunan petunjuk teknis penyusunan laporan Neraca;
 - d. melaksanakan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Sekretariat Daerah, Lembaga Pengurus KORPRI, Kecamatan, dan Kelurahan;

- e. melaksanakan posting transaksi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah, Lembaga Pengurus KORPRI, Kecamatan, Kelurahan ke dalam buku besar secara periodik;
- f. menyiapkan bahan pemberian peringatan/teguran atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan dari Pendapatan, Laporan Realisasi Anggaran, Belanja, Pembiayaan dan Saldo Anggaran Lebih;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan dari aktivitas masuk dan keluar kas;
- i. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait Akuntansi III; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

5. BIDANG ASET DAERAH

Bidang Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar, memiliki tugas, yaitu :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pada Perencanaan dan Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan, Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah;
- b. menyusun rencana kerja dan program Perencanaan dan Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan, Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pada Perencanaan dan

- Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan, Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah;
- d. menyelenggarakan teknis pengelolaan urusan pada Perencanaan dan Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan, Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah;
 - e. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan terkait Perencanaan dan Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan, Pengendalian dan Penghapusan Aset Daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Dalam menjalankan tugasnya Bidang Aset Daerah didukung oleh 3 (tiga) Sub Bidang yang memiliki tugas masing-masing, yaitu :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan, memiliki tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pada Perencanaan dan Penatausahaan;
 - b. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pada Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah;
 - d. melaksanakan pengumpulan data-data barang inventaris daerah;
 - e. menyiapkan bahan proses penetapan pejabat pengurus barang daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. melaksanakan penyusunan dan perencanaan usulan kebutuhan barang;
 - g. melaksanakan proses penerimaan barang sumbangan dari pihak ketiga agar barang dapat dijadikan barang milik daerah.
- 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan, memiliki tugas:
 - a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pada

Pemanfaatan dan Pengamanan;

- b. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan;
- c. Melaksanakan pengolahan data pemanfaatan barang inventaris;
- d. menyiapkan dan mengumpulkan hasil penelitian terhadap pemanfaatan barang;
- e. melaksanakan penyimpanan dokumen pemberian hak sewa atau pakai terhadap barang;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait Pemanfaatan dan Pengamanan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

3. Sub Bidang Pengendalian dan Penghapusan, memiliki tugas :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Pengendalian dan Penghapusan;
- b. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pengendalian dan Penghapusan;
- c. menyiapkan gudang tempat penyimpanan dan penyusunan barang;
- d. melaksanakan pemindahan dan menata barang milik daerah yang berada di gudang inventaris;
- e. melaksanakan pencatatan permasalahan gudang dari petugas gudang;
- f. menyiapkan bahan pedoman penerimaan, mutasi/perubahan dan penghapusan barang;
- g. melaksanakan penghimpunan data mutasi barang milik daerah pada Kabupaten;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait Pengendalian dan Penghapusan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

pimpinan

6. JABATAN FUNGSIONAL

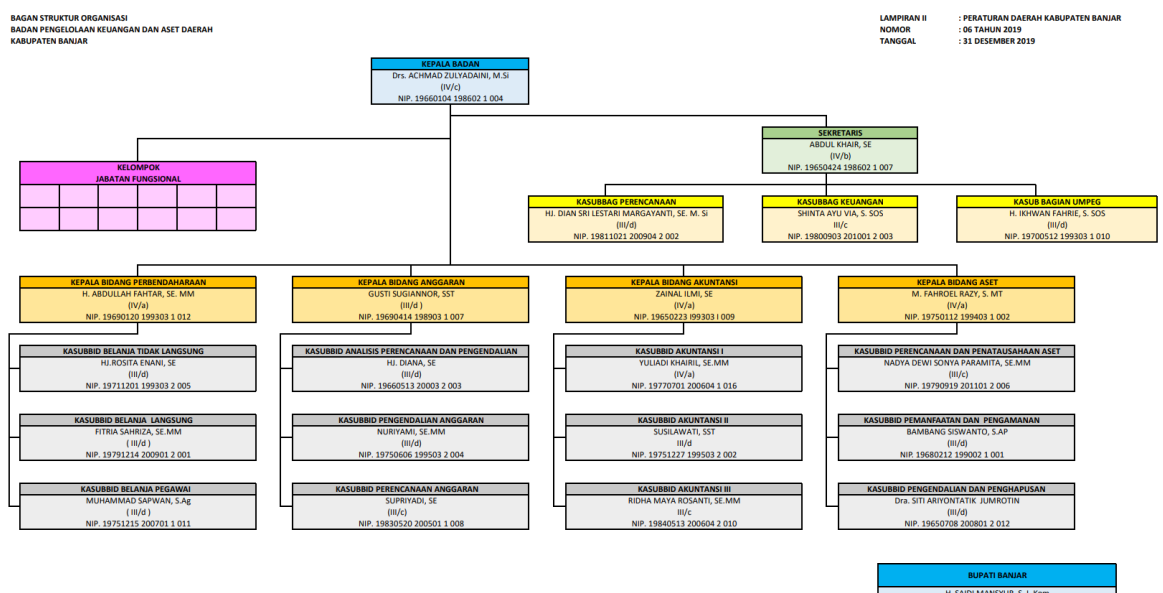
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2016 adalah :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- b. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah, meliputi :
 1. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
 3. Pengendalian pelaksanaan APBD;
 4. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank pemerintah yang telah ditunjuk;
 6. Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 7. Penyimpanan uang daerah;
 8. Penetapan SPD;

9. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi;
 10. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 11. Penyiapan pelaksanaan pinjaman daerah;
 12. Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 13. Pelaksanaan pengkoordinasian piutang daerah;
 14. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 15. Penyajian informasi keuangan daerah;
 16. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
 17. Penunjukan pejabat selaku kuasa BUD
- d. Penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - e. Pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - f. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak;
 - g. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan akuntansi pemerintahan;
 - h. Pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola, meliputi :
 - i. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
 - j. Pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

- i. Pengelolaan pemanfaatan Gedung Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banjar;
- l. Pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset daerah;
- m. Pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;
- n. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- p. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokoknya.



C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan untuk mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di semua SKPD di Kab. Banjar yang diawali dengan laporan Keuangan yang berbasis akrual, yaitu suatu metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan.

Identifikasi permasalahan Pengelolaan Keuangan dilakukan melalui proses analisis pohon masalah kemudian diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar masalah. Sehingga hirarki permasalahan tersusun secara "*cascading*" (berjenjang) dan disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

BPKAD masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Tabel 1.3 Permasalahan BPKAD

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Belum meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Sistem Pengelolaan Keuangan Belum Terintegrasi	Penentuan pagu anggaran masih berdasarkan <i>historical budget</i> belum <i>money follow function</i>
			Belanja tidak sesuai dengan penganggaran dan ketentuan yang ada
			Penyerapan belanja belum sesuai dengan alokasi anggaran belanja yang diatur dalam anggaran kas
		Laporan keuangan berbasis akrual belum optimal	Pemahaman pengelola keuangan di masing-masing perangkat daerah mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual belum memadai
		Belum dapat mewujudkan <i>good governance</i> dalam tata kelola Barang Milik Daerah	Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah belum tertib
			Sistem Informasi Aset belum optimal
			Sumber daya pengelola aset belum mendapat perhatian yang layak.

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

D. ISU STRATEGIS

Perlu dilakukan analisis terhadap berbagai isu strategis secara terpadu, terarah dan berkesinambungan. Dalam rangka melakukan analisis tersebut BPKAD sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam urusan penunjang keuangan, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan keuangan daerah, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam membantu pemerintah daerah dalam urusan penunjang keuangan dan merumuskan kebijakan keuangan daerah. Sebelum menentukan isu dilakukan

identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya ditampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah sebagaimana tersebut di atas. Isu strategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*unresolved matters*) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada **Permendagri 86 Tahun 2017**, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis BPKAD adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya layanan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu
- b. Belum tertatanya manajemen aset daerah
- c. Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan , penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan
- d. Kurangnya koordinasi, kerjasama dan kemitraan antar perangkat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan desa dan kecamatan
- e. Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan daerah

Aspek strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPKAD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan bagi BPKAD dimasa mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang. Dalam menentukan isu-isu strategis ditempuh melalui :

1. Metode forum *Focussed Group Discussion (FGD)* dengan dihadiri oleh para stakeholder, dan atau SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten Banjar.
2. Situasi, kondisi yang terjadi atau perkembangan terkini.
3. Terdapatnya perubahan regulasi, baik terkait pengelolaan keuangan maupun aset daerah.
4. Isu-isu nasional terkait sasaran reformasi birokrasi terhadap 8 (delapan) area perubahan, yaitu :
 - a. Mental aparatur dan manajemen perubahan
 - b. Pengawasan
 - c. Akuntabilitas
 - d. Kelembagaan
 - e. Tata laksana
 - f. SDM ASN
 - g. Peraturan perundang-undangan
 - h. Pelayanan publik

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Tahun 2021 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2021;

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2021 dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 beserta analisisnya;

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan saran;

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang – undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

BPKAD mampu tugas membantu kepala daerah dalam urusan penunjang keuangan. Berdasar urusan dan program yang diampu, BPKAD mendukung pencapaian misi ke-5 Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD

periode 2016 - 2021 yaitu : **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah.”** Dengan tujuan **“Meningkatnya Kualitas Tatta Kelola Pemerintahan** dengan sasaran **“Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah”** telah dapat memenuhi target indikator yaitu Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sesuai dengan predikat atau opini Wajar Tanpa Pengecualian yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kabupaten Banjar secara berturut-turut selama delapan tahun.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan BPKAD, yaitu meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah. Hal tersebut telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama BPKAD adalah Opini BPK.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK (WTP)	Nilai capaian kinerja keuangan.Opini BPK, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.	Opini WTP dapat berhasil dicapai setelah setelah memenuhi indikator keberhasilan dalam: 1. penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis AkruaI, 2. Kecukupan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;dan 4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern terhadap keberadaan aset serta kelengkapan bukti dan nilai aset.	BPK

Sumber : Surat Keputusan IKU BPKAD TA. 2021

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2021 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2016–2021. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2021 meliputi (1) sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui (1) indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai capaian kinerja pengelolaan keuangan	Opini BPK	WTP					255.415.827.740	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%	91,84					255.415.827.740	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Program Pengelolaan Keuangan				218.391.194.100	Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan & Kepala Bidang Akuntansi
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Tepat Waktu	%	100	932.638.000	Kepala Bidang Anggaran
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Penggeseran/Perubahan APBD Tepat Waktu	SKPD	54	25.350.000	Kasubbid Pengendalian Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu	Dok	1	344.857.100	Kasubbid Perencanaan Anggaran
					Tersusunnya Rancangan Peraturan Tersusunnya Rancangan Peraturan daerah tentang APBD Tepat Waktu	Dok	1		
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tepat Waktu	Dok	1	252.497.900	Kasubbid Perencanaan Anggaran
					Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pergeseran/Perubahan APBD tepat waktu	Dok	2		
					Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD tepat waktu	Dok	1		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan (Tersusunnya Standar Harga Satuan dan Standar Harga Lainnya)	Dok	4	100.985.200	Kasubbid Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	Bulan	12	95.099.900	Kasubbid Pengendalian Anggaran
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Penerbitan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana, DPA/DPPA untuk 54 SKPD (Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah)	Dok	3	113.847.900	Kasubbid Perencanaan Anggaran
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	%	100	221.957.103.500	Kepala Bidang Perbendaharaan
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Pembinaan Pelaporan Pelaporan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Daerah (Jumlah SPD yang diterbitkan)	Dok	1000	81.057.800	Kasubbid Belanja Tidak Langsung & Pembiayaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Desa yang tersalurkan dana Desa Tepat Waktu	Desa	277	216.543.807.000	Kasubbid Belanja Tidak Langsung & Pembiayaan
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah (Terlaksananya Sistem Informasi Penyaluran/Pengeluaran Kas Daerah dan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Penyaluran Kas Daerah)	SKPD	96	224.781.100	Kasubbid Belanja Langsung
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Penyaluran Dana Darurat dan Mendesak (Belanja Tidak Terduga)	Tahun	1	5.000.000.000	Kasubbid Belanja Tidak Langsung & Pembiayaan
				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Dokumen Belanja Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Banjar (Lancarnya Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) PNS Kabupaten	SKPD	54	107.457.600	Kasubbid Belanja Pegawai

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Banjar)				
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	%	100	496.452.600	Kepala Bidang Akuntansi
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Triwulan/Semesteran)	Lap	12	91.028.800	Kasubbid Akuntansi III
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Daerah (Unaudit) dan Laporan Keuangan Daerah (Audited) (Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu)	Lap	2	85.584.800	Kasubbid Akuntansi II
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu (Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang	Dok	1	149.829.800	Kasubbid Akuntansi I

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	tersusun akuntabel dan Tepat Waktu)				
				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu (Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah)	Dok	1	111.939.200	Kasubbid Akuntansi II
				Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu (Tersusunnya Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah)	Dok	1	58.070.000	Kasubbid Akuntansi III
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara baik	%	100	581.032.500	Kepala Bidang Aset
					Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	%	100		
				Penyusunan Standar Harga	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik (Tersusunnya Dokumen Standar	Dok	1	60.050.000	Kasubbid Perencanaan dan Penatausahaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Harga Barang dan Jasa)				
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah yang di Hapus dan dipindahtangankan (Tersusunnya Dokumen Laporan Barang Milik Daerah)	Dok	2	278.393.500	Kasubbid Perencanaan dan Penatausahaan
					Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah yang di Hapus dan dipindahtangankan (Tersusunnya Dokumen Penetapan Pengurus Barang Milik Daerah)	Dok	1		Kasubbid Perencanaan dan Penatausahaan
					Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah yang di Hapus dan dipindahtangankan (Tersusunnya Dokumen Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah)	Dok	1		Kasubbid Perencanaan dan Penatausahaan
					Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah yang di Hapus dan dipindahtangankan (Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah)	Dok	1		Kasubbid Perencanaan dan Penatausahaan
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pelatihan Pengelola Barang Milik Daerah SKPD (Tersusunnya Dokumen Laporan Sensus Barang Milik	Dok	1	161.211.900	Kasubbid Perencanaan dan Penatausahaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Daerah)				
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) (Terpenuhinya Aspek Pengamanannya Secara Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Unit/ bidang	15	13.060.700	Kasubbid Pemanfaatan dan Pengamanan
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) (Tersusunnya Dokumen Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah)	Dok	30	29.514.600	Kasubbid Pengendalian dan Penghapusan
					Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) (Tersusunnya Dokumen Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah)	Dok	4		Kasubbid Pemanfaatan dan Pengamanan
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Per Triwulan (Tersusunnya Dokumen Laporan Rekonsiliasi SKPD Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah)	Dok	4	38.801.800	Kasubbid Perencanaan dan Penatausahaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	%	100	31.448.601.140	Sekretaris
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	%	100	96.899.600	Kasubbag Perencanaan
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Penyusunan Renstra dan Renja)	Dokumen	3	27.916.496	Kasubbag Perencanaan
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Jumlah Dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD)	Dokumen	3	29.740.400	Kasubbag Perencanaan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Kinerja SKPD)	Dokumen	12	15.204.800	Kasubbag Perencanaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Jumlah Dokumen LKjIP, LKPJ)	Dokumen	2	24.834.200	Kasubbag Perencanaan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	29.739.579.744	Kasubbag Keuangan
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan (Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN)	Tahun	1	29.000.262.844	Kasubbag Keuangan
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan (Proses Administrasi Keuangan pada BPKAD berjalan dengan lancar)	Bulan	12	715.661.200	Kasubbag Keuangan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan (Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun yang tersusun)	Dokumen	2	23.655.700	Kasubbag Keuangan
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	%	100	14.900.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhnya Kursus Singkat dan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Jumlah Peserta yang mengikuti kursus singkat dan bimbingan teknis tentang	Peserta	8	14.900.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					peraturan Perundang-undangan)				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	328.259.441	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	325.109.441	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	Buku	1	3.150.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	57.013.800	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Fasilitas untuk pengadaan perlengkapan kantor di lingkungan BPKAD dapat terpenuhinya sesuai standar kelayakan	Bulan	12	57.013.800	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					kebersihan lingkungan dan kenyamanan kerja pada BPKAD terpenuhi	Bulan	12		
					Terlaksananya Penyediaan peralatan kebersihan kantor	Bulan	12		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	625.384.570	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Jumlah rekening jasa komunikasi dan listrik yang terbayar)	Rekening	24	247.654.570	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu (Jumlah paket makanan dan minuman rapat dan tamu tersedia)	Bulan	12	377.730.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
					Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat	Bulan	12		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah dapat terlaksana)				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	586.563.985	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tahun	1	40.990.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tahun	1	288.105.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Paket	1	222.448.985	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bulan	12	35.020.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2021

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2021.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$Capaian\ Indikator\ kinerja = ((Rencana - (Realisasi - Rencana)) / Rencana) \times 100 \%$$

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja (BPKAD) Kab. Banjar tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 100%	Berhasil	Hijau
2	70% < 100%	Cukup Berhasil	Biru
3	40% < 70%	Kurang Berhasil	Kuning
4	<40%	Tidak Berhasil	Merah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, RPJMD Kepala Daerah terpilih, dan penceramatan lingkungan eksternal yang bersumber dari Renstra Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar adalah :

1. Belum optimalnya kualitas penyusunan dan penetapan penganggaran.

Dinilai dari masih banyaknya permohonan revisi dokumen penganggaran oleh beberapa SKPD. Monitoring dilakukan dengan melakukan perbandingan jumlah SKPD yang melakukan permohonan revisi dokumen penganggaran pada tahun anggaran 2020 dengan tahun anggaran 2021.

2. Belum optimalnya penatausahaan keuangan daerah dan layanan kebendaharaan sesuai peraturan perundang-undangan. Dinilai dengan jumlah SKPD dengan kegiatan penatausahaan yang baik. Monitoring dilakukan dengan melakukan perbandingan jumlah SKPD dengan kegiatan penatausahaan SKPD yang baik pada tahun anggaran 2020 dengan tahun anggaran 2021.
3. Belum optimalnya kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dinilai dengan jumlah SKPD dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai SAP. Monitoring dilakukan dengan melakukan perbandingan jumlah SKPD dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai SAP pada tahun anggaran 2020 dengan tahun anggaran 2021.
4. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah sesuai peraturan perundang - undangan. Dinilai dengan jumlah SKPD dengan pengelolaan aset daerah sesuai peraturan perundang - undangan. Monitoring dilakukan dengan melakukan perbandingan jumlah SKPD dengan pengelolaan aset daerah sesuai peraturan perundang - undangan pada tahun anggaran 2020 dengan tahun anggaran 2021.
5. Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja. Dinilai dengan nilai hasil evaluasi SAKIP BPKAD. Monitoring dilakukan dengan melakukan perbandingan nilai hasil evaluasi SAKIP BPKAD pada tahun anggaran 2019 dengan tahun anggaran 2020.

Monitoring target Jangka Menengah dalam Renstra BPKAD telah dilakukan secara periodik. Hasil monitoring dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.2

Hasil Monitoring Target Jangka Menengah dalam Renstra BPKAD

No	Uraian	Satuan	Hasil Monitoring		Keterangan
			Tahun n-1	Tahun n	
1.	Optimalisasi kualitas penyusunan dan penetapan penganggaran	SKPD	46	47	Meningkat
2.	Optimalisasi penatausahaan keuangan daerah dan layanan kebendaharaan sesuai peraturan perundang-undangan	SKPD	44	45	Meningkat
3.	Optimalisasi kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	SKPD	43	44	Meningkat
4.	Optimalisasi pengelolaan aset daerah sesuai peraturan perundang - undangan	SKPD	48	49	Meningkat
5.	Optimalisasi pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip	A	A	Tetap

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPKAD Kab Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKAD Kab. Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
			SATUAN	TARGET 2021			
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK	Nilai capaian kinerja keuangan.Opini BPK, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.	Opini BPK	WTP	WTP	100,00%	Berhasil (hijau)
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						
Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Tepat Waktu	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Tepat Waktu	Jumlah dokumen penganggaran yang dihasilkan/ jumlah target dokumen penganggaran x 100%	%	100	111	111%	Berhasil (hijau)

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
			SATUAN	TARGET 2021			
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Penggeseran/Perubahan APBD Tepat Waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Penggeseran/Perubahan APBD Tepat Waktu	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun dan Terverifikasi	SKPD	54	54	100%	Berhasil (hijau)
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu	Dok	1	1	100%	Berhasil (hijau)
Tersusunnya Rancangan Peraturan Tersusunnya Rancangan Peraturan daerah tentang APBD Tepat Waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan daerah tentang APBD Tepat Waktu	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan daerah tentang APBD Tepat Waktu	Dok	1	1	100%	Berhasil (hijau)
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tepat Waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tepat Waktu	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tepat Waktu	Dok	1	1	100%	Berhasil (hijau)
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pergeseran/Perubahan APBD tepat waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pergeseran/Perubahan APBD tepat waktu	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pergeseran/Perubahan APBD tepat waktu	Dok	2	4	200%	Berhasil (hijau)
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD tepat waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD tepat waktu	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD tepat waktu	Dok	1	1	100%	Berhasil (hijau)

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
			SATUAN	TARGET 2021			
Tersusunnya Regulasi dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan (Tersusunnya Standar Harga Satuan dan Standar Harga Lainnya)	Tersusunnya Regulasi dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan (Tersusunnya Standar Harga Satuan dan Standar Harga Lainnya)	Jumlah dokumen Regulasi dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan yang tersusun	Dok	4	4	100%	Berhasil (hi jau)
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	Jumlah bulan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah yang terlaksana	Bulan	12	12	100%	Berhasil (hi jau)
Terlaksananya Penerbitan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana, DPA/DPPA untuk 54 SKPD (Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah)	Terlaksananya Penerbitan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana, DPA/DPPA untuk 54 SKPD (Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah)	Jumlah dokumen Penerbitan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana, DPA/DPPA untuk 54 SKPD yang terlaksana	Dok	3	3	100%	Berhasil (hi jau)
Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	Jumlah SP2D yang diterbitkan / jumlah target SP2D X 100%	%	100	100	100%	Berhasil (hi jau)
Terlaksananya Pembinaan Pelaporan Pelaporan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Daerah (Jumlah SPD yang	Terlaksananya Pembinaan Pelaporan Pelaporan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Daerah (Jumlah SPD yang diterbitkan)	Jumlah SPD yang diterbitkan	Dok	1000	100	100%	Berhasil (hi jau)

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
			SATUAN	TARGET 2021			
diterbitkan)							
Jumlah Desa yang tersalurkan dana Desa Tepat Waktu	Jumlah Desa yang tersalurkan dana Desa Tepat Waktu	Jumlah Desa yang tersalurkan dana Desa Tepat Waktu	Desa	277	277	100%	Berhasil (hijau)
Terlaksananya Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah (Terlaksananya Sistem Informasi Penyaluran/Pengeluaran Kas Daerah dan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Penyaluran Kas Daerah)	Terlaksananya Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah (Terlaksananya Sistem Informasi Penyaluran/Pengeluaran Kas Daerah dan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Penyaluran Kas Daerah)	Jumlah SKPD yang Sistem Informasi Penyaluran/Pengeluaran Kas Daerah dan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Penyaluran Kas Daerah terlaksana	SKPD	96	96	100%	Berhasil (hijau)
Persentase Penyaluran Dana Darurat dan Mendesak (Belanja Tidak Terduga)	Persentase Penyaluran Dana Darurat dan Mendesak (Belanja Tidak Terduga)	Jumlah persentase penyaluran dana darurat dan mendesak yang terlaksana / jumlah target persentase penyaluran dana darurat dan mendesak yang terlaksana x 100%	Tahun	1	1	100%	Berhasil (hijau)

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
			SATUAN	TARGET 2021			
Terlaksananya Penyediaan Dokumen Belanja Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Banjar (Lancarnya Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) PNS Kabupaten Banjar)	Terlaksananya Penyediaan Dokumen Belanja Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Banjar (Lancarnya Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) PNS Kabupaten Banjar)	Jumlah SKPD yang Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) PNS Kabupaten Banjar-nya lancar	SKPD	54	54	100%	Berhasil (hijau)
Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	Jumlah laporan SKPD tepat waktu / Jumlah total SKPD di Kabupaten Banjar x 100%	%	100	100	100%	Berhasil (hijau)
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Triwulan/Semesteran	Lap	12	12	100%	Berhasil (hijau)
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Daerah (Unaudit) dan Laporan Keuangan Daerah (Audited)	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Daerah (Unaudit) dan Laporan Keuangan Daerah (Audited)	Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Lap	2	2	100%	Berhasil (hijau)
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun akuntabel dan Tepat Waktu	Dok	1	1	100%	Berhasil (hijau)

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
			SATUAN	TARGET 2021			
yang Akuntabel dan Tepat Waktu							
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun	Dok	1	1	100%	Berhasil (hijau)
Tersusunnya Dokumen Laporan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Tersusunnya Dokumen Laporan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun	Dok	1	1	100%	Berhasil (hijau)
Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara baik	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara baik	Jumlah Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara baik	%	100	102.67	102.67%	Berhasil (hijau)
Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	%	100	100	100%	Berhasil (hijau)
Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik (Tersusunnya Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa)	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik (Tersusunnya Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa)	Jumlah dokumen Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa yang tersusun	Dok	1	1	100%	Berhasil (hijau)

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
			SATUAN	TARGET 2021			
Tersusunnya Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	Dok	2	2	100%	Berhasil (hi jau)
	Tersusunnya Dokumen Penetapan Pengurus Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Pengurus Barang Milik Daerah yang tersusun	Dok	1	1	100%	Berhasil (hi jau)
	Tersusunnya Dokumen Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah yang tersusun	Dok	1	1	100%	Berhasil (hi jau)
	Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	Dok	1	1	100%	Berhasil (hi jau)
Tersusunnya Dokumen Laporan Sensus Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Sensus Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Sensus Barang Milik Daerah yang tersusun	Dok	1	1	100%	Berhasil (hi jau)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Milik Daerah	Terpenuhinya Aspek Pengamanannya Secara Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang Terpenuhinya Aspek Pengamanannya Secara Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Unit/ bidang	15	15	100%	Berhasil (hi jau)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	Tersusunnya Dokumen Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang tersusun	Dok	30	39	126.67%	Berhasil (hi jau)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	Tersusunnya Dokumen Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tersusun	Dok	4	4	100%	Berhasil (hi jau)

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
			SATUAN	TARGET 2021			
Terlaksananya SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Per Triwulan	Tersusunnya Dokumen Laporan Rekonsiliasi SKPD Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi SKPD Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	Dok	4	4	100%	Berhasil (hijau)
Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	Jumlah Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	%	100	100	100%	Berhasil (hijau)
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan / jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang ditargetkan x 100%	%	100	108.33%	108.33%	Berhasil (hijau)
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Penyusunan Renstra dan Renja)	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Dok	3	4	133.33%	Berhasil (hijau)
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Jumlah Dokumen RKA/RKAP dan	Jumlah Dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD yang tersusun	Dok	3	4	133.33%	Berhasil (hijau)

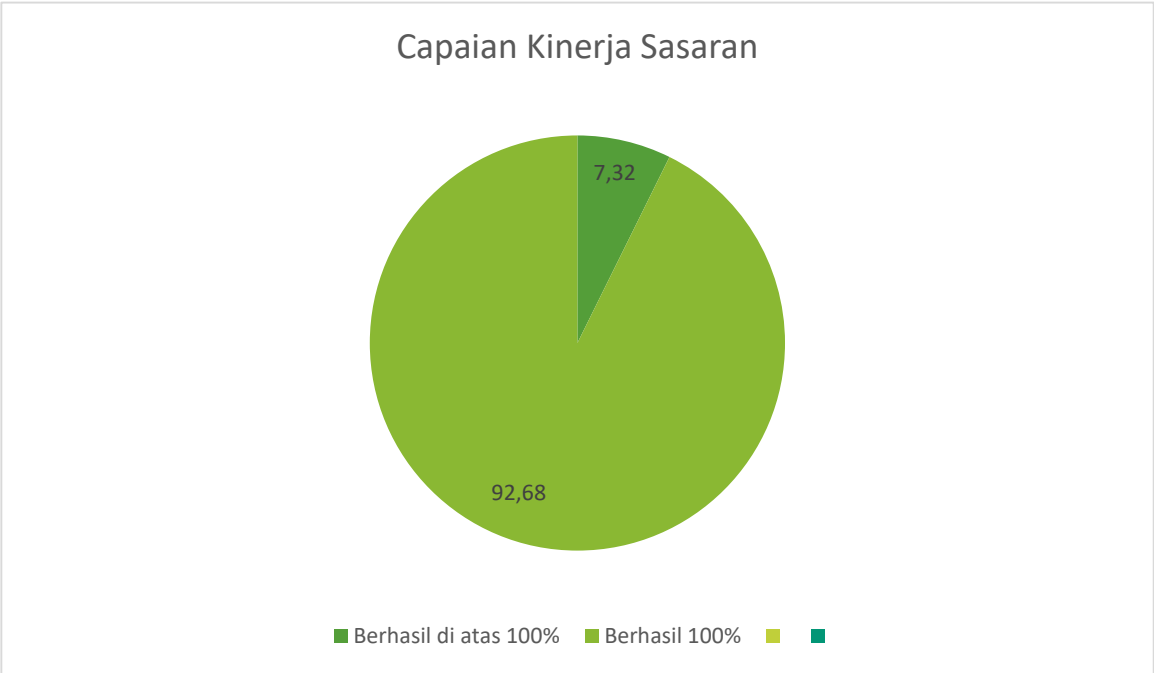
SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
			SATUAN	TARGET 2021			
	DPA/DPPA SKPD)						
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Kinerja SKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Dok	12	12	100%	Berhasil (hi jau)
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Jumlah Dokumen LKjIP, LKPJ)	Jumlah Dokumen LKjIP, LKPJ yang tersusun	Dok	2	2	100%	Berhasil (hi jau)
Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima	%	100	100	100%	Berhasil (hi jau)
Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	1	100%	Berhasil (hi jau)
Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan	Proses Administrasi Keuangan pada BPKAD berjalan dengan lancar	Jumlah bulan Proses Administrasi Keuangan pada BPKAD berjalan dengan lancar	12	Bulan	12	100%	Berhasil (hi jau)
Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun yang tersusun	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun yang tersusun	2	Dokumen	2	100%	Berhasil (hi jau)

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
			SATUAN	TARGET 2021			
Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%	Berhasil (hi jau)
Terpenuhinya Kursus Singkat dan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti kursus singkat dan bimbingan teknis tentang peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti kursus singkat dan bimbingan teknis tentang peraturan Perundang-undangan	Peserta	8	–	100%	Berhasil (hi jau)
Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%	Berhasil (hi jau)
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan yang Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terlaksananya	Bulan	12	12	100%	Berhasil (hi jau)
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	Buku	1	1	100%	Berhasil (hi jau)
Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%	Berhasil (hi jau)

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
			SATUAN	TARGET 2021			
Persentase Jumlah bulan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Fasilitas untuk pengadaan perlengkapan kantor di lingkungan BPKAD dapat terpenuhinya sesuai standar kelayakan	Jumlah bulan Fasilitas untuk pengadaan perlengkapan kantor di lingkungan BPKAD dapat terpenuhinya sesuai standar kelayakan	Bulan	12	12	100%	Berhasil (hijau)
	kebersihan lingkungan dan kenyamanan kerja pada BPKAD terpenuhi	Jumlah bulan kebersihan lingkungan dan kenyamanan kerja pada BPKAD terpenuhi	Bulan	12	12	100%	Berhasil (hijau)
	Terlaksananya Penyediaan peralatan kebersihan kantor	Jumlah bulan Terlaksananya Penyediaan peralatan kebersihan kantor	Bulan	12	12	100%	Berhasil (hijau)
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%	Berhasil (hijau)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi dan listrik yang terbayar	Jumlah rekening jasa komunikasi dan listrik yang terbayar	Rekening	24	24	100%	Berhasil (hijau)
Persentase jumlah bulan Jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi sesuai ketentuan	Jumlah bulan paket makanan dan minuman rapat dan tamu tersedia	Jumlah bulan paket makanan dan minuman rapat dan tamu tersedia	Bulan	12	12	100%	Berhasil (hijau)

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
			SATUAN	TARGET 2021			
	Jumlah bulan Kegiatan Rapat– Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah dapat terlaksana	Jumlah bulan Kegiatan Rapat–Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah dapat terlaksana	Bulan	12	12	100%	Berhasil (hi jau)
Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	100	100%	Berhasil (hi jau)
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah waktu Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tahun	1	1	100%	Berhasil (hi jau)
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah waktu Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tahun	1	1	100%	Berhasil (hi jau)
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Paket Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Paket	1	1	100%	Berhasil (hi jau)
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bulan	12	12	100%	Berhasil (hi jau)

Sumber : Data Realisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar 2021



Sumber : Data Realisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar 2021

Berdasarkan data pada tabel 3.3 bahwa hampir semua indikator mencapai 100% (berhasil). Pada sasaran strategis periode 2016 -2021 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah, di tahun 2021 Kabupaten Banjar dapat mencapai target dengan memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diberikan oleh BPK. Opini WTP tersebut dapat dicapai karena Kabupaten Banjar dinilai berhasil menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, memenuhi kecukupan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, memiliki kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektif dalam sistem pengendalian intern terhadap keberadaan aset serta kelengkapan bukti dan nilai aset. Pada sasaran strategis periode 2021 - 2026 yaitu Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat, di tahun 2021 Kabupaten Banjar dapat mencapai target yaitu 91,84%. Target tersebut dapat dicapai dengan mengukur nilai penyajian dokumen penganggaran, nilai penyaluran anggaran, penyajian laporan keuangan dan nilai pengelolaan barang milik daerah.

A. 2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menyebabkan adanya perbedaan terkait dengan program/kegiatan/sub kegiatan tahun anggaran 2019-2020 dengan tahun anggaran 2021, sehingga untuk tabel perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya tidak bisa dipenuhi secara presisi. Tetapi dapat dibandingkan dengan indikator yang sama untuk sebagian subkegiatan dari tahun anggaran 2020 dengan tahun anggaran 2021.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan periode akhir dari kinerja strategis BPKAD sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2016-2021 dan periode awal dari kinerja strategis BPKAD sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2021-2026. Maka tahun 2021 merupakan tahun transisi antara Renstra periode tahun 2016-2021 dengan Renstra periode tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TA 2020			TA 2021		
		SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Opini BPK	Nilai capaian kinerja keuangan.Opini BPK, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.	Opini BPK	WTP	100,00%	Opini BPK	WTP	100,00%

INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TA 2020			TA 2021		
		SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD) adalah suatu ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKAD diukur melalui 4 (empat) dimensi meliputi: 1. Persentase perangkat daerah dengan penyajian dokumen penganggaran yang tertib dan baik; 2. Persentase perangkat daerah dengan penyaluran anggaran yang baik dan ketepatan waktu penyampaian laporan fungsional serta kertas kerja pajak; 3. Persentase perangkat daerah dengan penyajian laporan keuangan dengan kategori baik; dan 4. Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan tertib.	-	-	-	Persen	91,84	100%
Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Tepat Waktu	Jumlah dokumen penganggaran yang dihasilkan/ jumlah target dokumen penganggaran x 100%	%	100	104.17%	%	100	111%

INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TA 2020			TA 2021		
		SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Penggeseran/Perubahan APBD Tepat Waktu	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun dan Terverifikasi	-	-	-	SKPD	54	100%
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu	Dok	1	100%	Dok	1	100%
Tersusunnya Rancangan Peraturan daerah tentang APBD Tepat Waktu	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan daerah tentang APBD Tepat Waktu	Dok	1	100%	Dok	1	100%
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tepat Waktu	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tepat Waktu	Dok	1	100%	Dok	1	100%
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pergeseran/Perubahan APBD tepat waktu	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pergeseran/Perubahan APBD tepat waktu	-	-	-	Dok	2	200%
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD tepat waktu	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD tepat waktu	Dok	1	100%	Dok	1	100%

INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TA 2020			TA 2021		
		SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Tersusunnya Regulasi dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan (Tersusunnya Standar Harga Satuan dan Standar Harga Lainnya)	Jumlah dokumen Regulasi dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan yang tersusun	Dok	4	100%	Dok	4	100%
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	Jumlah bulan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah yang terlaksana	-	-	-	Bulan	12	100%
Terlaksananya Penerbitan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana, DPA/DPPA untuk 54 SKPD (Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah)	Jumlah dokumen Penerbitan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana, DPA/DPPA untuk 54 SKPD yang terlaksana	-	-	-	Dok	3	100%
Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	Jumlah SP2D yang diterbitkan / jumlah target SP2D X 100%	%	100	100%	%	100	100%
Terlaksananya Pembinaan Pelaporan Pelaporan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Daerah (Jumlah SPD yang diterbitkan)	Jumlah SPD yang diterbitkan	Dok	966	100%	Dok	1000	100%
Jumlah Desa yang tersalurkan dana Desa Tepat Waktu	Jumlah Desa yang tersalurkan dana Desa Tepat Waktu	Desa	277	100%	Desa	277	100%

INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TA 2020			TA 2021		
		SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Terlaksananya Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah (Terlaksananya Sistem Informasi Penyaluran/Pengeluaran Kas Daerah dan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Penyaluran Kas Daerah)	Jumlah SKPD yang Sistem Informasi Penyaluran/Pengeluaran Kas Daerah dan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Penyaluran Kas Daerah terlaksana	Aplikasi	3	100%	SKPD	96	100%
Persentase Penyaluran Dana Darurat dan Mendesak (Belanja Tidak Terduga)	Jumlah persentase penyaluran dana darurat dan mendesak yang terlaksana / jumlah target persentase penyaluran dana darurat dan mendesak yang terlaksana x 100%	Tahun	1	100%	Tahun	1	100%
Terlaksananya Penyediaan Dokumen Belanja Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Banjar (Lancarnya Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) PNS Kabupaten Banjar)	Jumlah SKPD yang Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) PNS Kabupaten Banjar-nya lancar	SKPD	54	100%	SKPD	54	100%
Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	Jumlah laporan SKPD tepat waktu / Jumlah total SKPD di Kabupaten Banjar x 100%	%	100	100%	%	100	100%
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Triwulan/Semesteran	Dok	4	100%	Lap	12	100%

INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TA 2020			TA 2021		
		SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Daerah (Unaudit) dan Laporan Keuangan Daerah (Audited)	Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Dok	2	100%	Lap	2	100%
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun akuntabel dan Tepat Waktu	Dok	1	100%	Dok	1	100%
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun	Dok	1	100%	Dok	1	100%
Tersusunnya Dokumen Laporan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun	–	–	–	Dok	1	100%
Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara baik	Hasil perbandingan (rasio) jumlah penyampaian laporan barang milik daerah secara tertib dan benar dengan jumlah keseluruhan penyampaian LBMD di Kab. Banjar yang dinyatakan dalam bentuk persen	%	100	100%	%	100	100%
Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Hasil perbandingan (rasio) jumlah pengelolaan BMD yang sesuai dengan aturan yang berlaku dengan jumlah keseluruhan pengelolaan EMD di Kab. Banjar yang dinyatakan dalam persen	%	100	100%	%	100	100%
Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa yang tersusun	–	–	–	Dok	1	100%

INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TA 2020			TA 2021		
		SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
(LEMD) Secara Baik (Tersusunnya Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa)							
Tersusunnya Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	-	-	-	Dok	2	100%
Tersusunnya Dokumen Penetapan Pengurus Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Pengurus Barang Milik Daerah yang tersusun	-	-	-	Dok	1	100%
Tersusunnya Dokumen Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah yang tersusun	-	-	-	Dok	1	100%
Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	-	-	-	Dok	1	100%
Tersusunnya Dokumen Laporan Sensus Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Sensus Barang Milik Daerah yang tersusun	-	-	-	Dok	1	100%
Terpenuhinya Aspek Pengamanannya Secara Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang Terpenuhinya Aspek Pengamanannya Secara Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Lokasi	5	100%	Unit/ bidang	15	100%
Tersusunnya Dokumen Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang tersusun	Dok	12	100%	Dok	39	126.67%
Tersusunnya Dokumen Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tersusun	-	-	-	Dok	4	100%
Tersusunnya Dokumen Laporan Rekonsiliasi SKPD Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi SKPD Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	SKPD	54	100%	Dok	4	100%

INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TA 2020			TA 2021		
		SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	yang tersusun						
Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	Jumlah Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	%	100	100%	%	100	100%
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan / jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang ditargetkan x 100%	Tahun	1	100%	%	100	108.33%
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Penyusunan Renstra dan Renja)	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	–	–	–	Dok	3	133.33%
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Jumlah Dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD)	Jumlah Dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD yang tersusun	–	–	–	Dok	3	133.33%
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Kinerja SKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	–	–	–	Dok	12	100%

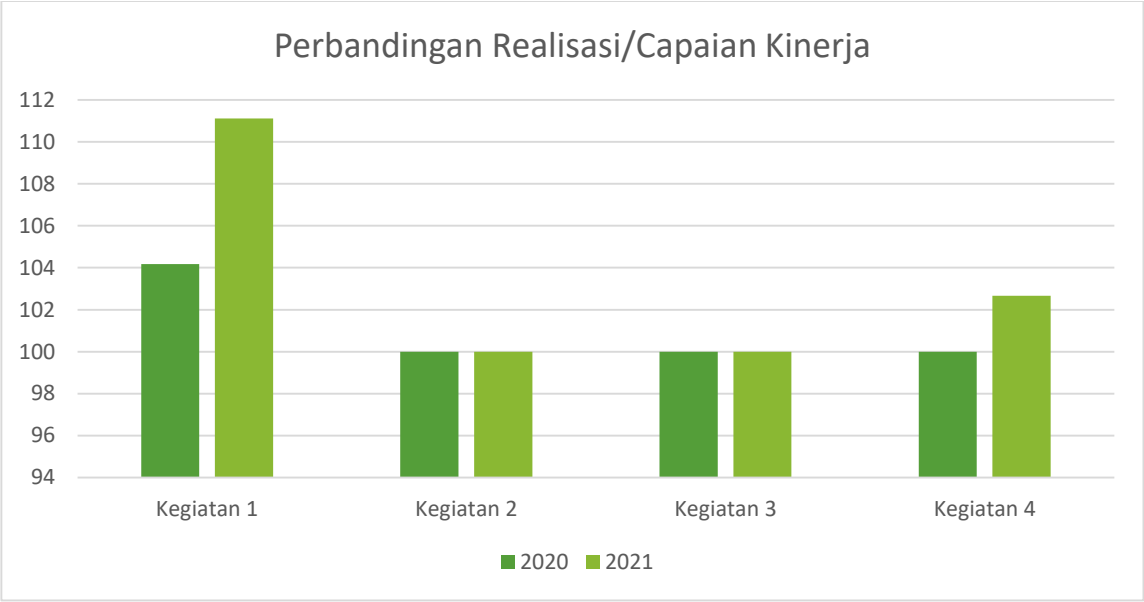
INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TA 2020			TA 2021		
		SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Jumlah Dokumen LKjIP, LKPJ)	Jumlah Dokumen LKjIP, LKPJ yang tersusun	Dok	20	100%	Dok	2	100%
Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima	%	100	100%	%	100	100%
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah tersedianya gaji dan tunjangan ASN	–	–	–	1	Tahun	100%
Proses Administrasi Keuangan pada BPKAD berjalan dengan lancar	Jumlah bulan Proses Administrasi Keuangan pada BPKAD berjalan dengan lancar	%	100	100%	12	Bulan	100%
Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun yang tersusun	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun yang tersusun	–	–	–	2	Dokumen	100%
Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	%	100	100%	%	100	100%
Jumlah Peserta yang mengikuti kursus singkat dan bimbingan teknis tentang peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti kursus singkat dan bimbingan teknis tentang peraturan Perundang-undangan	Tahun	1	100%	Peserta	8	100%

INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TA 2020			TA 2021		
		SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	100%	%	100	100%
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan yang Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terlaksananya	Bulan	12	100%	Bulan	12	100%
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	–	–	–	Buku	1	100%
Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	100%	%	100	100%
Fasilitas untuk pengadaan perlengkapan kantor di lingkungan BPKAD dapat terpenuhinya sesuai standar kelayakan	Jumlah bulan Fasilitas untuk pengadaan perlengkapan kantor di lingkungan BPKAD dapat terpenuhinya sesuai standar kelayakan	Unit	1	100%	Bulan	12	100%
kebersihan lingkungan dan kenyamanan kerja pada BPKAD terpenuhi	Jumlah bulan kebersihan lingkungan dan kenyamanan kerja pada BPKAD terpenuhi	Bulan	12	100%	Bulan	12	100%

INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TA 2020			TA 2021		
		SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Terlaksananya Penyediaan peralatan kebersihan kantor	Jumlah bulan Terlaksananya Penyediaan peralatan kebersihan kantor	–	–	–	Bulan	12	100%
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	100%	%	100	100%
Jumlah rekening jasa komunikasi dan listrik yang terbayar	Jumlah rekening jasa komunikasi dan listrik yang terbayar	Rekening	24	100%	Rekening	24	100%
Jumlah bulan paket makanan dan minuman rapat dan tamu tersedia	Jumlah bulan paket makanan dan minuman rapat dan tamu tersedia	Bulan	12	100%	Bulan	12	100%
Jumlah bulan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah dapat terlaksana	Jumlah bulan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah dapat terlaksana	Tahun	1	100%	Bulan	12	100%
Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	100%	%	100	100%
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah waktu Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Mobil	1	100%	Tahun	1	100%

INDIKATOR KINERJA	CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TA 2020			TA 2021		
		SATUAN	TARGET	CAPAIAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah waktu Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Buah	31	100%	Tahun	1	100%
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Paket Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Paket	1	100%	Paket	1	100%
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bulan	12	100%	Bulan	12	100%

Sumber : LRFK Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar TA. 2020 dan TA 2021



Sumber : LRFK Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar TA. 2020 dan TA 2021

Berdasarkan data pada tabel 3.4 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BPKAD konsisten selalu berada pada kisaran persentase 90% ke atas, sehingga capaian indikator program pada BPKAD dapat dinilai sangat baik.

Dibandingkan dengan realisasi indikator program kegiatan pada tahun anggaran 2020, capaian realiasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar secara keseluruhan sudah baik yang tercermin pada besaran capaian indikator yang rata-rata mencapai 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar berhasil dapat melaksanakan seluruh program kegiatan yang sudah direncanakan. Untuk tahun 2022 program yang sudah mencapai target 100% akan terus dipertahankan dengan terus memperbaiki kualitas output yang dihasilkan. Usaha yang dilakukan adalah dengan cara menggerakkan seluruh elemen pejabat dan staf pelaksana yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, membangun komitmen bersama untuk untuk sama-sama meningkatkan kinerja ke depannya, bergerak secara bersama-sama pula untuk menyusun seperangkat kekuatan meminimalisir faktor-faktor penghambat kinerja.

Tabel 3.5

Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2021–2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
					2016		2017		2018		2019		2020					2021	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			Indek Reformasi Birokrasi	66,67%							73		75		77		Kompusit	Kab. Banjar	
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima	1.287.610.004	100%	2.093.876.592	100%	2.338.761.360	100%	1.906.481.500	100%	1.816.821.113	100%	2.059.500.865	100%	2.337.700.760	2.665.522.116	BPKAD	Kab. Banjar
		Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa KOMunikasi, Sumber Daya Air dan Lisytrik	43.463.556	24 rekening	83.500.000	24 rekening	196.000.000	24 rekening	259.943.900	24 rekening	247.943.900	24 rekening	331.240.000	24 rekening	430.612.000	559.795.000	BPKAD	Kab. Banjar

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
					2016		2017		2018		2019		2020				2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksannya Penyediaan Administrasi Keuangan	116.615,150	100%	194.450.000	100%	20.400.000	100%	24.715.600	100%	25.363.700	100%	30.496.000	100%	39.647.400	100%	51.541.620	BPKAD	Kab. Banjar
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	10.985.500	12 bulan	1.999.992	12 bulan	14.659.200	12 bulan	54.480.000	12 bulan	86.100.000	12 bulan	94.710.000	12 bulan	104.181.000	12 bulan	114.599.100	BPKAD	Kab. Banjar
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksanya Penyediaan Alat Tulis Kantor	36.163.200	12 bulan	46.229.600	12 bulan	118.278.800	12 bulan	44.430.700	12 bulan	44.430.700	12 bulan	48.873.770	12 bulan	53.761.147	12 bulan	59.137.262	BPKAD	Kab. Banjar

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
					2016		2017		2018		2019		2020				2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.999.850	12 bulan	24.000.000	12 bulan	24.000.000	12 bulan	44.000.000	12 bulan	44.000.000	12 bulan	48.873.770	12 bulan	53.761.147	12 bulan	59.137.262	BPKAD	Kab. Banjar
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.836.500	12 bulan	3.800.000	12 bulan	2.752.320	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.000.000	12 bulan	1.000.000	BPKAD	Kab. Banjar
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	253.145.820	12 bulan	464.050.000	12 bulan	514.680.000	12 bulan	319.031.000	12 bulan	240.926.000	12 bulan	265.018.600	12 bulan	291.520.460	12 bulan	320.672.506	BPKAD	Kab. Banjar

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
					2016		2017		2018		2019		2020				2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
		Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah	Terlaksanya Rapat-rapat Koordinas dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	318.718.666	12 bulan	413.600.000	12 bulan	579.341.040	12 bulan	547.517.300	12 bulan	554.179.746	12 bulan	609.597.720	12 bulan	670.557.491	12 bulan	737.613.250	BPKAD	Kab. Banjar
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Terlaksananya Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	710.513.000	12 bulan	862.250.000	12 bulan	868.650.000	12 bulan	611.363.000	12 bulan	572.877.088	12 bulan	630.161.775	12 bulan	693.181.292	12 bulan	762.499.378	BPKAD	Kab. Banjar
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	531.628.747	100%	564.200.000	100%	382.837.760	100%	351.495.060	100%	844.430.060	100%	928.873.066	100%	1.021.759.872	100%	1.123.936.409	BPKAD	Kab. Banjar

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
					2016		2017		2018		2019		2020				2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksanya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	133.947.000	100%	83.700.000	100%	19.000.000	4 unit	19.000.000	1 unit	4.800.000	1 unit	5.280.000	1 unit	5.808.000	1 unit	6.388.800	BPKAD	Kab. Banjar
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	270.310.525	100%	254.000.000	100%	30.000.000	100%	26.500.000	12 bulan	401.140.000	12 bulan	441.254.000	12 bulan	485.379.400	12 bulan	533.917.340	BPKAD	Kab. Banjar
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	22.105.000	100%	30.000.000	100%	137.037.760	1 paket	137.035.760	1 paket	127.435.760	1 paket	140.179.336	1 paket	154.197.269	1 paket	169.616.996	BPKAD	Kab. Banjar

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	-	-	-	-	-	-	1 unit	40.000.000	1 unit	44.000.000	1 unit	48.400.000	1 unit	53.240.000	BPKAD	Kab. Banjar	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	105.266.222	100%	196.500.000	100%	196.800.000	100%	168.959.300	9 R4, dan 22 R2	128.959.300	9 R4, dan 22 R2	141.855.230	9 R4, dan 22 R2	156.040.753	9 R4, dan 22 R2	171.644.828	BPKAD	Kab. Banjar
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	142.095.000	12 bulan	156.304.500	12 bulan	171.934.450	12 bulan	189.128.445	BPKAD	Kab. Banjar

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
					2016		2017		2018		2019		2020				2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. 101.332.350	100%	402.030.400	100%	997.474.786	100%	307.155.545	100%	300.000.000	100%	330.000.000	100%	363.000.000	BPKAD	Kab. Banjar		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Kursus Singkat dan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1. 101.332.350	12 bulan	402.030.400	12 bulan	997.474.786	12 bulan	307.155.545	12 bulan	300.000.000	12 bulan	330.000.000	12 bulan	363.000.000	BPKAD	Kab. Banjar		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.018.800	100%	98.525.000	100%	111.350.000	100%	130.372.200	100%	183.472.200	100%	201.819.420	100%	222.001.362	BPKAD	Kab. Banjar		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
					2016		2017		2018		2019		2020				2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kineja dan Ikhtisar Realisasi KInerja SKPD	50.018.800	11 dokumen	98.625.000	11 dokumen	111.350.000	11 dokumen	130.372.200	20 dokumen	183.472.200	20 dokumen	201.819.420	20 dokumen	222.001.382	20 dokumen	244.201.498	BPKAD	Kab. Banjar
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	2.837.676.245	100%	3.829.220.500	100%	4.341.859.645	100%	3.461.887.700	100%	3.356.887.700	100%	3.866.170.865	100%	4.639.405.026	100%	5.103.346.525	BPKAD	Kab. Banjar
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tepat Waktu	249.719.445	2 buah	331.888.000	2 buah	388.270.400	1 dokumen	285.435.400	1 dokumen	287.185.400	1 dokumen	243.636.900	1 dokumen	308.073.091	1 dokumen	338.880.400	BPKAD	Kab. Banjar

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
					2016		2017		2018		2019		2020				2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDh tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDh tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu	104.171.200	2 buah	162.350.000	2 buah	151.815.000	1 dokumen	132.945.400	1 dokumen	156.795.400	1 dokumen	156.795.400	1 dokumen	221.231.580	1 dokumen	243.354.738	BPKAD	Kab. Banjar
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tepat Waktu	259.271.901	2 buah	276.970.500	2 buah	343.121.000	1 dokumen	294.781.300	1 dokumen	301.523.800	1 dokumen	223.445.688	1 dokumen	287.881.868	1 dokumen	316.670.054	BPKAD	Kab. Banjar
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDh tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDh tentang Penjabaran Perubahan APBD Tepat Waktu	118.508.937	2 buah	187.370.500	2 buah	205.650.000	3 buah petak	231.969.400	1 dokumen	292.469.400	1 dokumen	236.881.948	1 dokumen	301.318.128	1 dokumen	331.449.940	BPKAD	Kab. Banjar

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Terfasilitainya Jaringan Aplikasi Simda Keuangan untuk SKPD	687.074.788	50 SKPD	1.310.249.500	50 SPD	1.067.500.000	1 Rp lkas, 12 Laporan	1.071.450.000	54 SKPD	1.099.450.000	54 SKPD	1.040.204.958	54 SKPD	1.104.641.138	54 SKPD	1.215.105.251	BPKAD	Kab. Banjar
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya pelatihan terhadap Kasubbag Perencanaan SKPD	962.133.274	100 %	590.000.000	100%	520.229.000	5 kegiatan, 35 SKPD	200.229.000	108 orang	104.387.000	108 orang	103.910.500	108 orang	168.346.680	108 orang	185.181.348	BPKAD	Kab. Banjar
		Peningkatan Administrasi, Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Terlaksananya Penerbitan Anggaran Kas, Surat penyediaan Dana, DPA/DPPA untuk 54 SKPD	456.795.700	2 buah	970.392.000	2 buah	1.885.294.245	3 dokumen	509.527.200	3 dokumen	547.445.200	3 dokumen	271.452.700	3 dokumen	335.888.880	3 dokumen	369.477.768	BPKAD	Kab. Banjar

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	-	-	-	-	6 dokumen	735.550.000	7 dokumen	597.631.500	7 dokumen	280.912.817	7 dokumen	345.378.997	7 dokumen	379.916.896	BPKAD	Kab. Banjar	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penggeseran APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penggeseran APBD	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	206.636.621	2 dokumen	271.072.801	2 dokumen	298.180.081	BPKAD	Kab. Banjar	
		Penyusunan Regulasi dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan	Tersusunnya Regulasi dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	4 dokumen	691.720.551	4 dokumen	756.166.731	4 dokumen	831.783.404	BPKAD	Kab. Banjar	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran	Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi RKA/RKAP SKPD tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 SKPD	65.342.221	54 SKPD	129.778.401	54 SKPD	142.766.241	BPKAD	Kab. Banjar
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah	Terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 dokumen	345.190.551	3 dokumen	409.628.731	3 dokumen	450.589.401	BPKAD	Kab. Banjar
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Program Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP	776.861.760	100%	1.396.215.300	100%	1.463.768.317	100%	1.429.514.995	100%	1.329.514.995	100%	1.666.962.444	100%	1.999.154.933	100%	2.099.112.677	BPKAD	Kab. Banjar

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
					2016		2017		2018		2019		2020				2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	306.523.550	100%	499.294.500	100%	499.295.000	100%	581.387.500	1 dokumen	576.987.500	1 dokumen	753.856.500	1 dokumen	904.627.800	1 dokumen	BPKAD	Kab. Banjar	
		Penusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	-	100%	86.623.500	100%	77.624.000	100%	77.730.500	1 dokumen	73.230.500	1 dokumen	73.230.500	1 dokumen	87.876.600	1 dokumen	BPKAD	Kab. Banjar	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu	326.017.700	100%	659.10.000	100%	571.871.040	100%	244.120.000	6 dokumen	274.404.000	6 dokumen	278.414.778	6 dokumen	334.097.735	6 dokumen	BPKAD	Kab. Banjar	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
					2016		2017		2018		2019		2020				2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
		Sosialisai Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	29.327.500	100%	121.464.000	100%	98.920.282	97 SKPD	119.148.000	2 kegiatan	31.114.000	2 kegiatan	150.245.000	2 kegiatan	180.294.000	2 kegiatan	189.308.700	BPKAD	Kab. Banjar
		Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	-	-	-	-	-	100%	80.850.000	12 kegiatan	80.850.000	12 kegiatan	88.814.778	12 kegiatan	106.577.733	12 kegiatan	111.906.619	BPKAD	Kab. Banjar
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Daerah (Unaudit) dan Laporan Keuangan Daerah (Audited)	-	-	-	-	-	100%	189.500.000	2 dokumen	172.550.000	2 dokumen	169.824.763	2 dokumen	203.789.715	2 dokumen	213.979.200	BPKAD	Kab. Banjar

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
					2016		2017		2018		2019		2020				2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	113.983.000	100%	29.733.300	100%	216.047.995	100%	136.778.995	18 dokumen	120.378.995	151.576.125	18 dokumen	181.891.350	18 dokumen	190.985.917	BPKAD	Kab. Banjar	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	2.246.367.938	89,14%	5.063.500.000	89,76%	4.372.600.000	92,23%	3.497.290.000	93%	3.521.438.000	3.906.883.500	94%	4.688.260.200	96%	4.369.659.690	BKAD	Kab. Bnajar	
		Peningkatan Pelaksanaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Penerbitan SK Penetapan Pengelola Keuangan Daerah SKPD	2.246.367.938	1 tahun	5.063.500.000	1 tahun	1.963.850.000	7.397 SKPD	1.773.220.000	7.397 SKPD	1.738.220.000	670.340.500	109 SKPD	1.289.890.050	109 SKPD	801.371.000	BPKAD	Kab. Banjar	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
					2016		2017		2018		2019		2020				2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
		Pengelolaan Administrasi Belanja Gaji Daerah	Terlaksananya Penyediaan Dokumen Belanja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Banjar	-	-	-	1 tahun	669.400.000	6.437 dokumen	792.400.000	966 dokumen	881.518.000	6.437 Pegawai	294.450.000	6.437 Pegawai	309.172.500	6.437 Pegawai	324.631.125	BPKAD	Kab. Banjar
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak langsung PPKD	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak Langsung PPKD	-	-	-	1 tahun	1.739.350.000	2.377 dokumen	931.670.000	2.377 dokumen	901.670.000	10 SKPD	176.663.000	10 SKPD	185.496.150	10 SKPD	194.770.950	BPKAD	Kab. Banjar
		Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Penerbitan SP2D	Terlaksananya Penerbitan SP2D SKPD dan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 SKPD	303.500.000	109 SKPD	318.675.000	109 SKPD	334.608.750	BPKAD	Kab. Banjar

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
					2016		2017		2018		2019		2020					2021			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp		
		Pengelolaan Transaksi Pendapatan dan Belanja Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pencatatan Transaksi Pendapatan Belanja Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 SKPD	106.150.000	109 SKPD	110.407.500	109 SKPD	116.927.875	BPKAD	Kab. Banjar
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Pengendalian Kas Umum Daerah	Terlaksananya Pengendalian Kas Umum Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 laporan	103.850.000	24 laporan	109.042.500	24 laporan	114.494.625	BPKAD	Kab. Banjar
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199 dokumen	296.850.000	1.199 dokumen	310.642.500	1.199 dokumen	326.174.625	BPKAD	Kab. Banjar

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		Pengelolaan dan Pelaporan Rekapitulasi SPT Masa SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Pelaporan Rekapitulasi SPT Masa SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	12 laporan	87.250.000	12 laporan	91.612.500	12 laporan	96.192.165	BPKAD	Kab. Banjar	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Rekonsiliasi Sinergi Data Transaksi Keuangan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Rekon Sinergi Data Transaksi Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	36 laporan	177.650.000	36 laporan	186.532.500	36 laporan	195.859.125	BPKAD	Kab. Banjar	
		Pengelolaan dan Pelaporan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah	Terlaksananya Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	1.347 SP2B	166.050.000	1.347 SP2B	174.352.500	1.347 SP2B	183.070.125	BPKAD	Kab. Banjar	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
					2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
		Peningkatan Pelaksanaan Sistem Informasi Elektronik Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksannya Peningkatan Sistem Informasi Elektronik Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 SKPD	206.860.000	96 SKPD	216.142.500	96 SKPD	226.949.625	BPKAD	Kab. Banjar
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Peningkatan Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Dana Transfer Daerah DAK Fisik dan DAK Non Fisik	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer Daerah DAK Fisik dan DAK Non Fisik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 dokumen	155.950.000	50 dokumen	163.747.500	50 dokumen	171.934.875	BPKAD	Kab. Banjar
		Pengelolaan dan Pelaporan TPG dan Tamsil Guru PNSD Kabupaten Banjar	Terlaksananya Pengelolaan TPG dan Tamsil Guru PNSD Kabupaten Banjar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.932 guru PNSD	136.000.000	2.932 guru PNSD	142.800.000	2.932 guru PNSD	149.940.000	BPKAD	Kab. Banjar

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) PNSD	Terlaksananya Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) PNSD Kabupaten Banjar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.515 pegawai	190.030.000	6.515 pegawai	199.531.500	6.515 pegawai	209.508.075	BPKAD	Kab. Banjar
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Pengelolaan Realisasi Belanja Pegawai SKPD	Terlaksanya Realisasi Belanja Pegawai SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 SKPD	77.950.000	42 SKPD	81.847.500	42 SKPD	85.939.875	BPKAD	Kab. Banjar
		Percepatan Penyaluran Belanja Hibah PPKD	Terlaksananya Penyaluran Dana Hibah PPKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 SKPD	81.550.000	4 SKPD	85.627.500	4 SKPD	89.908.875	BPKAD	Kab. Banjar

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		Percepatan Penyaluran Belanja Bantuan Sosial PPKD	Terlaksananya Penyaluran Dana Bantuan Sosial PPKD	-	-	-	-	-	-	-	-	5 SRPD	81.560.000	5 SRPD	86.627.500	5 SRPD	89.908.875	BPKAD	Kab. Banjar	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Pembinaan Pelaporan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial PPKD	Terlaksananya Pembinaan Pelaporan Pelaporan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	7 SRPD	160.560.000	7 SRPD	168.577.500	7 SRPD	177.006.375	BPKAD	Kab. Banjar	
		Pengelolaan Penyaluran Dana PAMSIMAS	Terlaksananya Pengelolaan Penyaluran Dana PAMSIMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Pamsimas	25.250.000	12 Pamsimas	25.512.500	12 Pamsimas	27.838.125	BPKAD	Kab. Banjar	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
					2016		2017		2018		2019		2020				2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
		Pengelolaan Penyaluran ADD, DD, dan BHPRD	Terlaksananya Pengelolaan Penyaluran Dana ADD,DD dan BHPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	277 Desa	173.150.000	277 Desa	181.807.500	277 Desa	190.807.875	BPKAD	Kab. Banjar	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Pengelolaan Penyaluran DAK Non Fisik BOP-PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Penyaluran DAK Non Fisik BOP-PAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	165 Paud Swasta	197.650.000	165 Paud Swasta	207.532.500	165 Paud Swasta	217.909.125	BPKAD	Kab. Banjar	
		Pengelolaan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Parpol	Terlaksannya Pengelolaan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Parpol	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Parpol	40.650.000	12 Parpol	42.682.500	12 Parpol	44.816.625	BPKAD	Kab. Banjar	

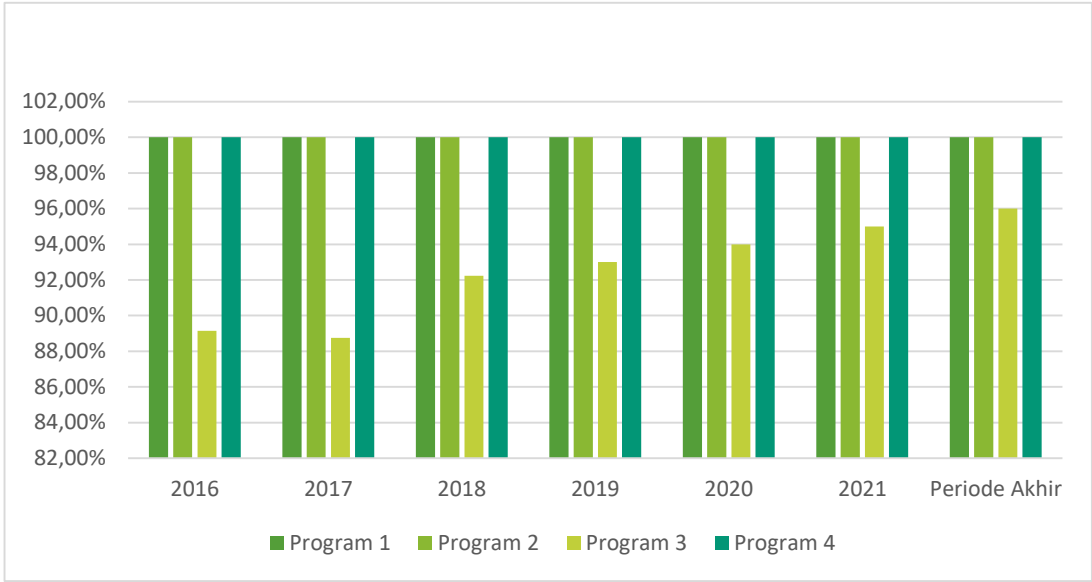
Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
					2016		2017		2018		2019		2020				2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Program Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LMD) Secara Baik	1.734.139.791	100%	2.306.300.000	100%	1.988.000.000	100%	1.276.940.000	100%	1.1689.960.000	100%	1.661.060.000	100%	1.993.272.000	100%	BPKAD	Kab. Banjar	
			Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah																	
				Penatausahaan dan rekonsiliasi BMD	Teraksananya SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Per Triwulan	-	-	-	-	-	-	54 shpd	605.460.000	54 shpd	492.760.000	54 shpd	575.213.200	54 shpd	BPKAD	Kab. Banjar

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
					2016		2017		2018		2019		2020				2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
		Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan BMD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	-	-	-	-	-	-	10 kegiatan	170.850.000	10 kegiatan	185.206.000	10 kegiatan	236.947.800	10 kegiatan	224.099.260	BPKAD	Kab. Banjar	
		Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD	Tersusunnya Dokumen BMD yang Dihapus dan Dipindahtanggankan	-	-	-	-	-	-	25 dokumen	189.050.000	25 dokumen	190.894.000	25 dokumen	243.204.600	25 dokumen	230.981.740	BPKAD	Kab. Banjar	
		Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Terlaksananya Pelatihan Pengelola Barang Milik Daerah SKPD	1.162.875.141	100%	1.486.850.000	100%	1.159.600.000	85%	1.064.840.000	108 orang	519.600.000	108 orang	622.220.000	108 orang	722.063.200	757.726.200	BPKAD	Kab. Banjar	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
					2016		2017		2018		2019		2020				2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Revaluasi/Appresal Aset/Barang Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	571.264.650	100%	821.450.000	100%	828.400.000	85%	212.100.000	5 dokumen	205.000.000	5 dokumen	166.020.000	5 dokumen	215.813.200	5 dokumen	200.884.200	BPKAD	Kab. Banjar

Sumber : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Sumber : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Banjar 2016-2021

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa target indikator terus meningkat setiap tahun hingga periode akhir Renstra. Dengan target yang telah disusun sesuai kinerja yang selama ini telah dicapai, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah mampu mencapai target hingga periode akhir Renstra.

A.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA

Indikator kinerja sasaran Tahun 2021 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja tahun 2021 Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2021, untuk mengetahui kemampuan BPKAD selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2021 dan target capaian periode akhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Target Periode Akhir

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK	Nilai capaian kinerja keuangan.Opini BPK, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.	Opini BPK	WTP	WTP	100%
Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Tepat Waktu	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Tepat Waktu	Jumlah dokumen penganggaran yang dihasilkan/ jumlah target dokumen penganggaran x 100%	%	111	100	111%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Penggeseran/Perubahan APBD Tepat Waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Penggeseran/Perubahan APBD Tepat Waktu	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun dan Terverifikasi	SKPD	54	–	100%
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu	Dok	1	1	100%
Tersusunnya Rancangan Peraturan Tersusunnya Rancangan Peraturan daerah tentang APBD Tepat Waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan daerah tentang APBD Tepat Waktu	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan daerah tentang APBD Tepat Waktu	Dok	1	–	100%
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tepat Waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tepat Waktu	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tepat Waktu	Dok	1	1	100%
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pergeseran/Perubahan APBD tepat waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pergeseran/Perubahan APBD tepat waktu	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pergeseran/Perubahan APBD tepat waktu	Dok	4	–	200%
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD tepat waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD tepat waktu	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD tepat waktu	Dok	1	1	100%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)
Tersusunnya Regulasi dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan (Tersusunnya Standar Harga Satuan dan Standar Harga Lainnya)	Tersusunnya Regulasi dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan (Tersusunnya Standar Harga Satuan dan Standar Harga Lainnya)	Jumlah dokumen Regulasi dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan yang tersusun	Dok	4	4	100%
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	Jumlah bulan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah yang terlaksana	Bulan	12	–	100%
Terlaksananya Penerbitan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana, DPA/DPPA untuk 54 SKPD (Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah)	Terlaksananya Penerbitan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana, DPA/DPPA untuk 54 SKPD (Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah)	Jumlah dokumen Penerbitan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana, DPA/DPPA untuk 54 SKPD yang terlaksana	Dok	3	–	100%
Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	Jumlah SP2D yang diterbitkan / jumlah target SP2D X 100%	%	100	100	100%
Terlaksananya Pembinaan Pelaporan Pelaporan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Daerah (Jumlah SPD yang	Terlaksananya Pembinaan Pelaporan Pelaporan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Daerah (Jumlah SPD yang diterbitkan)	Jumlah SPD yang diterbitkan	Dok	1000	966	100%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)
diterbitkan)						
Jumlah Desa yang tersalurkan dana Desa Tepat Waktu	Jumlah Desa yang tersalurkan dana Desa Tepat Waktu	Jumlah Desa yang tersalurkan dana Desa Tepat Waktu	Desa	277	277	100%
Terlaksananya Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah (Terlaksananya Sistem Informasi Penyaluran/Pengeluaran Kas Daerah dan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Penyaluran Kas Daerah)	Terlaksananya Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah (Terlaksananya Sistem Informasi Penyaluran/Pengeluaran Kas Daerah dan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Penyaluran Kas Daerah)	Jumlah SKPD yang Sistem Informasi Penyaluran/Pengeluaran Kas Daerah dan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Penyaluran Kas Daerah terlaksana	SKPD	96	3	100%
Persentase Penyaluran Dana Darurat dan Mendesak (Belanja Tidak Terduga)	Persentase Penyaluran Dana Darurat dan Mendesak (Belanja Tidak Terduga)	Jumlah persentase penyaluran dana darurat dan mendesak yang terlaksana / jumlah target persentase penyaluran dana darurat dan mendesak yang terlaksana x 100%	Tahun	1	1	100%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)
Terlaksananya Penyediaan Dokumen Belanja Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Banjar (Lancarnya Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) PNS Kabupaten Banjar)	Terlaksananya Penyediaan Dokumen Belanja Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Banjar (Lancarnya Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) PNS Kabupaten Banjar)	Jumlah SKPD yang Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) PNS Kabupaten Banjar-nya lancar	SKPD	54	54	100%
Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	Jumlah laporan SKPD tepat waktu / Jumlah total SKPD di Kabupaten Banjar x 100%	%	100	100	100%
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Triwulan/Semesteran	Lap	12	4	100%
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Daerah (Unaudit) dan Laporan Keuangan Daerah (Audited)	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Daerah (Unaudit) dan Laporan Keuangan Daerah (Audited)	Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Lap	2	2	100%
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun akuntabel dan Tepat Waktu	Dok	1	1	100%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)
yang Akuntabel dan Tepat Waktu						
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun	Dok	1	1	100%
Tersusunnya Dokumen Laporan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Tersusunnya Dokumen Laporan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun	Dok	1	–	100%
Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara baik	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara baik	Hasil perbandingan (rasio) jumlah penyampaian laporan barang milik daerah secara tertib dan benar dengan jumlah keseluruhan penyampaian LBMD di Kab. Banjar yang dinyatakan dalam bentuk persen	%	100	100	100%
Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Hasil perbandingan (rasio) jumlah pengelolaan EMD yang sesuai dengan aturan yang berlaku dengan jumlah keseluruhan pengelolaan BMD di Kab. Banjar yang dinyatakan dalam persen	%	100	100	100%
Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik (Tersusunnya	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik (Tersusunnya Dokumen Standar	Jumlah dokumen Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa yang tersusun	Dok	1	–	100%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)
Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa)	Harga Barang dan Jasa)					
Tersusunnya Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	Dok	2	–	100%
	Tersusunnya Dokumen Penetapan Pengurus Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Pengurus Barang Milik Daerah yang tersusun	Dok	1	–	100%
	Tersusunnya Dokumen Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah yang tersusun	Dok	1	–	100%
	Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	Dok	1	–	100%
Tersusunnya Dokumen Laporan Sensus Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Sensus Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Sensus Barang Milik Daerah yang tersusun	Dok	1	–	100%
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Milik Daerah	Terpenuhinya Aspek Pengamanannya Secara Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang Terpenuhinya Aspek Pengamanannya Secara Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Unit/ bidang	15	5	100%
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	Tersusunnya Dokumen Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang tersusun	Dok	39	12	126.67%
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	Tersusunnya Dokumen Penggunaan dan Pemanfaatan	Jumlah Dokumen Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tersusun	Dok	4	–	100%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)
Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	Barang Milik Daerah					
Terlaksananya SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Per Triwulan	Tersusunnya Dokumen Laporan Rekonsiliasi SKPD Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi SKPD Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	Dok	4	54	100%
Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	Jumlah Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	%	100	100	100%
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan / jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang ditargetkan x 100%	%	108.33%	1	108.33%
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Penyusunan Renstra dan Renja)	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Dok	4	-	133.33%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Jumlah Dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD)	Jumlah Dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD yang tersusun	Dok	4	–	133.33%
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Kinerja SKPD)	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Dok	12	–	100%
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Jumlah Dokumen LKjIP, LKPJ)	Jumlah Dokumen LKjIP, LKPJ yang tersusun	Dok	2	20	100%
Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima	%	100	100	100%
Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1	1	–	100%
Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan	Proses Administrasi Keuangan pada BPKAD berjalan dengan lancar	Jumlah bulan Proses Administrasi Keuangan pada BPKAD berjalan dengan lancar	12	12	100	100%

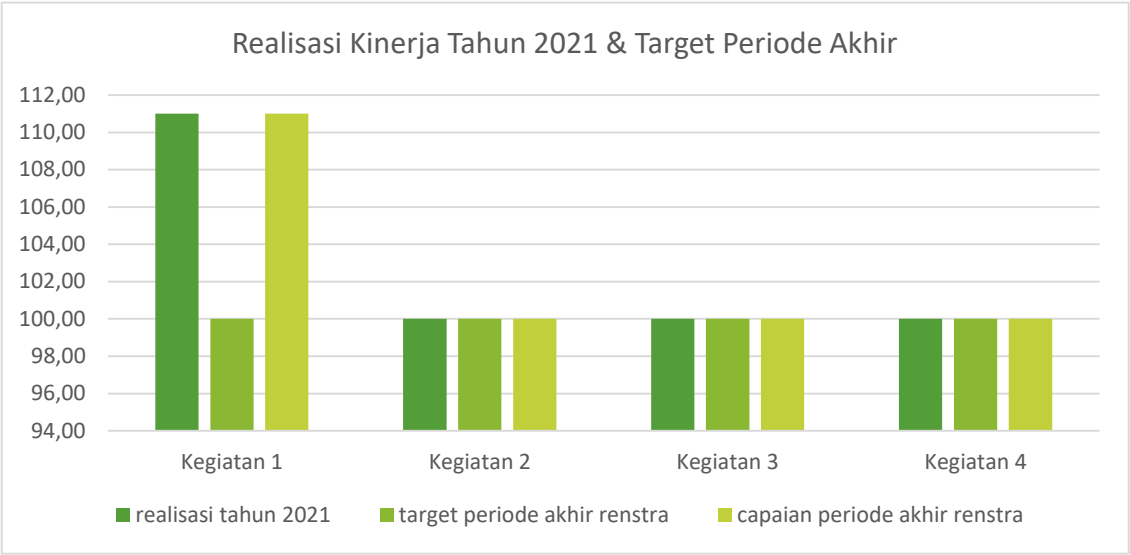
SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)
Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun yang tersusun	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun yang tersusun	2	2	–	100%
Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%
Terpenuhinya Kursus Singkat dan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti kursus singkat dan bimbingan teknis tentang peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti kursus singkat dan bimbingan teknis tentang peraturan Perundang-undangan	Peserta	–	1	100%
Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan yang Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terlaksananya	Bulan	12	12	100%
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	Buku	1	–	100%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)
Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%
Persentase Jumlah bulan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Fasilitas untuk pengadaan perlengkapan kantor di lingkungan BPKAD dapat terpenuhinya sesuai standar kelayakan	Jumlah bulan Fasilitas untuk pengadaan perlengkapan kantor di lingkungan BPKAD dapat terpenuhinya sesuai standar kelayakan	Bulan	12	12	100%
	kebersihan lingkungan dan kenyamanan kerja pada BPKAD terpenuhi	Jumlah bulan kebersihan lingkungan dan kenyamanan kerja pada BPKAD terpenuhi	Bulan	12	12	100%
	Terlaksananya Penyediaan peralatan kebersihan kantor	Jumlah bulan Terlaksananya Penyediaan peralatan kebersihan kantor	Bulan	12	12	100%
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%
Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi dan listrik yang terbayar	Jumlah rekening jasa komunikasi dan listrik yang terbayar	Rekening	24	24	100%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)
Persentase jumlah bulan Jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi sesuai ketentuan	Jumlah bulan paket makanan dan minuman rapat dan tamu tersedia	Jumlah bulan paket makanan dan minuman rapat dan tamu tersedia	Bulan	12	12	100%
	Jumlah bulan Kegiatan Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah dapat terlaksana	Jumlah bulan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah dapat terlaksana	Bulan	12	12	100%
Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	100	100%
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah waktu Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tahun	1	1	100%
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah waktu Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tahun	1	1	100%
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Paket Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Paket	1	1	100%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)	CAPAIAN PERIODE AKHIR RENSTRA (2021)
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bulan	12	12	100%

Sumber : Renstra & RFK TA. 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar



Sumber : Renstra & RFK TA. 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

B.1 SASARAN : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja BPKAD melalui 1 (satu) sasaran indikator kinerja pada tahun 2021 yang diukur dengan indikator kinerja sasaran Opini WTP dapat memenuhi target yang direncanakan, dengan capaian Berhasil.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut ;

Tabel 3.7
Realisasi Indikator BPKAD Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100 %
2.	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	91,84%	91,84%	100 %

Sumber : LRFK TA. 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banjar

Opini WTP dapat berhasil dicapai setelah memenuhi indikator keberhasilan dalam :

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis AkruaI,
2. Kecukupan pengungkapan dalam Laporan Keuangan,
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern terhadap keberadaan aset serta kelengkapan bukti dan nilai aset.

Hal tersebut dapat dilihat dalam kewajaran penyajian laporan keuangan sebagaimana Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK-RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020. Hal tersebut menggambarkan bahwa target yang telah ditetapkan dapat tercapai 100% (**Sangat Tinggi**).

Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD) adalah suatu ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.

IPKAD diukur melalui 4 (empat) dimensi meliputi :

1. Persentase perangkat daerah dengan penyajian dokumen penganggaran yang tertib dan baik;
2. Persentase perangkat daerah dengan penyaluran anggaran yang baik dan ketepatan waktu penyampaian laporan fungsional serta kertas kerja pajak;
3. Persentase perangkat daerah dengan penyajian laporan keuangan dengan kategori baik; dan
4. Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik dan tertib.

Hal tersebut dapat dilihat dalam hasil penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu 91,84% untuk tahun

anggaran 2021. Hal tersebut menggambarkan bahwa target yang telah ditetapkan dapat tercapai 100% (**Sangat Tinggi**).

Faktor keberhasilan sasaran ini adalah :

1. Melakukan Pengembangan Sistem Informasi Laporan Keuangan Manajemen Aset yang terintegrasi seluruh SKPD sebagai Pengelolaan Data yang akurat efektif dan dapat dipercaya untuk mendukung Laporan Keuangan.
2. Melakukan monitoring dan memperkuat Fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam mengawal Pelaksana kegiatan SKPD.
3. Melakukan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Serta Sosialisasi untuk memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrua.

Faktor Penghambat sasaran ini adalah :

1. Kurangnya tertib SKPD menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan dan Manajemen Aset .
2. Belum Optimalnya Pengembangan Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam penyampaian Laporan Keuangan SKPD.
3. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang Belum Terintegrasi Secara Optimal.

Catatan penting dalam Pencapaian Sasaran

1. Masih kurang maksimalnya pengetahuan sumber daya pengelolaan keuangan SKPD tentang pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah serta tentang pengelolaan barang milik daerah

Upaya agar bisa mempertahankan atau meningkatkan perbaikan :

1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan mengenai pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah serta tentang pengelolaan barang milik daerah secara lebih intensif dan berkelanjutan.

2. Melakukan pembinaan kepada SKPD untuk melakukan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah secara tertib,transfaran dan akuntabel termasuk melakukan rekonsiliasi Aset secara berkesinambungan.

Tindak lanjut yang akan datang :

1. Menambah kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan kepada SKPD
2. Rekonsiliasi Aset BMD tiap pertriwulan, membuat papan nama untuk tanah yang masuk data Aset Daerah.
3. Koordinasi daengan Dinas Pertanahan untuk melaksanakan Sertifikasi tanah ke kantor Pertanahan.
4. Membuat surat edaran ke SKPD untuk melakukan penatausahaan, pemeliharaan dan pengaman aset yang digunakannya.

Dari data tabel 3.4 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BPKAD dari tahun 2020 sampai dengan 2021 konsisten selalu berada pada kisaran persentase 90% ke atas, sehingga capaian indikator program pada BPKAD dapat dinilai sangat baik. Dibandingkan dengan realisasi indikator program kegiatan pada tahun anggaran 2020, capaian realiasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar dinilai mendapat kemajuan. Berdasarkan data yang diperoleh, secara keseluruhan sudah baik yang tercermin pada besaran capaian indikator yang rata-rata mencapai 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar berhasil dapat melaksanakan seluruh program kegiatan yang sudah direncanakan.

Berdasarkan data pada tabel 3.6 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2021 hampir semua program dan kegiatan berhasil mencapai target, jika dibandingkan dengan capaian periode akhir Renstra tahun 2021 untuk capaian realisasi seluruh program dan kegiatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah mampu sesuai dan mencapai target RPJMD Periode 2016-2021.

Berdasarkan data pada tabel 3.7 dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2021 indikator persentase penyaluran belanja daerah tepat waktu realisasinya mencapai 100%.

Usaha yang dilakukan adalah dengan cara menggerakkan seluruh elemen pejabat dan staf pelaksana yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, membangun komitmen bersama untuk untuk sama-sama meningkatkan kinerja ke depannya, bergerak secara bersama-sama pula untuk menyusun seperangkat kekuatan meminimalisir faktor-faktor penghambat kinerja.

Analisa Capaian Kinerja Program/Kegiatan :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2021 dapat mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 222.776.366.170,- dari pagu Rp. 223.386.194.100,-. Dan realisasi fisik mencapai 103.70%.

Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah ada 5 kegiatan dan 16 sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 333.499.000,- dari pagu Rp. 344.857.100,- yaitu mencapai 96.71%.

Faktor Penghambat : Kegiatan tersebut terkendala karena adanya pandemi covid 19, sehingga menghambat jalanya kegiatan yang telah direncanakan.

Cara mengatasi :

- Kualitas dan intensitas koordinasi ditingkatkan.
- Setiap tahapan kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

b. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 111.11%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 234.366.300,- dari pagu Rp. 252.497.900,- yaitu mencapai 92.82%.

Faktor Penghambat : Kegiatan tersebut terkendala karena adanya bencana Non Alam covid 19 mengakibatkan keterbatasan jalannya kegiatan serta tidak maksimalnya koordinasi.

Cara mengatasi :

- Kualitas dan intensitas koordinasi ditingkatkan.
- Setiap tahapan kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

c. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 96.335.200,- dari pagu Rp. 100.985.200,- yaitu mencapai 95.40%.

Faktor Penghambat : Kegiatan tersebut terkendala karena adanya bencana Non Alam covid 19 mengakibatkan keterbatasan jalannya kegiatan serta tidak maksimalnya koordinasi.

Cara mengatasi :

- Kualitas dan intensitas koordinasi ditingkatkan.
- Setiap tahapan kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

e. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 77.380.725,- dari pagu Rp. 95.099.900,- yaitu mencapai 94.37%.

Penghambat : Tidak ada penghambat yang berarti dalam kegiatan ini, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang pelaksanaan rutin dan operasional sesuai dengan target

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

5. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Pada kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 216.706.732.598,- dari pagu Rp. 216.849.645.900,- yaitu mencapai 99.93%.

Indikator kegiatan ini adalah Persentase penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu dan Persentase Perangkat Daerah dengan Penyaluran Belanja Daerah yang Baik.

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :

- a. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 73.941.149,- dari pagu Rp. 81.057.800,- yaitu mencapai 91.22%.

Faktor Penghambat: Kegiatan tersebut terkendala karena adanya bencana Non Alam covid 19 mengakibatkan keterbatasan jalannya kegiatan serta tidak maksimalnya koordinasi.

Cara mengatasi :

- Kualitas dan intensitas koordinasi ditingkatkan.
- Setiap tahapan kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

- b. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 216.454.386.200,- dari pagu Rp. 216.543.807.000,- yaitu mencapai 99.96%.

Penghambat : Tidak ada penghambat yang berarti dalam kegiatan ini, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang pelaksanaan rutin dan operasional sesuai dengan target

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

c. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 178.405.249,- dari pagu Rp. 224.781.100,- yaitu mencapai 79.37%.

Penghambat : Tidak ada penghambat yang berarti dalam kegiatan ini, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang pelaksanaan rutin dan operasional sesuai dengan target

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

6. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Pada kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 311.693.849,- dari pagu Rp. 496.452.600,- yaitu mencapai 62.78%.

Indikator kegiatan Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan dan Persentase Perangkat Daerah dengan Laporan Keuangan Kategori Baik.

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

- a. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Realisasi Kinerja mencapai mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.428.800,- dari pagu Rp. 91.028.800,- yaitu mencapai 20.25%.

Penghambat : Tidak ada penghambat yang berarti dalam kegiatan ini, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang pelaksanaan rutin dan operasional sesuai dengan target

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

- b. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi Kinerja mencapai mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 78.373.300,- dari pagu Rp. 85.584.800,- yaitu mencapai 91.57%.

Penghambat : Tidak ada penghambat yang berarti dalam kegiatan ini, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang pelaksanaan rutin dan operasional sesuai dengan target

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

- c. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- Realisasi Kinerja mencapai mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 112.225.400,- dari pagu Rp. 149.829.800,- yaitu mencapai 74.90%.

Penghambat : Tidak ada penghambat yang berarti dalam kegiatan ini, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang pelaksanaan rutin dan operasional sesuai dengan target

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

d. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

Realisasi Kinerja mencapai mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 102.666.349,- dari pagu Rp. 111.939.200,- yaitu mencapai 91.72%.

Penghambat : Tidak ada penghambat yang berarti dalam kegiatan ini, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang pelaksanaan rutin dan operasional sesuai dengan target

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

e. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi Kinerja mencapai mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- dari pagu Rp. 58.070.000,- yaitu mencapai 100%.

Kegiatan ini ditujukan untuk penyusunan system dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui aplikasi SIPD Kemendagri. Karena sampai akhir periode tahun anggaran 2021, SIPD Kemendagri tahap pelaporan masih belum siap maka kegiatan ini pun ditunda hingga SIPD Kemendagri tahap pelaporan sudah siap digunakan.

7. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.813.007.998,- dari pagu Rp.

5.000.000.000,- yaitu mencapai 96.26%. Indikator kegiatan Persentase penyelesaian SPP dan SPM yang diajukan oleh Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan indikator sub kegiatan Persentase penyelesaian SPM BTT yang diajukan oleh Perangkat Daerah.

8. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

Pada kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 86.387.500,- dari pagu Rp.107.457.600,- yaitu mencapai 80.39%. Indikator kegiatan Persentase penyelesaian SPP SPM Belanja Pegawai SKPD tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah dengan indikator sub kegiatan Persentase SKPD yang menggunakan aplikasi DAGO (Daftar Gaji Online).

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tahun 2021 dapat mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 548.790.055,- dari pagu Rp.581.032.500,-. Dan realisasi fisik mencapai 102.67%. Indikator program ini adalah Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan dan Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan tertib.

Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah ada 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

a. Penyusunan Standar Harga

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dari pagu Rp.60.050.000,- yaitu mencapai 99.92%.

Faktor Penghambat : Kegiatan tersebut terkendala karena adanya pandemi covid 19, sehingga menghambat jalannya kegiatan yang telah direncanakan.

Cara mengatasi :

- Kualitas dan intensitas koordinasi ditingkatkan.
- Setiap tahapan kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

b. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 266.201.055,- dari pagu Rp. 278.393.500,- yaitu mencapai 95.62%.

Faktor Penghambat : Kegiatan tersebut terkendala karena adanya pandemi covid 19, sehingga menghambat jalanya kegiatan yang telah direncanakan.

Cara mengatasi :

- Kualitas dan intensitas koordinasi ditingkatkan.
- Setiap tahapan kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

c. Inventarisasi Barang Milik Daerah

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.156.591.900,- dari pagu Rp.161.211.900,- yaitu mencapai 97.13%.

Faktor Penghambat : Kegiatan tersebut terkendala karena adanya pandemi covid 19, sehingga menghambat jalanya kegiatan yang telah direncanakan.

Cara mengatasi :

- Kualitas dan intensitas koordinasi ditingkatkan.
- Setiap tahapan kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

d. Pengamanan Barang Milik Daerah

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.10.560.700,- dari pagu Rp.13.060.700,- yaitu mencapai 80.86%.

Faktor Penghambat : Kegiatan tersebut terkendala karena adanya pandemi covid 19, sehingga menghambat jalanya kegiatan yang telah direncanakan.

Cara mengatasi :

- Kualitas dan intensitas koordinasi ditingkatkan.
- Setiap tahapan kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.

- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

e. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 126.67%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.514.600,- dari pagu Rp. 22.354.600,- yaitu mencapai 75.74%.

Faktor Penghambat : Kegiatan tersebut terkendala karena adanya pandemi covid 19, sehingga menghambat jalanya kegiatan yang telah direncanakan.

Cara mengatasi :

- Kualitas dan intensitas koordinasi ditingkatkan.
- Setiap tahapan kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

f. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Pada sub kegiatan ini realisasi fisik mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.081.800,- dari pagu Rp. 38.801.800,- yaitu mencapai 85.26%.

Faktor Penghambat : Kegiatan tersebut terkendala karena adanya pandemi covid 19, sehingga menghambat jalanya kegiatan yang telah direncanakan.

Cara mengatasi :

- Kualitas dan intensitas koordinasi ditingkatkan.

- Setiap tahapan kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Faktor Pendorong :

- Komitmen yang tinggi dari pimpinan baik kaban selaku pengguna anggaran, maupun PPTK kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebaik mungkin.
- Kerjasama yang baik antar Pejabat dan pelaksana kegiatan.
- Ketersediaan dana pada bendahara mempermudah PPTK untuk melakukan pencairan belanja.

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2021 dapat mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 25.212.341.170,- dari pagu Rp. 31.448.601.140,-. Dan realisasi fisik dapat mencapai 101.19%.

Keberhasilan ini diperoleh karena kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin yang sudah biasa dianggarkan setiap tahun sehingga bisa ditakar dengan jelas kebutuhannya.

B.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Triwulan I

Tabel 3.8

Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis

Realisasi Capaian Kinerja Bidang Anggaran BPKAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tw I	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK (WTP)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH	164.979.000	28.305.725	37,44
	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	164.979.000	28.305.725	28,79
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tw I	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK (WTP)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH	173.372.888.100	942.903.148	37,44
	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	173.337.132.500	43.387.198	43,39
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	—	890.871.950	—
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	35.755.600	8.644.000	100,00
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tw I	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK (WTP)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH	78.928.000	9.437.149	15,00
	Persentase Perangkat	Koordinasi dan Pelaksanaan	78.928.000	9.437.149	15,00

	Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Aset BPKAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tw I	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK (WTP)	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	200.218.600	33.537.454	17,17
	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik dan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	200.218.600	33.537.454	17,17

Sumber : Laporan Triwulan I TA. 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banjar

B.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Triwulan II

Tabel 3.9
Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis

Realisasi Capaian Kinerja Bidang Anggaran BPKAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tw II	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK (WTP)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH	442.202.100	202.430.025	25,76
	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	442.202.100	202.430.025	25,76

Realisasi Capaian Kinerja Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tw II	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK (WTP)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH	220.862.936.200	74.912.529.969	74,31
	Persentase Penyaluran Belanja Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	216.797.444.000	73.234.272.748	72,93
	Tepat Waktu	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.000.000.000	1.635.338.021	50,00
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	65.492.200	42.919.200	100,00
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tw II	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK (WTP)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH	349.052.800	95.510.449	25,00
	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	349.052.800	95.510.449	25,00
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Aset BPKAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tw II	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK (WTP)	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	489.363.400	157.011.232	42,17
	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik	Pengelolaan Barang Milik Daerah	489.363.400	157.011.232	42,17

	Daerah (LBMD) Secara Baik dan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah				
--	---	--	--	--	--

Sumber : Laporan Triwulan II TA. 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banjar

B.4 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Triwulan III

Tabel 3.10
Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis

Realisasi Capaian Kinerja Bidang Anggaran BPKAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK (WTP)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH	932. 638. 000	489. 731. 525	61, 32
	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	932. 638. 000	489. 731. 525	61, 32
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK (WTP)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH	221. 957. 103. 500	169. 423. 453. 433	100, 00
	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	216. 849. 645. 900	166. 183. 849. 548	100, 00
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5. 000. 000. 000	3. 181. 704. 685	100, 00
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	107. 457. 600	57. 899. 200	100, 00

		Daerah Lingkup Keuangan Daerah			
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK (WTP)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH	496. 452. 600	224. 192. 749	41, 67
	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	496. 452. 600	224. 192. 749	41, 67
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Aset BPKAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK (WTP)	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	581. 032. 500	372. 395. 755	75, 50
	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik dan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	581. 032. 500	372. 395. 755	75, 50

Sumber : Laporan Triwulan III TA. 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banjar

B.5 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Triwulan IV

Tabel 3.11
Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis

Realisasi Capaian Kinerja Bidang Anggaran BPKAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK (WTP)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH	932. 638. 000	371. 962. 700	100%
	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	932. 638. 000	371. 962. 700	100%
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK (WTP)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH	221. 957. 103. 500	221. 606. 128. 096	100%
	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	216. 849. 645. 900	216. 706. 732. 598	100%
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5. 000. 000. 000	4. 813. 007. 998	100%
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	107. 457. 600	86. 387. 500	100%
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK (WTP)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH	496. 452. 600	311. 693. 846	100%
	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	496. 452. 600	311. 693. 846	100%

	Sesuai SAP				
Realisasi Capaian Kinerja Bidang Aset BPKAD Kab. Banjar					
Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK (WTP)	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	581.032.500	548.790.055	100%
	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik dan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	581.032.500	548.790.055	100%

Sumber : Laporan Triwulan IV TA. 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Banjar

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi pencapaian anggaran yang dikelola BPKAD Banjar tahun 2021 yang meliputi realisasi belanja langsung utama dan belanja langsung pendukung adalah Rp. 248.537.497.395,- dari total pagu Rp.255.415.827.740,- sehingga memperoleh nilai serapan sebesar 97,31%.

Realisasi anggaran belanja langsung untuk sasaran Program Pengelolaan Keuangan Daerah, “Persentase tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu” dan “Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Yang Tertib dan Baik” adalah sebesar Rp. 858.544.225,- dari total pagu Rp. 932.638.000,- sehingga memperoleh nilai serapan sebesar 92,06%.

Realisasi anggaran belanja langsung untuk sasaran program “Persentase penyelesaian Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Persetujuan

Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tepat waktu” dan “Persentase Perangkat Daerah dengan Penyaluran Belanja Daerah yang Baik” adalah sebesar Rp. 221.606.128.096,- dari total pagu Rp. 221.957.103.500,- sehingga memperoleh nilai serapan sebesar 99,84%.

Realisasi anggaran belanja langsung untuk sasaran program “Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan” dan “Persentase Perangkat Daerah dengan Laporan Keuangan Kategori Baik” adalah sebesar Rp. 311.693.849,- dari total pagu Rp. 496.452.600,- sehingga memperoleh nilai serapan sebesar 62,78%.

Realisasi anggaran belanja langsung untuk sasaran program “Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan” dan “Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan tertib” adalah sebesar Rp. 548.790.055,- dari total pagu Rp. 581.032.500,- sehingga memperoleh nilai serapan sebesar 94,45%.

Tabel 3.12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021								
SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN		
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai capaian kinerja keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	100,00%	255.415.827.740	248.537.497.395	97,31%
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persen	91,84	91,84	100,00%	255.415.827.740	248.537.497.395	97,31%
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu	Persentase tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu	%	100	111	111,00%	932.638.000	858.544.225	92,06%
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Penggeseran/Perubahan APBD Tepat Waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Penggeseran/Perubahan APBD Tepat Waktu	SKPD	54	54	100%	25.350.000	9.525.000	37,57%
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu	Dok	1	1	100%	344.857.100	333.499.000	96,71%
	Tersusunnya Rancangan Peraturan daerah tentang APBD Tepat Waktu	Dok	1	1	100%			

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN		
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD tepat waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tepat Waktu	Dok	1	1	100%	252. 497. 900	234. 366. 300	92, 82%
	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pergeseran/Perubahan APBD tepat waktu	Dok	2	4	200%			
	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD tepat waktu	Dok	1	1	100%			
Tersusunnya Regulasi dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan (Tersusunnya Standar Harga Satuan dan Standar Harga Lainnya)	Tersusunnya Regulasi dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan (Tersusunnya Standar Harga Satuan dan Standar Harga Lainnya)	Dok	4	4	100%	100. 985. 200	96. 335. 200	95, 40%
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	Bulan	12	12	100%	95. 099. 900	77. 380. 725	81, 37%
Terlaksananya Penerbitan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana, DPA/DPPA untuk 54 SKPD (Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah)	Terlaksananya Penerbitan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana, DPA/DPPA untuk 54 SKPD (Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah)	Dok	3	3	100%	113. 847. 900	107. 438. 000	94, 37%
Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	%	100	100	100, 00 %	221. 957. 103. 500	221. 606. 128. 096	99, 84%
Terlaksananya Pembinaan Pelaporan Pelaporan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Terlaksananya Pembinaan Pelaporan Pelaporan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Daerah (Jumlah SPD yang	Dok	1000	100	100%	81. 057. 800	73. 941. 149	91, 22%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN		
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
Daerah (Jumlah SPD yang diterbitkan)	diterbitkan)							
Jumlah Desa yang tersalurkan dana Desa Tepat Waktu	Jumlah Desa yang tersalurkan dana Desa Tepat Waktu	Desa	277	277	100%	216.543.807.000	216.454.386.200	99,96%
Terlaksananya Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah (Terlaksananya Sistem Informasi Penyaluran/Pengeluaran Kas Daerah dan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Penyaluran Kas Daerah)	Terlaksananya Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah (Terlaksananya Sistem Informasi Penyaluran/Pengeluaran Kas Daerah dan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Penyaluran Kas Daerah)	SKPD	96	96	100%	224.781.100	178.405.249	79,37%
Persentase Penyaluran Dana Darurat dan Mendesak (Belanja Tidak Terduga)	Persentase Penyaluran Dana Darurat dan Mendesak (Belanja Tidak Terduga)	Tahun	1	1	100%	5.000.000.000	4.813.007.998	96,26%
Terlaksananya Penyediaan Dokumen Belanja Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Banjar (Lancarnya Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) PNS Kabupaten Banjar)	Terlaksananya Penyediaan Dokumen Belanja Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Banjar (Lancarnya Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) PNS Kabupaten Banjar)	SKPD	54	54	100%	107.457.600	86.387.500	80,39%
Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	%	100	100	100%	496.452.600	311.693.849	62,78%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN		
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Lap	12	12	100%	91.028.800	18.428.800	20,25%
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Daerah (Unaudit) dan Laporan Keuangan Daerah (Audited)	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Daerah (Unaudit) dan Laporan Keuangan Daerah (Audited)	Lap	2	2	100%	85.584.800	78.373.300	91,57%
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Dok	1	1	100%	149.829.800	112.225.400	74,90%
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Dok	1	1	100%	111.939.200	102.666.349	91,72%
Tersusunnya Dokumen Laporan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Tersusunnya Dokumen Laporan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Dok	1	1	100%	58.070.000	-	-
Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100,00 %	581.032.500	548.790.055	94,45%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN		
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
Terciptanya perangkat daerah yang melakukan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan tertib	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan tertib	%	100	100	100,00 %			
Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik (Tersusunnya Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa)	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik (Tersusunnya Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa)	Dok	1	1	100,00 %	60.050.0000	60.000.000	99,92%
Tersusunnya Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	Dok	2	2	100%	278.393.500	266.201.055	95,62%
	Tersusunnya Dokumen Penetapan Pengurus Barang Milik Daerah	Dok	1	1	100%			
	Tersusunnya Dokumen Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah	Dok	1	1	100%			
	Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dok	1	1	100%			
Tersusunnya Dokumen Laporan Sensus Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Sensus Barang Milik Daerah	Dok	1	1	100,00 %	161.211.900	156.591.900	97,13%
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Milik	Terpenuhinya Aspek Pengamanannya Secara Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Unit/ bidang	15	15	100,00 %	13.060.700	10.560.700	80,86%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN		
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
Daerah								
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	Tersusunnya Dokumen Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dok	30	39	126.67%	29.514.600	22.354.600	75,74%
	Tersusunnya Dokumen Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Dok	4	4	100%			
Terlaksananya SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Per Triwulan	Tersusunnya Dokumen Laporan Rekonsiliasi SKPD Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dok	4	4	100%	38.801.800	33.081.800	85,26%
Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana	%	100	100	100 %	31.448.601.140	25.212.341.170	80,17%
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	%	100	108.33%	108.33%	96.899.600	83.612.400	86,295%
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Penyusunan Renstra dan Renja)	Dok	3	4	133.33%	27.120.200	21.962.100	50,35%

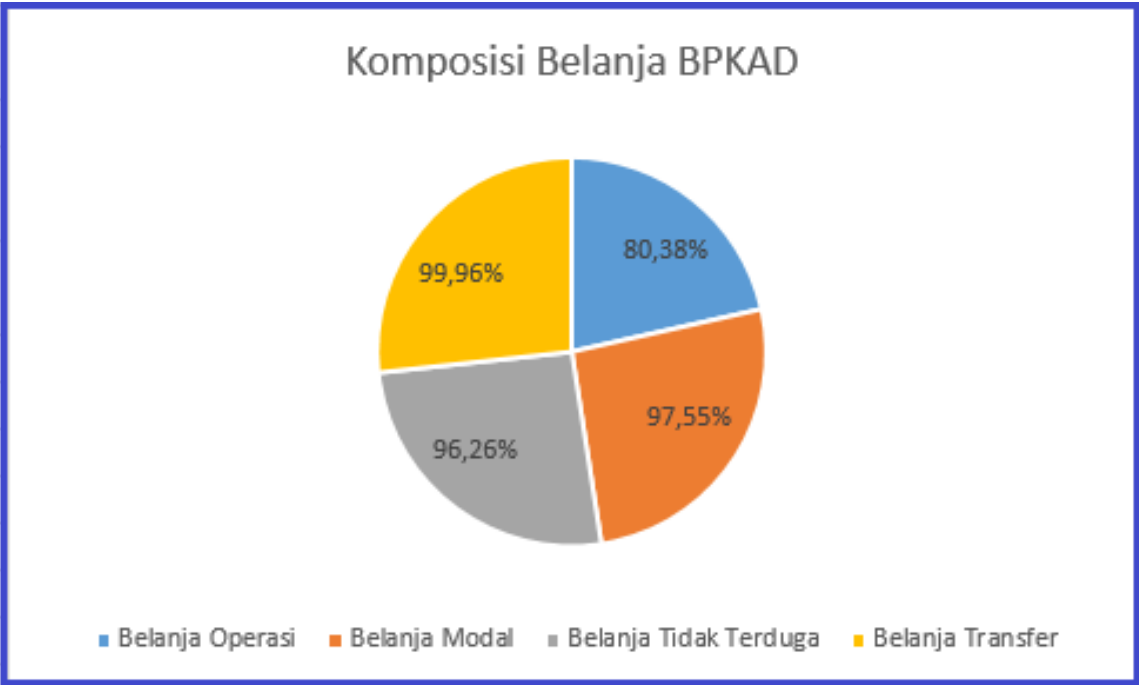
SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN		
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Jumlah Dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD)	Dok	3	4	133.33%	29.740.400	25.358.100	85,26%
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Kinerja SKPD)	Dok	12	12	100%	15.204.800	13.858.000	91,14%
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Jumlah Dokumen LKjIP, LKPJ)	Dok	2	2	100%	24.834.200	22.434.200	90,34%
Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%	29.739.579.744	23.854.504.066	80.21%
Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	1	100%	29.000.262.844	23.341.759.744	80,49%
Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan	Proses Administrasi Keuangan pada BPKAD berjalan dengan lancar	12	Bulan	12	100%	715.661.200	507.185.122	70,87%
Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun yang tersusun	2	Dokumen	2	100%	23.655.700	5.559.200	23,50%
Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%	14.900.000	-	-
Terpenuhinya Kursus Singkat dan Bimtek Implementasi	Jumlah Peserta yang mengikuti kursus singkat dan bimbingan teknis tentang	Peserta	8	-	100,00 %	14.900.000	-	-

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN		
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
Peraturan Perundang-Undangan	peraturan Perundang-undangan							
Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%	325.109.441	311.647.800	95.85%
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	100,00 %	325.109.441	311.647.800	95,86%
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	Buku	1	1	100,00 %	3.150.000	3.000.000	95,24%
Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%	57.013.800	36.179.200	63,46%
Persentase Jumlah bulan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Fasilitas untuk pengadaan perlengkapan kantor di lingkungan BPKAD dapat terpenuhinya sesuai standar kelayakan	Bulan	12	12	100%	57.013.800	36.179.200	63,46%
	kebersihan lingkungan dan kenyamanan kerja pada BPKAD terpenuhi	Bulan	12	12	100%			

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN		
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
	Terlaksananya Penyediaan peralatan kebersihan kantor	Bulan	12	12	100%			
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100%	625.384.570	432.550.755	69.17%
Terpenuhinya bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang sesuai dengan ketentuan	Persentase jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi sesuai dengan ketentuan	Bulan	12	12	100,00 %	247.654.570	212.002.684	85,60%
Persentase jumlah bulan Jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi sesuai ketentuan	Jumlah bulan paket makanan dan minuman rapat dan tamu tersedia	Bulan	12	12	100%	377.730.000	220.548.071	58,39%
	Jumlah bulan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah dapat terlaksana	Bulan	12	12	100%			
Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	100	100%	586.563.985	490.846.949	83.68%
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tahun	1	1	100%	40.990.000	35.978.268	87,77%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN		
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tahun	1	1	100%	288.105.000	235.137.181	81,62%
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Paket	1	1	100%	222.448.985	204.516.500	91,94%
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bulan	12	12	100%	35.020.000	15.215.000	43,45%
BELANJA OPERASI						33.613.904.340,41	27.018.317.197,00	80,38%
BELANJA MODAL						258.116.400,00	251.786.000,00	97,55%
BELANJA TIDAK TERDUGA						5.000.000.000,00	4.813.007.998,00	96,26%
BELANJA TRANSFER						216.543.807.000,00	216.454.386.200,00	99,96%

Sumber : LRFK TA. 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar



Sumber : LRFK TA. 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Berdasarkan data dari tabel di atas, hampir semua indikator kinerja kegiatan berhasil dengan nilai capaian 100%.

Pada pos alokasi Belanja Program Utama BPKAD berjumlah Rp. 218.972.226.600,-. Pada Belanja Program Utama terdapat alokasi Dana Desa berjumlah Rp. 216.543.807.000,-, dan Dana Darurat berjumlah Rp. 5.000.000.000,-. Sedangkan pada pos alokasi Belanja Program Pendukung BPKAD berjumlah Rp. 31.448.601.140,-. Yang didalamnya terdapat anggaran BPJS kesehatan ASN se-Kabupaten Banjar berjumlah Rp. 22.178.694.594,-

D. ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya **mencapai atau lebih dari 100%**. Terlihat bahwa dari sasaran yang diampu BPKAD, “Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah”, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100 dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 97,31% dari total anggaran yang dialokasikan. Semua kegiatan yang ada pada program utama mayoritas capaian kinerjanya mencapai 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber

daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.13

Efisien Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT EFISIENSI (%)
Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai capaian kinerja keuangan	100,00%	255.415.827.740	248.537.497.395	2,7%
Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100,00%	255.415.827.740	248.537.497.395	2,7%
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu	Persentase tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu	111,00%	932.638.000	858.544.225	7,94%
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Penggeseran/Perubahan APBD Tepat Waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Penggeseran/Perubahan APBD Tepat Waktu	100%	25.350.000	9.525.000	62,43%
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu	100%	344.857.100	333.499.000	3,29%
	Tersusunnya Rancangan Peraturan daerah tentang APBD Tepat Waktu	100%			

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT EFISIENSI (%)
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD tepat waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tepat Waktu	100%	252.497.900	234.366.300	7,18%
	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pergeseran/Perubahan APBD tepat waktu	200%			
	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD tepat waktu	100%			
Tersusunnya Regulasi dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan (Tersusunnya Standar Harga Satuan dan Standar Harga Lainnya)	Tersusunnya Regulasi dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan (Tersusunnya Standar Harga Satuan dan Standar Harga Lainnya)	100%	100.985.200	96.335.200	4,60%
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	100%	95.099.900	77.380.725	18,63%
Terlaksananya Penerbitan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana, DPA/DPPA untuk 54 SKPD (Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah)	Terlaksananya Penerbitan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana, DPA/DPPA untuk 54 SKPD (Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah)	100%	113.847.900	107.438.000	5,63%
Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	100,00 %	221.957.103.500	221.606.128.096	0.17%
Terlaksananya Pembinaan Pelaporan Pelaporan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Daerah	Terlaksananya Pembinaan Pelaporan Pelaporan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Daerah (Jumlah SPD yang	100%	81.057.800	73.941.149	8,78%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT EFISIENSI (%)
(Jumlah SPD yang diterbitkan)	diterbitkan)				
Jumlah Desa yang tersalurkan dana Desa Tepat Waktu	Jumlah Desa yang tersalurkan dana Desa Tepat Waktu	100%	216.543.807.000	216.454.386.200	0,04%
Terlaksananya Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah (Terlaksananya Sistem Informasi Penyaluran/Pengeluaran Kas Daerah dan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Penyaluran Kas Daerah)	Terlaksananya Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Daerah (Terlaksananya Sistem Informasi Penyaluran/Pengeluaran Kas Daerah dan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Penyaluran Kas Daerah)	100%	224.781.100	178.405.249	20,63%
Persentase Penyaluran Dana Darurat dan Mendesak (Belanja Tidak Terduga)	Persentase Penyaluran Dana Darurat dan Mendesak (Belanja Tidak Terduga)	100%	5.000.000.000	4.813.007.998	3,74%
Terlaksananya Penyediaan Dokumen Belanja Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Banjar (Lancarnya Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) PNS Kabupaten Banjar)	Terlaksananya Penyediaan Dokumen Belanja Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Banjar (Lancarnya Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) PNS Kabupaten Banjar)	100%	107.457.600	86.387.500	19,61%
Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	100%	496.452.600	311.693.849	37,22%
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100%	91.028.800	18.428.800	79,75

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT EFISIENSI (%)
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Daerah (Unaudit) dan Laporan Keuangan Daerah (Audited)	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Daerah (Unaudit) dan Laporan Keuangan Daerah (Audited)	100%	85.584.800	78.373.300	8,43%
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100%	149.829.800	112.225.400	25,10%
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100%	111.939.200	102.666.349	8,28%
Tersusunnya Dokumen Laporan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Tersusunnya Dokumen Laporan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100%	58.070.000	-	-
Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	100,00 %	581.032.500	548.790.055	5,55%
Terciptanya perangkat daerah yang melakukan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan tertib	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan tertib	100,00 %			

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT EFISIENSI (%)
Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik (Tersusunnya Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa)	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik (Tersusunnya Dokumen Standar Harga Barang dan Jasa)	100,00 %	60.050.0000	60.000.000	0,08%
Tersusunnya Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	100%	278.393.500	266.201.055	4.37%
	Tersusunnya Dokumen Penetapan Pengurus Barang Milik Daerah	100%			
	Tersusunnya Dokumen Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah	100%			
	Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%			
Tersusunnya Dokumen Laporan Sensus Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Sensus Barang Milik Daerah	100,00 %	161.211.900	156.591.900	2,87%
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Milik Daerah	Terpenuhinya Aspek Pengamanannya Secara Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	100,00 %	13.060.700	10.560.700	19,14%
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	Tersusunnya Dokumen Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	126.67%	29.514.600	22.354.600	24,26%
	Tersusunnya Dokumen Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	100%			
Terlaksananya SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Per Triwulan	Tersusunnya Dokumen Laporan Rekonsiliasi SKPD Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%	38.801.800	33.081.800	14,74%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT EFISIENSI (%)
Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terlaksana	100 %	31.448.601.140	25.212.341.170	19,83%
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD yang tersusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan	108.33%	96.899.600	83.612.400	19,83%
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Penyusunan Renstra dan Renja)	133.33%	27.120.200	21.962.100	19.02%
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Jumlah Dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD)	133.33%	29.740.400	25.358.100	14,74%
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Kinerja SKPD)	100%	15.204.800	13.858.000	8,86%
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Jumlah Dokumen LKjIP, LKPJ)	100%	24.834.200	22.434.200	9,66%
Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100%	29.739.579.744	23.854.504.066	19.78%
Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	29.000.262.844	23.341.759.744	19,51%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT EFISIENSI (%)
Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan	Proses Administrasi Keuangan pada BPKAD berjalan dengan lancar	100%	715.661.200	507.185.122	29,13%
Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun yang tersusun	100%	23.655.700	5.559.200	76,50%
Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	100%	14.900.000	-	-
Terpenuhinya Kursus Singkat dan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti kursus singkat dan bimbingan teknis tentang peraturan Perundang-undangan	100,00 %	14.900.000	-	-
Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100%	328.259.441	313.647.800	4.45%
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,00 %	325.109.441	311.647.800	4,14%
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	100,00 %	3.150.000	3.000.000	4,76%
Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100%	57.013.800	36.179.200	36.54%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT EFISIENSI (%)
Persentase Jumlah bulan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Fasilitas untuk pengadaan perlengkapan kantor di lingkungan BPKAD dapat terpenuhinya sesuai standar kelayakan	100%	57.013.800	36.179.200	36,54%
	kebersihan lingkungan dan kenyamanan kerja pada BPKAD terpenuhi	100%			
	Terlaksananya Penyediaan peralatan kebersihan kantor	100%			
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	100%	625.384.570	432.550.755	19.28%
Terpenuhinya bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang sesuai dengan ketentuan	Persentase jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi sesuai dengan ketentuan	100,00 %	247.654.570	212.002.684	14,40%
Persentase jumlah bulan Jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi sesuai ketentuan	Jumlah bulan paket makanan dan minuman rapat dan tamu tersedia	100%	377.730.000	220.548.071	41,61%
	Jumlah bulan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah dapat terlaksana	100%			
Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	586.563.985	490.846.949	16.31%

SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT EFISIENSI (%)
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	100%	40.990.000	35.978.268	12,23%
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	100%	288.105.000	235.137.181	18,38%
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	222.448.985	204.516.500	8,06%
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100%	35.020.000	15.215.000	56,55%

Sumber : LRFK TA. 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

E. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

E.1 EVALUASI KINERJA TAHUN 2021

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja BPKAD Banjar Tahun 2020 memperoleh nilai 81,01 dengan interpretasi predikat baik (A). maka pada tahun 2021 direkomendasikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar hal-hal sebagai berikut :

1. Menjadikan dokumen Renstra sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Renja dan target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan untuk dapat dimanfaatkan dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran;
2. Dalam penyusunan dokumen penganggaran untuk mencantumkan IKU Perangkat Daerah;
3. Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja dapat dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar *reward* dan *punishment*.
4. Memberikan penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan alternatif yang diberikan beserta tindak lanjutnya.

E.2 TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Dokumen Renstra sudah menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan sudah dimanfaatkan dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran;

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
					Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			Indek Reformasi Birokrasi	66,67%						73		75		77		77		Kompusit	Kab. Banjar	
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah		Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	10.563.624.625	WTP	15.755.967.792	WTP	15.966.641.888	WTP	12.361.137.000	WTP	13.042.524.068	WTP	14.620.270.150	WTP	17.264.554.143	18.014.960.515	BPKAD	Kab. Banjar	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	2.637.615.245	100%	3.629.220.500	100%	4.341.859.645	100%	3.461.887.700	100%	3.356.887.700	100%	3.886.170.855	100%	4.639.405.026	5.103.345.525	BPKAD	Kab. Banjar	

RENSTRA BPKAD

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra BPKAD s/d Triwulan II Tahun 2021

Kabupaten Banjar

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun (2021) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun (2021) (%)		PD Penanggung jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran					32.889.630.276	4 skala	1	1									Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	222.001.362	100,00	14.857.400	100 %	162.559.600	25	25	13.141.200	24.900.400	62,50	15,31	24.900.400	62,50	15,31			Faktor Pendukung : Tersedianya Dana Faktor Penghambat : Penggunaan yang tidak dapat di prediksi sehingga melebihi pagu Anggaran Kas Bulanan
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd(penyusunan Renstra dan Renja)	20 Dokumen	222.001.362	100,00	14.857.400	3,00 dok	43.620.200	1,00	0,00	3.932.100	3.932.100	9,01	33,33	3.932.100	33,33	9,01			Faktor Pendukung : Tersedianya Dana Faktor Penghambat : Tidak tersedianya dana akibat kebijakan rasionalisasi
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(Jumlah dokumen RKA/RKAP dan DFA/DPPA SKPD)					64.540.400	3,00 dok	2,00	0,00	1.629.600	1.629.600	2,52	66,67	1.629.600	66,67	2,52			Faktor Pendukung : Tersedianya Dana Faktor Penghambat : Kurangnya petugas kebersihan

RENJA BPKAD 2021

2. Dokumen penganggaran sudah mencantumkan IKU Perangkat Daerah;

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Sesaran	Indikator Sesaran	Satuan	Target	Program	Indikator Program			TARGET CAPAIAN (%)			
					1	2	3	1	2	3	
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opis BPK	WTP	WTP	Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah	Persentase Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Program Pelaksanaan Penanggungjawaban Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Pembayaran Belanja Daerah yang Tepat Waktu	88,76%	92,23%	93%	88,76%	92,23%	93%
				Program Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penghapusan Asset Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Kerja Sama Daerah (LSMD) Secara Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RKA-P

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Banjar
Tahun Anggaran 2021

Bentuk DPA : DPPA 9.1.1.03.0.00.0.00.03.00.001/2021

Uraian Perubahan : 1.0000 PERUBAHAN URAIAN PERANGKAT DAERAH

Salah Urutan : 1.00 KEUANGAN

Program : 1.00.00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sasaran Kegiatan : 1.00.00.00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Indikator : 1.00.00.00.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00.00.00.00.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00.00.00.00.00.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00.00.00.00.00.00.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00.00.00.00.00.00.00.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00 Indikator dari Kegiatan Pelaksanaan Daerah

1.00.00.00

3. Sudah memberikan *reward* kepada ASN dan Bidang yang berkinerja baik (sebagaimana terlampir).

Reward diberikan kepada ASN yang bersangkutan berdasarkan penilaian pada poin-poin berikut :

- Evaluasi kinerja ASN yang bersangkutan, ASN bersangkutan berkinerja dengan sangat baik karena dapat mewujudkan target kinerja pada sasaran kegiatan yang ditetapkan pada dokumen perencanaan dan ditandatangani pada perjanjian kinerja ASN yang bersangkutan.
- Disiplin dan integritas ASN yang bersangkutan di lingkungan BPKAD.
- Koordinasi yang diterapkan ASN tersebut di lingkungan BPKAD.

- Serta inovasi dan pelayanan yang diberikan kepada publik dalam rangka menjalankan tugas sebagai ASN di lingkungan pemerintahan.
4. Sudah diberikan pimpinan penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan alternatif yang diberikan beserta tindak lanjutnya.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan kegiatan di pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun terakhir Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar Tahun 2016–2021 dan tahun pertama dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar Tahun 2021–2026, keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan untuk ditingkatkan, sementara itu untuk target-target yang selama ini belum tercapai secara maksimal perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa target kinerja sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis dikategorikan “**Berhasil**” hal tersebut dapat dilihat hasil Kab. Banjar memperoleh nilai WTP dan dari Total Pagu Belanja Langsung yang tersedia sebesar Rp. 255.415.827.740,- dengan realisasi keuangan s.d 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 248.537.497.395,- atau 97,31%, dengan realisasi fisik sebesar 106,19% yang berarti anggaran dana terserap secara optimal.

Dari Total Pagu Belanja Langsung tersebut diantaranya terdapat Dana Desa sebesar Rp.216.543.807.000,- yang berhasil disalurkan sebesar Rp. 216.454.386.200,- atau 99,96% yang berarti dana telah berhasil tersalurkan secara maksimal kepada seluruh desa di Kabupaten Banjar.

Dari Total Pagu Belanja Langsung tersebut juga terdapat Dana Darurat dan Mendesak sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang berhasil disalurkan sebesar Rp. 4.813.007.998,- atau 96,26% yang berarti dana berhasil tersalurkan secara maksimal kepada perangkat daerah pengampu, yang kemudian disalurkan langsung hingga ke masyarakat.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara utuh dan terukur. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap penetapan indikator kinerja yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan pada Tahun Anggaran 2022.

Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di tahun selanjutnya.

B. SARAN-SARAN

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjar tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Martapura, Januari 2022

Kepala Badan



Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si

NIP. 19660104 198602 1 004

L A M P I R A N



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2 Martapura Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222 Faximile (0511) 4720222

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANJAR**

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR**

**PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BANJAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan arahan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu menetapkan Indikator Utama di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar tentang Indikator Kinerja Utama yang menjadi pedoman untuk penyusunan Progran Kegiatan dan Acuan ukuran kinerja atau akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2018;

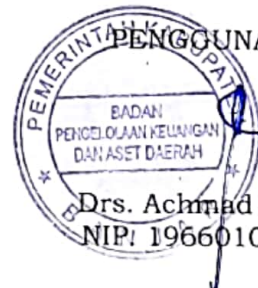
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Bidang di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar untuk Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK), Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan Oleh setiap Bidang dan disampaikan kepada Kepala Badan untuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 05 Januari 2021



Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
NIP: 19660104 198602 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator Program	TARGET CAPAIAN (Tahun ke)					
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP			1	2	3	4	5	6
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	88.76%	92.23%	93%	94%	95%	96%
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Martapura, 05 Januari 2021

Kepala BPKAD,



Drs. ACHMAD ZULYADAINI, M.Si
NIP. 19660104 198602 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



TAHUN ANGGARAN 2021

KODE ORGANISASI : 4.04.02

NAMA SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



TAHUN ANGGARAN 2021

KODE ORGANISASI : 4.04.02

**NAMA SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abdul Khair, SE**

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021,

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
NIP. 19660104 198602 1 004

Pihak Pertama

Sekretaris BPKAD

Abdul Khair, SE
NIP. 19650424 198602 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terpenuhi Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen

No.	Program/Kegiatan	Target		Anggaran		
		sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	Bertambah/berkurang (Rp)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				Rp162.599.600,00	Rp96.899.200,00	(65.700.400)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	Rp43.620.200,00	Rp27.120.200,00	(16.500.000)
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	3 dokumen	3 dokumen	Rp64.540.400,00	Rp29.740.000,00	(34.800.400)
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	12 dokumen	Rp23.204.800,00	Rp15.204.800,00	(8.000.000)
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	Rp31.234.200,00	Rp24.834.200,00	(6.400.000)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp30.604.259.721,00	Rp29.756.179.744,00	(848.079.977)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	Rp29.864.942.821,00	Rp29.016.862.844,00	(848.079.977)
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Rp715.661.200,00	Rp715.661.200,00	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp23.655.700,00	Rp23.655.700,00	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp264.900.000,00	Rp14.900.000,00	(250.000.000)
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 peserta	8 peserta	Rp264.900.000,00	Rp14.900.000,00	(250.000.000)
Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp151.172.000,00	Rp328.259.441,00	177.087.441
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	Rp148.022.000,00	Rp325.109.441,00	177.087.441
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 buku	1 buku	Rp3.150.000,00	Rp3.150.000,00	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp47.840.200,00	Rp57.013.800,00	9.173.600
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	Rp47.840.200,00	Rp57.013.800,00	9.173.600
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp1.216.404.770,00	Rp625.384.570,00	(591.020.200)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	24 rekening	24 rekening	Rp221.496.770,00	Rp247.654.570,00	26.157.800
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	Rp994.908.000,00	Rp377.730.000,00	(617.178.000)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp442.453.985,00	Rp586.563.985,00	144.110.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	1 tahun	1 tahun	Rp40.990.000,00	Rp40.990.000,00	-
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 tahun	1 tahun	Rp234.505.000,00	Rp288.105.000,00	53.600.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	1 paket	Rp143.618.985,00	Rp222.448.985,00	78.830.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	Rp23.340.000,00	Rp35.020.000,00	11.680.000

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
NIP. 19660104 198602 1 004

Pihak Pertama
Sekretaris BPKAD

Abdul Khair, SE
NIP. 19650424 198602 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Zainal Ilmi, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
NIP. 19660104 198602 1 004

Pihak Pertama

Kepala Bidang Akuntansi
BPKAD

Zainal Ilmi, SE
NIP. 19650223 199303 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP	100 Persen

No.	Program/Kegiatan	Target		Anggaran		
		sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	Bertambah/ Berkurang
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Perangkat Daerah				Rp496.452.600,00	Rp496.452.600,00	-
1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulan dan Semesteran	4 Laporan	12 Laporan	Rp91.028.800,00	Rp91.028.800,00	-
2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 laporan	2 laporan	Rp85.584.800,00	Rp85.584.800,00	-
3	Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	Rp149.829.800,00	Rp149.829.800,00	-
4	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp111.939.200,00	Rp111.939.200,00	-
5	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp58.070.000,00	Rp58.070.000,00	-

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah


Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
NIP. 19660104 198602 1 004

Pihak Pertama
Kepala Bidang Akuntansi BPKAD


Zainal Ilmi, SE
NIP. 19650223 199303 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. Fahroel Razy, S.ST, MT**

Jabatan : Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
NIP. 19660104 198602 1 004

Pihak Pertama

Kepala Bidang Aset BPKAD


M. Fahroel Razy, S.ST, MT
NIP. 19750112 199403 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik	100 Persen

No.	Program/Kegiatan	Target		Anggaran		
		sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	Bertambah/berkurang
Pengelolaan Barang Milik Daerah				Rp706.890.600,00	Rp581.032.500,00	(125.858.100,00)
1	Penyusunan Standar Harga	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp60.050.000,00	Rp60.050.000,00	-
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	2 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Rp328.833.600,00	Rp278.393.500,00	(50.440.100,00)
3	Inventaris Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp221.874.000,00	Rp161.211.900,00	(60.662.100,00)
4	Pengamanan Barang Milik Daerah	15 Unit/Bidang	15 Unit/Bidang	Rp13.871.000,00	Rp13.060.700,00	(810.300,00)
5	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30 Dokumen 10 dokumen	30 Dokumen 4 dokumen	Rp55.613.000,00	Rp29.514.600,00	(26.098.400,00)
6	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 dokumen	4 dokumen	Rp26.649.000,00	Rp38.801.800,00	12.152.800,00

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah


Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
NIP. 19660104 198602 1 004

Pihak Pertama
Kepala Bidang Aset BPKAD


M. Fahroel Razy, S.ST, MT
NIP. 19750112 199403 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. Abdullah Fahtar, SE.MM**

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
NIP. 19660104 198602 1 004

Pihak Pertama

Kepala Bidang Perbendaharaan
BPKAD

H. Abdullah Fahtar, SE.MM
NIP. 19690120 199303 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	100 Persen

No.	Program/Kegiatan	Target		Anggaran		Bertambah/Berkurang (Rp)
		sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				Rp216.909.758.200,00	Rp216.833.045.900,00	(76.712.300,00)
1	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1000 dokumen	1000 dokumen	Rp141.829.200,00	Rp81.057.800,00	(60.771.400,00)
2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	277 desa	277 desa	Rp216.543.807.000,00	Rp216.543.807.000,00	-
3	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	96 SKPD	96 SKPD	Rp224.122.000,00	Rp208.181.100,00	(15.940.900,00)
Pengelolaan data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				Rp137.038.900,00	Rp107.457.600,00	(29.581.300,00)
4	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	54 SKPD	54 SKPD	Rp137.038.900,00	Rp107.457.600,00	(29.581.300,00)

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah

Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
NIP. 19660104 198602 1 004

Pihak Pertama
Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD

H. Abdullah Fahtar, SE. MM
NIP. 19690120 199303 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Gusti Sugian Noor, SST**

Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
NIP. 19660104 198602 1 004

Pihak Pertama

Kepala Bidang Anggaran
BPKAD

Gusti Sugian Noor, SST
NIP. 19690414 198903 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Tepat Waktu	100 Persen

No.	Program/Kegiatan	Target		Anggaran		
		sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	Berkurang/Bertambah (Rp)
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Perangkat Daerah				Rp1.159.416.100,00	Rp932.638.000,00	(226.778.100,00)
1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD	3 Dokumen	54 SKPD	Rp45.350.000,00	Rp25.350.000,00	(20.000.000,00)
2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	Rp36.514.000,00	Rp0,00	(36.514.000,00)
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA - SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	Rp36.514.000,00	Rp0,00	(36.514.000,00)
4	Koordinasi, Penyusunan dan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen 1 dokumen	1 Dokumen 1 dokumen	Rp402.607.100,00	Rp344.857.100,00	(57.750.000,00)
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan	1 Dokumen 2 dokumen 1 dokumen	1 Dokumen 2 dokumen 1 dokumen	Rp318.997.900,00	Rp252.497.900,00	(66.500.000,00)
6	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	4 Dokumen	Rp100.985.200,00	Rp100.985.200,00	-
7	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	3 Dokumen	12 Bulan	Rp95.099.900,00	Rp95.099.900,00	-
8	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp123.348.000,00	Rp113.847.900,00	(9.500.100,00)

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah


Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
NIP. 19660104 198602 1 004

Pihak Pertama
Kepala Bidang Anggaran BPKAD


Gusti Sugian Noor, S,ST
NIP. 19690414 198903 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yuliadi Khairil, SE.MM**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi I

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Zainal Ilmi, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Bidang Akuntansi BPKAD

Zainal Ilmi, SE

NIP. 19650223 199303 1 009

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Akuntansi I

Yuliadi Khairil, SE.MM

NIP. 19770701 200604 1 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yuliadi Khairil, SE.MM**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi I

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Zainal Ilmi, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Bidang Akuntansi BPKAD

Zainal Ilmi, SE

NIP. 19650223 199303 1 009

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Akuntansi I

Yuliadi Khairil, SE.MM

NIP. 19770701 200604 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP	100 Persen

No.	Program/Kegiatan	Target		Anggaran		
		sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	Bertambah/B erkurang
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						
1	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	Rp149.829.800,00	Rp149.829.800,00	-

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua
Kepala Bidang Akuntansi BPKAD

Zainal Hmi, SE
NIP. 19650223 199303 1 009

Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Akuntansi I

Yulandi Khairil, SE. MM
NIP. 19770701 200604 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP	100 Persen

No.	Program/Kegiatan	Target		Anggaran		
		sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	Bertambah/B erkurang
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						
1	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	Rp149.829.800,00	Rp149.829.800,00	-

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua
Kepala Bidang Akuntansi BPKAD

Zainal Hmi, SE
NIP. 19650223 199303 1 009

Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Akuntansi I

Yulianti Khairil, SE. MM
NIP. 19770701 200604 1 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. Diana, SE**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Gusti Sugian Noor, SST**

Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Bidang Anggaran BPKAD

Gusti Sugian Noor, SST
NIP. 19690414 198903 1 007

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Analisis
dan Pengendalian Anggaran

Hj. Diana, SE
NIP. 19660513 200003 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	100 Persen

No.	Program/Kegiatan	Target		Anggaran		
		sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	Bertambah/Be rurang (Rp)
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Perangkat Daerah						
1	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 dokumen	4 dokumen	Rp100.985.200,00	Rp100.985.200,00	-

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua
Kepala Bidang Anggaran BPKAD


Gusti Suglan Noor, S,ST
NIP. 19690414 198903 1 007

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian
Analisis, Perencanaan
dan Pengendalian


HJ. Diana, SE
NIP. 19660513 200003 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Bambang Siswanto, S.Ap**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **M. Fahroel Razy, S.ST, MT**

Jabatan : Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Bidang Aset BPKAD


M. Fahroel Razy, S.ST, MT
NIP. 19750112 199403 1 002

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang
Pemanfaatan dan Pengamanan


Bambang Siswanto, S.Ap
NIP. 19680212 199002 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik	100 Persen

No.	Program/Kegiatan	Target		Anggaran		
		sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	Bertambah/berkurang
Pengelolaan Barang Milik Daerah				Rp13.871.000,00	Rp13.060.700,00	(125.858.100,00)
1	Pengamanan Barang Milik Daerah	15 Unit/Barang	15 Unit/Barang	Rp13.871.000,00	Rp13.060.700,00	(125.858.100,00)

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua
Kepala Bidang Aset BPKAD


M. Fahroel Razy, S.ST, MT
NIP. 19750112 199403 1 002

Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan


Bambang Siswanto, S.Ap
NIP. 19680212 199002 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. Ikhwan Fahrie, S.Sos**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Abdul Khair, SE**

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Sekretaris BPKAD

Abdul Khair, SE
NIP. 19650424 198602 1 007

Martapura, 15 September 2021

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

H. Ikhwan Fahrie, S.Sos
NIP. 19700512 199303 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

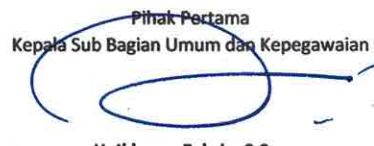
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terpenuhi Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen

No.	Program/Kegiatan	Target		Anggaran		
		sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	Berkurang/Bertambah (Rp)
Administrasi Kepegawaiaan Perngkat Daerah				Rp264.900.000,00	Rp14.900.000,00	(250.000.000,00)
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 peserta	8 peserta	Rp264.900.000,00	Rp14.900.000,00	(250.000.000,00)
Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp151.172.000,00	Rp328.259.441,00	177.087.441,00
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	Rp148.022.000,00	Rp325.109.441,00	177.087.441,00
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 buku	1 buku	Rp3.150.000,00	Rp3.150.000,00	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp47.840.200,00	Rp57.013.800,00	9.173.600,00
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	Rp47.840.200,00	Rp57.013.800,00	9.173.600,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp1.216.404.770,00	Rp625.384.570,00	(591.020.200,00)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	24 rekening	24 rekening	Rp221.496.770,00	Rp247.654.570,00	26.157.800,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	Rp994.908.000,00	Rp377.730.000,00	(617.178.000,00)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp442.453.985,00	Rp586.563.985,00	144.110.000,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	1 tahun	1 tahun	Rp40.990.000,00	Rp40.990.000,00	-
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 tahun	1 tahun	Rp234.505.000,00	Rp288.105.000,00	53.600.000,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	1 paket	Rp143.618.985,00	Rp222.448.985,00	78.830.000,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	Rp23.340.000,00	Rp35.020.000,00	11.680.000,00

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua
 Sekretaris BPKAD

 Abdul Khair, SE
 NIP. 19650424 198602 1 007

Pihak Pertama
 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

 H. Ikhwan Fahrie, S.Sos
 NIP. 19700512 199303 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nuriyami, SE.MM**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Gusti Sugian Noor, SST**

Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Bidang Anggaran BPKAD

Gusti Sugian Noor, SST

NIP. 19690414 198903 1 007

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang
Pengendalian Anggaran

Nuriyami, SE. MM

NIP. 19750606 199503 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	100 Persen

No.	Program/Kegiatan	Target		Anggaran		
		sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	Berkurang/Bertambah
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Perangkat Daerah				Rp213.477.900,00	Rp120.449.900,00	(93.028.000,00)
1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD	3 Dokumen	54 SKPD	Rp45.350.000,00	Rp25.350.000,00	(20.000.000,00)
2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	Rp36.514.000,00	Rp0,00	(36.514.000,00)
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA - SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	Rp36.514.000,00	Rp0,00	(36.514.000,00)
4	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	3 Dokumen	12 Bulan	Rp95.099.900,00	Rp95.099.900,00	-

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua
Kepala Bidang Anggaran BPKAD


Gusti Sugian Noor, S,ST
NIP. 19690414 198903 1 007

Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran


Nuriyanti, SE, MM
NIP. 19750506 199503 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. Siti Ariyontatik Jumrotin**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Penghapusan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **M. Fahroel Razy, S.ST, MT**

Jabatan : Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

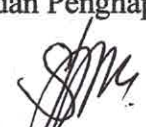
Pihak Kedua

Kepala Bidang Aset BPKAD


M. Fahroel Razy, S.ST, MT
NIP. 19750112 199403 1 002

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Pengendalian
dan Penghapusan


Dra. Siti Ariyontatik Jumrotin
NIP. 19650708 200801 2 012

PERJANJIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik	100 Persen

No.	Program/Kegiatan	Target		Anggaran		
		sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	Bertambah/berkurang
Pengelolaan Barang Milik Daerah				Rp55.613.000,00	Rp29.514.600,00	
1	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30 Dokumen 10 dokumen	30 Dokumen 4 dokumen	Rp55.613.000,00	Rp29.514.600,00	(125.858.100,00)

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua
Kepala Bidang Aset BPKAD



M. Fahroel Razy, S.ST, MT
NIP. 19750112 199403 1 002

Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan



Dra. Siti Anyontatik Jumrotin
NIP. 19650708 200801 2 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Sapwan, S.Ag**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **H. Abdullah Fahtar, SE.MM**

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD

H. Abdullah Fahtar, SE.MM
NIP. 19690120 199303 1 012

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Belanja
Pegawai

Muhammad Sapwan, S.Ag
NIP. 19751215 200701 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	100 Persen

No.	Program/Kegiatan	Target		Anggaran		
		sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	Bertambah/Berkurang
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan				Rp137.038.900,00	Rp107.457.600,00	(15.941.100,00)
1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	54 SKPD	54 SKPD	Rp137.038.900,00	Rp107.457.600,00	(15.941.100,00)

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD

H. Abdullah Fahtar, SE. MM
NIP. 19690120 199303 1 012

Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai

Muhammad Sapwan, S.Ag
NIP. 19751215 200701 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Susilawati, S.St**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi II

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Zainal Ilmi, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP	100 Persen

No.	Program/Kegiatan	Target		Anggaran		
		sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	Bertambah/ Berkurang
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						
1	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	85.584.800,00	85.584.800,00	-
2	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	111.939.200,00	111.939.200,00	-

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua
Kepala Bidang Akuntansi BPKAD


Zainal Nini, SE
NIP. 19650223 199303 1 009

Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Akuntansi II


Susilawati, S.ST
NIP. 19751227 199503 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. Dian Sri Lestari Margayanti, SE.M.Si**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Abdul Khair, SE**

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Sekretaris BPKAD

Abdul Khair, SE

NIP. 19650424 198602 1 007

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Perencanaan

Hj. Dian Sri Lestari Margayanti, SE.M.Si

NIP. 19811021 200904 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terpenuhi Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen

No.	Program/Kegiatan	Target		Anggaran		
		sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	Berkurang/Berta mbah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp162.599.600	Rp96.899.200	(65.700.400,00)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	Rp43.620.200	Rp27.120.200	(16.500.000,00)
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	3 dokumen	3 dokumen	Rp64.540.400	Rp29.740.000	(34.800.400,00)
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	12 dokumen	Rp23.204.800	Rp15.204.800	(8.000.000,00)
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	Rp31.234.200	Rp24.834.200	(6.400.000,00)

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua
Sekretaris BPKAD


Abdul Khair, SE
NIP. 19650424 198602 1 007

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Perencanaan


HJ. Dian Sri Lestari Margayanti, SE, M.Si
NIP. 19811021 200904 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Fitria Sahriza, SE.MM**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **H. Abdullah Fahtar, SE.MM**

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD

H. Abdullah Fahtar, SE.MM
NIP. 19690120 199703 1 012

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Belanja
Langsung

Fitria Sahriza, SE. MM
NIP. 19791214 200901 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	100 Persen

No.	Program/Kegiatan	Target		Anggaran		
		sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	Bertambah/Berkurang
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				Rp224.122.200,00	Rp208.181.100	(15.941.100,00)
1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	96 SKPD	96 SKPD	Rp224.122.200,00	208.181.100,00	(15.941.100,00)

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD

H. Abdullah Fahtar, SE. MM
NIP. 19690120 199303 1 012

Martapura, 15 September 2021

Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Belanja Langsung

Fitria Sahriza, SE. MM
NIP. 19791214 200901 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Shinta Ayu Via, S.Sos**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Abdul Khair, SE**

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua
Sekretaris BPKAD

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Keuangan

Abdul Khair, SE
NIP. 19650424 198602 1 007

Shinta Ayu Via, S.Sos
NIP. 19800903 201001 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Terpenuhi Layanan Administrasi Perkantoran	100 Persen

No.	Program/Kegiatan	Target		Anggaran		
		sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	Bertambah/Berkurang (Rp)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp30.604.259.721,00	Rp29.756.179.744,00	(848.079.977,00)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	Rp29.864.942.821,00	Rp29.016.862.844,00	(848.079.977,00)
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Rp715.661.200,00	Rp715.661.200,00	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp23.655.700,00	Rp23.655.700,00	-

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua
Sekretaris BPKAD


Abdul Khair, SE
NIP. 19650424 198602 1 007

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Keuangan


Shinta Ayu Via, S.Sos
NIP. 19800903 201001 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ridha Maya Rosantie, SE**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi III

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Zainal Ilmi, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Bidang Akuntansi BPKAD

Zainal Ilmi, SE

NIP. 19650223 199303 1 009

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Akuntansi III

Ridha Maya Rosantie, SE.MM

NIP. 19840513 200604 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP	100 Persen

No.	Program/Kegiatan	Target		Anggaran		
		sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	Bertambah/ Berkurang
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Perangkat Daerah						
1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah)	4 laporan	12 laporan	Rp91.028.800,00	Rp91.028.800,00	-
2	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	Rp58.070.000,00	Rp58.070.000,00	-

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua
Kepala Bidang Akuntansi BPKAD



Zainal Ilmi, SE
NIP. 19650223 199303 1 009

Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Akuntansi III



Ridha Maya Rosantie, SE, MM
NIP. 19840513 200604 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nadya Dewi Sonya Paramita, SE,MM**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **M. Fahroel Razy, S.ST, MT**

Jabatan : Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Bidang Aset BPKAD


M. Fahroel Razy, S.ST, MT
NIP. 19750112 199403 1 002

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan


Nadya Dewi Sonya Paramita, SE,MM
NIP. 19790919 201101 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Secara Baik	100 Persen

No.	Program/Kegiatan	Target		Anggaran		
		sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	Bertambah/berkurang
Pengelolaan Barang Milik Daerah				Rp637.406.600,00	Rp538.457.200,00	(125.858.100,00)
1	Penyusunan Standar Harga	1 dokumen	1 dokumen	Rp60.050.000,00	Rp60.050.000,00	(125.858.100,00)
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	2 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	Rp328.833.600,00	Rp278.393.500,00	(125.858.100,00)
3	Inventaris Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen	Rp221.874.000,00	Rp161.211.900,00	(125.858.100,00)
4	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 dokumen	4 dokumen	Rp26.649.000,00	Rp38.801.800,00	(125.858.100,00)

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua
Kepala Bidang Aset BPKAD



M. Fahroel Razy, S.ST, MT
NIP. 19750112 199403 1 002

Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan



Nadya Dewi Sonya Paramita, SE, MM
NIP. 19790919 201101 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Supriyadi, SE**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Gusti Sugian Noor, SST**

Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Bidang Anggaran BPKAD

Gusti Sugian Noor, SST
NIP. 19690414 198903 1 007

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang
Perencanaan Anggaran

Supriyadi, SE
NIP. 19830520 200501 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	100 Persen

No.	Program/Kegiatan	Target		Anggaran		
		sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	Bertambah/Berkurang (Rp)
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Perangkat Daerah				Rp844.953.000,00	Rp711.202.900,00	(133.750.100,00)
1	Koordinasi, Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen 1 dokumen	1 Dokumen 1 dokumen	Rp402.607.100,00	Rp344.857.100,00	(57.750.000,00)
2	Koordinasi, Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan	1 Dokumen 2 dokumen 1 dokumen	1 Dokumen 2 dokumen 1 dokumen	Rp318.997.900,00	Rp252.497.900,00	(66.500.000,00)
3	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp123.348.000,00	Rp113.847.900,00	(9.500.100,00)

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua
Kepala Bidang Anggaran BPKAD



Gusti Sugian Noor, S,ST
NIP. 19690414 198903 1 007

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Perencanaan Anggaran



Supriyadi, SE
NIP. 19830520 200501 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Riswan Pramana, SE**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **H. Abdullah Fahtar, SE.MM**

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 29 September 2021

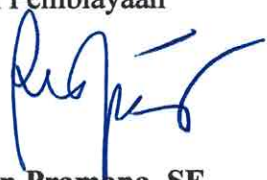
Pihak Kedua

Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD


H. Abdullah Fahtar, SE.MM
NIP. 19690120 199303 1 012

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
dan Pembiayaan


Riswan Pramana, SE
NIP. 19860522 200904 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	100 Persen

No.	Program/Kegiatan	Target		Anggaran		
		sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	Bertambah/Berkurang
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				Rp216.685.636.200,00	Rp216.685.636.200,00	(15.941.100,00)
1	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1000 Dokumen	1000 Dokumen	Rp141.829.200,00	Rp141.829.200,00	(15.941.100,00)
2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinskronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	277 Desa	277 Desa	Rp216.543.807.000,00	Rp216.543.807.000,00	(15.941.100,00)

Martapura, 29 September 2021

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD

H. Abdullah Fahtar, SE. MM
NIP. 19690120 199303 1 012

Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan

Riswan Pramana, SE
NIP. 19860522 200904 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. Rosita Enani, SE**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **H. Abdullah Fahtar, SE.MM**

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD

H. Abdullah Fahtar, SE.MM
NIP. 19690120 199303 1 012

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan

Hj. Rosita Enani, SE
NIP. 19711201 199303 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	100 Persen

No.	Program/Kegiatan	Target		Anggaran		
		sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	Bertambah/Berkurang
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				Rp216.685.636.200,00	Rp216.685.636.200,00	(15.941.100,00)
1	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1000 Dokumen	1000 Dokumen	Rp141.829.200,00	Rp141.829.200,00	(15.941.100,00)
2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinsronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	277 Desa	277 Desa	Rp216.543.807.000,00	Rp216.543.807.000,00	(15.941.100,00)

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD

H. Abdullah Fahtar, SE. MM
NIP. 19690120 199303 1 012

Martapura, 15 September 2021

Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan

Hj. Rosita Enani, SE
NIP. 197111201 199303 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Bahriah, SE**

Jabatan : Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Hj. Rosita Enani, SE**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Sub Bidang Belanja Tidak
Langsung dan Pembiayaan

Hj. Rosita Enani, SE
NIP. 19711201 199303 2 005

Pihak Pertama

Analis Pelaporan dan Transaksi
Keuangan

Bahriah, SE
NIP. 19660406 19930 3 2010

PERJANJIAN KINERJA 2021

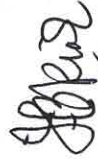
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2	3	4	5
Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa	Mengecek kelengkapan pencairan Dana Desa	Dokumen	400
Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa	Menginfut Aplikasi Online Monitoring (SPAN) dari KPPN untuk Penyaluran Dana Desa	Dokumen	450
Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa	Mengarsipkan kelengkapan berkas permintaan penyaluran Dana Desa	Dokumen	430
Terfasilitasinya Belanja Tidak Tetap di setiap SKPD	Membantu Mengecek Kelengkapan bahan Belanja Tidak Tetap (BTT)	Dokumen	5
Terlaksananya tugas-tugas lain sesuai dengan Tupoksi	Melaksanakan tugas yang diperintahkan atasan	Dokumen	12
Terfasilitasinya Penyaluran Dana Desa	Menginfut Dana Desa	Dokumen	400
Terfasilitasinya Belanja Tidak Tetap di setiap SKPD	Menginfut BTT	Dokumen	400

Pihak Kedua,



HJ. Rosita Enani, SE
NIP. 19711201 199303 2 005

Martapura, 15 September 2021
Pihak Pertama,



Bahriah, SE
NIP. 19660406 199303 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yuana Wirawati, SE, M.AP**

Jabatan : **Penyusun Laporan Keuangan**

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Shinta Ayu Via, S.Sos**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021,

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Keuangan

Pihak Pertama
Penyusun Laporan Keuangan


Shinta Ayu Via, S.Sos
NIP. 19800903 201001 2 003


Yuana Wirawati, SE, M.AP
NIP. 19851008 200903 2 007

PERJANJIAN KINERJA 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Membantu membuat SPP	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	berkas	12
2	Membantu pengambilan SPM yang dibuat PPK untuk disampaikan ke BUD agar diterbitkan SP2D	Terlaksananya pendukung administrasi	berkas	12
3	Membantu membayar dan mencatat setiap transaksi keuangan sesuai dengan belanja kegiatan	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	berkas	12
4	Membantu menghimpun dan menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari nota permintaan dana	Terlaksananya pendukung administrasi	berkas	12
5	Membantu membuat laporan keuangan	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	berkas	16
6	Membantu laporan pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	berkas	12
7	Membuat SKP	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	berkas	1
8	Membantu kelengkapan dan penyusunan SPJ	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	berkas	12
9	Mengerjakan tugas lain sesuai bidang dan tanggung jawab	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	berkas	5

Martapura, 15 September 2021

Pihak Pertama,



Yuana Wirawati, SE. MAP
NIP. 19851008 200903 2 007

Pihak Kedua,



Shinta Ayu Via, S.Sos
NIP. 19800903 201001 2003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Siti Masraodah, SE**

Jabatan : **Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar**

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Muhammad Sapwan, S.Ag**

Jabatan : **Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Banjar**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai

Muhammad Sapwan, S.Ag
NIP. 19751215 200701 1 011

Martapura, 15 September 2021

Pihak Pertama

Analisis Pelaporan dan Transaksi
Keuangan

Siti Masraodah, SE
NIP. 19631113 199312 2 001

PERJANJIAN KINERJA 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2	3	4	5
Tersusunnya dokumen Penerbitan Daftar Gaji, SKPP, SSP, SP2D Belanja Tidak Langsung	Mengumpulkan bahan untuk melakukan perubahan berkala, Pangkat PNS SKPD dan Kecamatan	dokumen	275
	Mengetik Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPD) yang terdiri dari Pensiun, Janda, Duda, Pindah	dokumen	110
	Menyiapkan SP2D Tunjangan Daerah PNS Kabupaten Banjar	dokumen	65
	Mencetak Daftar Gaji setiap Bulannya	daftar	100
	Menyiapkan SP2D Gaji PNS Kabupaten Banjar	dokumen	80
	Mendokumentasikan SP2D Gaji dan Tunjangan lainnya	dokumen	70
	Menyiapkan bahan untuk memindahkan pegawai (mutasi) antar SKPD	dokumen	40
	Mengolah data aplikasi gaji yang Pensiun, Pindah dan meninggal dunia Januari s.d Desember 2021	dokumen	75
	Mengolah Daftar Gaji terusan setiap bulannya	dokumen	100

Martapura, 15 September 2021

Pihak Pertama,



Siti Masraodah, SE

NIP. 19620402 198903 2 007

Pihak Kedua



Muhammad Sapwan, S.Ag

NIP. 19751215 200701 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Gusti Pauzie, SE**

Jabatan : **Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar**

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Fitria Sahriza, SE.MM**

Jabatan : **Kepala Sub Bidang Belanja Langsung Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Sub Bidang Belanja Langsung

Fitria Sahriza, SE. MM
NIP. 19791214 200901 2 001

Pihak Pertama

**Analisis Pelaporan dan Transaksi
Keuangan**

Gusti Pauzie, SE
NIP. 19730501/200701 1 019

PERJANJIAN KINERJA 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2	3	4	5
Tersusunnya dokumen laporan pertanggungjawaban fungsional dan Penerbitan SP2D UP, GU, TU, LS	Menyiapkan cek list bahan pengujian atas kebenaran penagihan UP, GU, TU, LS dalam rangka penerbitan SP2D	dokumen	400
	Membuat penomoran register SP2D UP, GU, TU, LS, register penolakan SP2D, dan tanda terima SP2D	buku	5
	Menyiapkan dan mengetik penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	dokumen	350
	Mengumpulkan bahan pengujian atas laporan pertanggungjawaban uang persediaan (LPJ-UP) bendahara pengeluaran setiap pengajuan GU/TU persediaan	dokumen	200
	Menyiapkan draf Surat Keputusan Bupati Banjar tentang Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar	dokumen	100
	Mengumpulkan laporan pertanggungjawaban fungsional yang disampaikan oleh bendahara SKPD yang diserahkan paling lambat tanggal 10 per bulan	dokumen	150

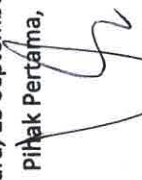
Pihak Kedua,


Fitriah Sahriza, SE.MM

NIP. 19791214 200901 2 001

Martapura, 15 September 2021

Pihak Pertama,


Gusti Pauzie, SE

NIP. 19730501 200701 1 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muzdalifah Supridha, SE**

Jabatan : **Pengurus Barang Pengguna**

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **H. Ikhwan Fahrie, S.Sos**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021,

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

H. Ikhwan Fahrie, S.Sos
NIP. 19700512 199303 1 010

Pihak Pertama
Pengurus Barang Pengguna

Muzdalifah Supridha, SE
NIP. 19810914 201001 2 005

PERJANJIAN KINERJA 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2	3	4	5
Terfasilitasinya penyiapan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah	Terlaksananya penyiapan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah	laporan	2
Terfasilitasinya penyiapan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik SKPD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainny	Terlaksananya penyiapan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik SKPD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah	laporan	1
Terfasilitasinya pencatatan dan inventarisasi barang milik SKPD	Terlaksananya pencatatan dan inventarisasi barang milik SKPD	kegiatan	12
Terfasilitasinya pengamanan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang	kegiatan	4
Terfasilitasinya dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang SKPD	Terlaksananya dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang SKPD	laporan	1
Terfasilitasinya penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan dan surat permintaan barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang	Terlaksananya penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan dan surat permintaan barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang	laporan	2
Terfasilitasinya pengajuan surat permintaan barang (SPB) kepada pejabat penatausahaan barang pengguna	Terlaksananya pengajuan surat permintaan barang (SPB) kepada pejabat penatausahaan barang pengguna	dokumen	4
Terfasilitasinya penyerahan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang	Terlaksananya penyerahan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang	kegiatan	4
Terfasilitasinya pembuatan kartu inventaris ruangan (KIR) semesteran dan tahunan	Terlaksananya pembuatan kartu inventaris ruangan (KIR) semesteran dan tahunan	kegiatan	2
Terfasilitasinya pemberian label pada barang milik daerah dan melakukan stock opname barang milik daerah	Terlaksananya pemberian label pada barang milik daerah dan melakukan stock opname barang milik daerah	kegiatan	4
Terfasilitasinya pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai pertanggungjawaban	Terlaksananya pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja sebagai pertanggungjawaban	laporan	1

Martapura, 15 September 2021

Pihak Pertama,



Muzdalifah Supridha, SE

NIP. 19810914 201001 2 005

Pihak Kedua,



H. Ikhwani Fahrie, S.Sos

NIP. 19700512 199303 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aidia Hajjah, SE**

Jabatan : **Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar**

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Hj. Rosita Enani, SE**

Jabatan : **Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

**Kepala Sub Bidang Belanja Tidak
Langsung dan Pembiayaan**

Hj. Rosita Enani, SE
NIP. 19711201 199303 2 005

Pihak Pertama

**Analisis Pelaporan dan Transaksi
Keuangan**

Aidia Hajjah, SE
NIP. 19840905 200604 2 009

PERJANJIAN KINERJA 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2	3	4	5
Terfasilitasinya Pencairan Dana Dana	Mengecek Kelengkapan Pencairan Dana Desa	Dokumen	831
Terfasilitasinya Pencairan Dana Dana	Menginfut Aplikasi Online Monitoring (SPAN) dari KPPN untuk Penyaluran Dana Desa	Dokumen	831
Terfasilitasinya Pencairan Dana Dana	Mengarsipkan Kelengkapan Pencairan Dana Desa	Dokumen	831
Terfasilitasinya Belanja Tidak Tetap	Membantu Mengecek Kelengkapan bahan Belanja Tidak Tetap (BTT)	Dokumen	10
Terlaksananya tugas tugas lain sesuai dengan Tugas pokok dan pungsi masing masing	Melaksanakan tugas yang diperintahkan atasan	Paket	12

Pihak Kedua,



HJ. Rosita Enani, SE
NIP. 19711201 199303 2 005

Martapura,15 September 2021

Pihak Pertama,



Aidia Hajjah, SE
NIP. 19840905 200602 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Noor Kamelia, SE**

Jabatan : **Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar**

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Fitria Sahriza, SE.MM**

Jabatan : **Kepala Sub Bidang Belanja Langsung Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Sub Bidang Belanja Langsung

Fitria Sahriza, SE. MM
NIP. 19791214 200901 2 001

Pihak Pertama

Analisis Pelaporan dan Transaksi
Keuangan

Noor Kamelia, SE
NIP. 19790509 200312 2 007

PERJANJIAN KINERJA 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2	3	4	5
Tersusunnya dokumen laporan pertanggungjawaban fungsional dan Penerbitan SP2D UP, GU, TU, LS	Menyiapkan cek list bahan pengujian atas kebenaran penagihan UP, GU, TU, LS dalam rangka penerbitan SP2D	dokumen	400
	Membuat penomoran register SP2D UP, GU, TU, LS, register penolakan SP2D, dan tanda terima SP2D	buku	5
	Menyiapkan dan mengetik penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	dokumen	350
	Mengumpulkan bahan pengujian atas laporan pertanggungjawaban uang persediaan (LPJ-UP) bendahara pengeluaran setiap pengajuan GU/TU persediaan	dokumen	200
	Pendataan dan Penerimaan dana transfer ke daerah dan melakukan rekonsiliasi data antar bendahara penerimaan SKPD	dokumen	500
	Mengumpulkan laporan pertanggungjawaban fungsional yang disampaikan oleh bendahara SKPD yang diserahkan paling lambat tanggal 10 per bulan	dokumen	150

Pihak Kedua,



Fitria Sahriza, SE.MM

NIP. 19791214 200901 2 001

Martapura, 15 September 2021

Pihak Pertama,



Noor Kamelia, SE

NIP. 19790509 200312 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Intari Gianti, S.Hut.,M.Hut**

Jabatan : **Penyusun Rencana Pengendalian Pelaksanaan Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar**

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Nuriyami, SE.MM**

Jabatan : **Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran

Nuriyami, SE.,MM
NIP. 19750606 199503 2 004

Pihak Pertama

Penyusun Rencana
Pengendalian Pelaksanaan
Anggaran

Intari Gianti S.Hut., M.Hut
NIP. 19791016 201001 2 005

PERJANJIAN KINERJA 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	terfasilitasinya RKA,DPA,DPPA di setiap SKPD	Mengolah Data dan Mengentry Page Anggaran dan Anggaran Kas Belanja Tidak langsung SKPD pada APBD murni dan APBD Perubahan	Dokumen	112
2	terfasilitasinya pengendalian anggaran sesuai dengan aturan	Mendokumentasikan Kegiatan Pengendalian Anggaran Sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Dokumen	2
3	terfasilitasinya SPD di setiap SKPD	Mengetik dan mendokumentasikan Surat Penyediaan Dana (SPD) Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung untuk SKPD Kab. Banjar	Dokumen	1275
4	terfasilitasinya SPD tambahan di setiap SKPD	Mengetik dan Mendokumentasikan Penambahan Surat Penyediaan Dana (SPD-Tambahan) dengan Menyusutkan Anggaran yang terdapat dalam DPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD sesuai sistem akuntansi keuangan daerah, norma, standar, prosedur, kriteria serta ketentuan yang berlaku yang telah diarahkan oleh Kasubbid Pengendalian Anggaran	Dokumen	21
5	terfasilitasinya pergeseran anggaran pada setiap SKPD	Mengetik dan mendokumentasikan Persetujuan Pergeseran Anggaran dan Surat Keputusan yang berkaitan dengan Pengendalian Anggaran	Dokumen	43
6	Terlaksananya Kompilasi data Pengendalian Anggaran	Melakukan Kompilasi Data Pengendalian Anggaran SKPD	Dokumen	58
7	terfasilitasinya Sosialisasi aturan penyusunan anggaran pada setiap SKPD	Menyampaikan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan APBD, Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA-SKPD, pedoman Penyusunan DPA-SKPD dan Anggaran Kas kepada semua SKPD	Kali	6
8	Terlaksananya penganggaran sumber dana pada setiap SKPD	Mengentry pembagian sumber dana pada SKPD Kab. Banjar menurut sumber dana masing-masing Pendapatan, Belanja Tidak langsung maupun Belanja Langsung	Dokumen	112

Pihak Kedua,

 Nuriyanti SE.MM
 NIP. 19750606 199503 2 004

Martapura, 15 September 2021
 Pihak Pertama,

 Intari Gianti, S.Hut.M.Hut
 NIP. 19791016 201001 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Raudhatul Jannah**

Jabatan : Pengadministrasian Kepegawaian Subbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **H. Ikhwan Fahrie, S.Sos**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

H. Ikhwan Fahrie, S.Sos
NIP. 19700512 199303 1 010

Pihak Pertama

Pengadministrasian
Kepegawaian

Raudhatul Jannah
NIP. 19670410 199303 2 013

PERJANJIAN KINERJA 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2	3	4	5
Terfasilitasinya kegiatan Pencatatan buku urusan kepegawaian	Melakukan kegiatan pencatatan buku urusan Kepegawaian yang meliputi Usul : Pengangkatan, Pemberhentian Pensiun, Mutasi PNS, Promosi PNS, Kenaikan Gaji Berkala, Cuti Pembuatan Karis/Karsu,Karpeg,DUK/Nominatif,Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, SLKS,Kesejahteraan	dokumen	12
Terfasilitasinya Kegiatan Ketatausahaan surat menyurat, Pengetikan,Penggandaan dan Kearsipan Kepegawaian	Melakukan kegiatan ketatausahaan yang meliputi, surat menyurat, Pengetikan,Penggandaan dan Kearsipan Kepegawaian	Kegiatan	2
Terfasilitasinya Kegiatan Usul Kenaikan Pangkat kepegawaian	Melakukan Kegiatan Usul Kenaikan Pangkat Aload Dokumen dan Melengkapi Berkas di Loker Simpeg Tahun 2021	dokumen	2
Terfasilitasinya Pembuatan Surat SPP, SPMJ,SPMT	Membuat dan Mengetik Surat SPP, SPMJ,SPMT	dokumen	1
Terlaksananya Agenda Kegiatan di setiap Kegiatan	Memberi Penomoran pada SK Kegiatan Ruang Lingkup BPKAD	dokumen	1
Terlaksananya pengagandaan Order Barang/Berita acara Pemeriksaan Barang inventaris dan pemberian nomor Berita acara serah terima (BAST) BMD	Memberi Penomoran pada Order Barang/Berita acara Pemeriksaan Barang inventaris dan pemberian nomor Berita acara serah terima (BAST) BMD	Kegiatan	1
Terlaksananya rekapitulasi SKP kepegawaian di SKPD	Membuat Laporan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) dan merekapitulasi Capaian dan Penilaiannya	dokumen	1
terfasilitasinya teknis pembuatan SKP online di setiap ASN	Melakukan Scan dan Aload SKP, Capaian dan Penilaiannya	dokumen	1

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. Ikhwani-Fabrie, S.Sos

Raudhatul Jannah

NIP. 19700512 199303 1 010

NIP. 19670410 199303 2 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Murni Susanti, SE,M.Ec.Dev.**

Jabatan : Kustodian Kekayaan Negara Subbid Pemanfaatan dan Pengamanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Bambang Siswanto, S.AP**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

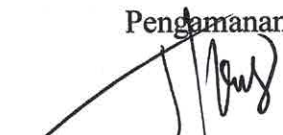
Pihak Kedua

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan
Pengamanan


Bambang Siswanto, S.AP
NIP. 19680212 199002 1 001

Pihak Pertama

Kustodian Kekayaan Negara
Subbid Pemanfaatan dan
Pengamanan


Murni Susanti, SE,M.Ec.Dev
NIP. 19850104 200501 2 005

PERJANJIAN KINERJA 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2	3	4	5
Terfasilitasinya dokumen pencatatan KIB A tanah di SKPD	Melakukan pencocokan dokumen tanah yang ditemukan dengan pencatatannya pada KIB A Tanah	data	300
Terfasilitasinya data Pemanfaatan Barang daerah	Tersajinya data pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Banjar	Dokumen	25
Terlaksananya perhimpunan dokumen tanah milik daerah	Terhimpunnya dokumen tanah milik Pemerintah Kabupaten Banjar	Lokasi	10
Terfasilitasinya data tanah dan bangunan yang akan diusulkan penilaian BMD ke Lembaga Penilai Aset	Terfasilitasinya data tanah dan bangunan yang akan diusulkan penilaian BMD ke Lembaga Penilaian Aset (KPPL atau KJPP)	Lokasi	10
Terlaksananya arsip dokumen tanah milik daerah	Mengarsipkan dokumen kepemilikan tanah milik Pemkab Banjar	Dokumen	25
Terfasilitasinya data dokumen untuk penilaian	Membantu menyiapkan data dan dokumen BMD yang akan diusulkan penilaian	Berkas	10
Terfasilitasinya Penilaian BMD	Membuat daftar hasil penilaian BMD	Dokumen	1
Terfasilitasinya penatausahaan pengamanan dan pemanfaatan BMD	Membantu mengetik dan mengarsipkan surat-surat yang berhubungan dengan pengamanan dan pemanfaatan BMD	Dokumen	20
terfasilitasinya Perhitungan legalitas tanah	Update daftar rekapitulasi tanah milik Pemkab Banjar yang sudah dan belum bersertifikat	Dokumen	3
Terfasilitasinya data BMD yang dimanfaatkan	Update rekapitulasi daftar BMD yang statusnya sedang dalam pemanfaatan BMD	Dokumen	2
Terfasilitasinya daftar jaga Kerjasama Pemanfaatan BMD	Membuat daftar jaga Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan BMD	Dokumen	2
Terfasilitasinya Kegiatan Inventarisasi BM	Membantu melaksanakan kegiatan inventarisasi/sensus BMD	kegiatan	1

Pihak Kedua,


Bambang Siswanto, S.AP
 NIP. 19680212 199002 1 001

Martapura, 15 September 2021

Pihak Pertama,



Murni Susanti, SE, M.Ec.Dev
 NIP. 19850104 200501 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Husain, S.E**

Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Shinta Ayu Via, S.Sos**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021,

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Keuangan

Pihak Pertama
Bendahara Pengeluaran


Shinta Ayu Via, S.Sos
NIP. 19800903 201001 2 003


Husain, SE
NIP. 19840605 200501 1 001

PERJANJIAN KINERJA 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Membantu membuat SPP	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	berkas	12
2	Membantu pengambilan SPM yang dibuat PPK untuk disampaikan ke BUD agar diterbitkan SP2D	Terlaksananya pendukung administrasi	berkas	12
3	Membantu membayar dan mencatat setiap transaksi keuangan sesuai dengan belanja kegiatan	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	berkas	12
4	Membantu menghimpun dan menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari nota permintaan dana	Terlaksananya pendukung administrasi	berkas	12
5	Membantu membuat laporan keuangan	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	berkas	16
6	Membantu laporan pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	berkas	12
7	Membuat SKP	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	berkas	1
8	Membantu kelengkapan dan penyusunan SPJ	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	berkas	12
9	Mengerjakan tugas lain sesuai bidang dan tanggung jawab	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	berkas	5

Martapura, 15 September 2021

Pihak Pertama,



Husain, SE

NIP. 19840605 200501 1 001

Pihak Kedua,



Shinta Ayu Via, S.Sos

NIP. 19800903 201001 2003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nor Aini, SE**

Jabatan : **Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar**

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Fitria Sahriza, SE.MM**

Jabatan : **Kepala Sub Bidang Belanja Langsung Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Sub Bidang Belanja Langsung

Fitria Sahriza, SE. MM
NIP. 19791214 200901 2 001

Pihak Pertama

Analisis Pelaporan dan Transaksi
Keuangan

Nor Aini, SE
NIP. 19800205 200501 1 014

PERJANJIAN KINERJA 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2	3	4	5
Tersusunnya dokumen laporan pertanggungjawaban fungsional dan Penerbitan SP2D UP, GU, TU, LS	Menyiapkan cek list bahan pengujian atas kebenaran penagihan UP, GU, TU, LS dalam rangka penerbitan SP2D	dokumen	400
	Membuat penomoran register SP2D UP, GU, TU, LS, register penolakan SP2D, dan tanda terima SP2D	buku	5
	Menyiapkan dan mengetik penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	dokumen	350
	Mengumpulkan bahan pengujian atas laporan pertanggungjawaban uang persediaan (LPJ-UP) bendahara pengeluaran setiap pengajuan GU/TU persediaan	dokumen	200
	Menyiapkan draf Surat Keputusan Bupati Banjar tentang Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar	dokumen	100
	Mengumpulkan laporan pertanggungjawaban fungsional yang disampaikan oleh bendahara SKPD yang diserahkan paling lambat tanggal 10 per bulan	dokumen	150

Martapura, 15 September 2021

Pihak Pertama,



Nor Aini, SE

NIP. 19800205 200501 1 014

Pihak Kedua,



Fitria Sahriza, SE.MM

NIP. 19791214 200901 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Hasbi, SE**

Jabatan : Bendahara
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Shinta Ayu Via, S.Sos**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

Shinta Ayu Via, S.Sos
NIP. 19800903 201001 2 003

Pihak Pertama

Bendahara

Muhammad Hasbi, S.E
NIP. 19770705 200701 1 028

PERJANJIAN KINERJA 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Membantu membuat SPP, GU, TU dan LS	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	berkas	12
2	Mengantar/mengambil SPM yang dibuat PPK untuk disampaikan ke BUD agar diterbitkan SP2D dan menyampaikan ke Bank Kalsel untuk pemindahbukuhan	Terlaksananya pendukung administrasi	berkas	12
3	Membayar dan mencatat setiap transaksi keuangan sesuai dengan belanja kegiatan untuk tertib administrasi keuangan	Terlaksananya pendukung administrasi	berkas	12
4	Menghimpun dan menyiapkan kwitansi dan bukti pendukung lainnya dari nota permintaan dana yang diajukan oleh masing-masing bidang	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	berkas	12
5	Membantu membuat laporan keuangan	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	berkas	16
6	Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggungjawaban	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	berkas	12
7	Membuat SKP	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	berkas	1
8	Menghimpun dan menyiapkan Surat Setoran Pajak	Terlaksananya penyediaan administrasi keuangan	berkas	10

Pihak Kedua,



Shinta Ayu Via, S.Sos
NIP. 19800903 201001 2003

Martapura, 15 september 2021

Pihak Pertama,



Muhammad Hasbi, SE
NIP. 19770705 200701 1 028



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Alfian Noor, A.Md**

Jabatan : Pengolah Data Subbid Perencanaan Anggaran Bidang Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Supriyadi, SE**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Bidang Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran

Supriyadi, SE

NIP. 19830520 200501 1 008

Pihak Pertama

Pengolah Data Subbid Perencanaan
Anggaran

Muhammad Alfian Noor, A.Md

NIP. 19840807 200901 1 007

PERJANJIAN KINERJA 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terfasilitasinya penyusunan alokasi anggaran setiap SKPD	Mengolah Data Hasil Koordinasi Penyusunan Alokasi Anggaran SKPD dalam Penyusunan KUA/PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan	Dokumen	2
2	Terfasilitasinya draft Perda dan Perbup APBD kabupaten	Menyiapkan Penyusunan Rancangan Perda dan Perbup APBD dan Perubahan APBD	Dokumen	6
3	terfasilitasinya Penyusunan APBD Kabupaten	Mengetik Laporan Kegiatan Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	laporan	2
4	Terfasilitasinya semua usulan pengeseran anggaran pada setiap SKPD	Mengetik Usulan Pergeseran APBD sampai dengan Penetapan Perbup Pergeseran APBD	Usulan	34
5	Terfasilitasinya sosialisasi tentang pengelolaan anggaran pada setiap SKPD	Menyiapkan Bahan Pembinaan Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah	SKPD	34
6	terlaksananya hasil Kajian Ulang Verifikasi APBD	Mengetik Hasil Kajian Ulang Verifikasi Anggaran Belanja Daerah	Edaran	4
7	Terfasilitasinya sosialisasi tentang pengelolaan anggaran pada setiap SKPD	Mengetik Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD	Edaran	4
8	terfasilitasinya penyusunan RBA/RKA pada setiap SKPD	Menyiapkan Bahan Penyusunan dan Pembahasan RBA/RKA SKPD	Dokumen	42
9	terfasilitasinya penyusunan Perda, perbup tentang APBD	Mengetik Kompilasi Bahan Penyusunan Jawaban Eksekutif Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD	Dokumen	2
10	terfasilitasinya Rancangan Perda APBD dan APBDP	Mengolah Data Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD	Dokumen	2
11	terfasilitasinya Penetapan rancangan Perda APBD dan APBDP	Mengolah Data Penyediaan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD	Dokumen	2
12	terfasilitasinya Pengesahan DPA/DPPA pada setiap SKPD	Mengetik Penyediaan Bahan Persetujuan dan Pengesahan DPA/DPPA	Dokumen	84
13	terfasilitasinya pembinaan penyusunan Anggaran pada setiap SKPD dan BLUD	Menyiapkan Bahan Pembinaan Penyusunan Anggaran SKPD dan BLUD	SKPD	42
14	terlaksananya penyusunan APBD pendapatan PPKD	Mengetik Hasil Koordinasi Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah dan Pendapatan PPKD	Dokumen	4
15	terfasilitasinya Pembinaan -pembinaan tentang anggaran keuangan pada setiap SKPD	Menyiapkan Bahan Pembinaan SKPD dibawah Koordinasi Atasan Langsung	SKPD	15

NIP. 19830520 200501 1 008

Pihak Kedua,
Spolyadi, SE

Martapura, 15 September 2021
Pihak Pertama,
Muhammad Alhan Noor, A.Md
NIP. 19840807 200901 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dhenok Catur Utami, S.Ak**

Jabatan : Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Subbid Perencanaan dan Penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Nadya Dewi Sonya Paramita, SE, MM**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan
Penatausahaan

Nadya Dewi Sonya Paramita, SE, MM
NIP. 19790919 201101 2 006

Pihak Pertama

Penyusun Kebutuhan Barang
Inventaris Subbid Perencanaan
dan Penatausahaan

Dhenok Catur Utami, S.Ak
NIP. 19871021 201101 2 006

PERJANJIAN KINERJA 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2	3	4	5
Terfasilitasinya penatausahaan RKBD dan RKBMD dikabupaten Banjar	Mengumpulkan dan merekap laporan RKBMD dan RKPBMMD SKPD	SKPD	54
Terfasilitasinya Rekonsiliasi BMD di setiap SKPD	Menyiapkan bahan rekonsiliasi BMD SKPD	SKPD	54
Terfasilitasinya kesesuaian data aset antara bidang aset dan akuntansi	Merekonsiliasi data aset SKPD dengan data akuntansi	Laporan	2
Terfasilitasinya penatausahaan laporan inventaris di setiap SKPD	Mengumpulkan dan merekap laporan inventaris SKPD	SKPD	27
terlaksananya pengumpulan data status penggunaan BMD	Mengumpulkan dan merekap usul penetapan status penggunaan BMD	Kegiatan	2
Terfasilitasinya naskah dinas yang berkaitan dengan BMD	Membantu mengetik surat menyurat yang berhubungan dengan penatausahaan BMD	SKPD	54
Terfasilitasinya sensus BMD	Membantu melakukan inventarisasi/sensus BMD	Laporan	12
Terfasilitasinya tugas-tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tupoksinya	Terlaksananya tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya	Kali	1

Pihak Kedua,



Nadya Dewi Sonya Paramita, SE. MM
NIP. 19790919 201101 2 006

Martapura, 15 September 2021

Pihak Pertama,



Dhenok Catur Utami, S.Ak
NIP. 19871021 201101 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Norisa Amelia, S.AK**

Jabatan : **Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar**

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Hj. Rosita Enani, SE**

Jabatan : **Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

**Kepala Sub Bidang Belanja Tidak
Langsung dan Pembiayaan**

Hj. Rosita Enani, SE
NIP. 19711201 199303 2 005

Pihak Pertama

**Analisis Pelaporan dan Transaksi
Keuangan**

Norisa Amelia, S.AK
NIP. 19840211 201001 2 023

PERJANJIAN KINERJA 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2	3	4	5
Terfasilitasinya penyaluran Dana Desa	Menyiapkan dan Pengetikan SPP dan SPM untuk pencairan Alokasi Dana Desa	dokumen	544
Terfasilitasinya Surat Persediaan Dana di setiap SKPD	Menginfut SPD	dokumen	300
Terfasilitasinya Penyaluran BTT	Menginfut BTT	dokumen	400
Terfasilitasinya penyaluran Dana Desa	Menginfut Dana Desa	dokumen	450
Terfasilitasinya penyaluran Dana Desa	Menginfut Aplikasi Online Monitoring (SPAN) dari KPPN untuk Penyaluran Dana Desa	Kegiatan	400
Terfasilitasinya Penyaluran BTT	Membantu Mengecek Kelengkapan bahan Belanja Tidak Tetap (BTT)	dokumen	200
Terfasilitasinya penyaluran Dana Desa	Mengarsipkan kelengkapan berkas permintaan penyaluran Dana Desa	dokumen	600
Terlaksananya Tugas-tugas lain sesuai dengan Tupoksi	Melaksanakan tugas yang diperintahkan atasan	Paket	20

Pihak Kedua,



HJ. Rosita Enani, SE
NIP. 19711201 199303 2 005

Martapura, 15 September 2021
Pihak Pertama,



Norisa Amelia, S.Ak
NIP. 19840211 201001 2 023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nina Apriyani, S.Kom**

Jabatan : **Pranata Komputer Ahli Pertama**

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si**

Jabatan : **Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala BPKAD

Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
NIP. 19660104 198602 1 004

Martapura, 15 September 2021,

Pihak Pertama
Pranata Komputer Ahli Pertama

Nina Apriyani, S.Kom
NIP. 19880429 201903 2 009

PERJANJIAN KINERJA 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2	3	4	5
Terfasilitasinya administrasi perencanaan realisasi kegiatan fisik/keuangan serta pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya administrasi perencanaan realisasi kegiatan fisik/keuangan serta pengadaan barang dan jasa	dokumen	12
Terfasilitasinya pengumpulan data rencana program/kegiatan BPKAD	Terlaksananya pengumpulan data rencana program/kegiatan BPKAD	dokumen	5
Terfasilitasinya pendistribusian formulir sesuai jadwal untuk kelancaran pengumpulan data	Terlaksananya pendistribusian formulir sesuai jadwal untuk kelancaran pengumpulan data	dokumen	5
Terfasilitasinya entry data untuk program/kegiatan	Terlaksananya entry data untuk program/kegiatan	dokumen	2
Terfasilitasinya pengumpulan data/bahan pembuatan dokumen	Terlaksananya pengumpulan data/bahan pembuatan dokumen	dokumen	5
Terfasilitasinya peremajaan data dan informasi	Terlaksananya peremajaan data dan informasi	dokumen	4
Terfasilitasinya pengarsipan dokumen perencanaan	Terlaksananya pengarsipan dokumen perencanaan	dokumen	10
Terfasilitasinya tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya	Terlaksananya tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya	kali	10

Pihak Kedua,



Drs. Achmad Zulvadinani, M.Si
NIP. 19660104 198602 1 004

Martapura, 15 September 2021

Pihak Pertama,



Nina Apriyani, S.Kom
NIP. 19880429 201903 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. Padeli, S.AP**

Jabatan : Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Nadya Dewi Sonya Paramita, SE,MM**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan
Penatausahaan

Nadya Dewi Sonya Paramita, SE, MM
NIP. 19790919 201101 2 006

Pihak Pertama

Penyusun Kebutuhan Barang
Inventaris

M. Padeli, S.AP
NIP. 19760404 200801 1 026

PERJANJIAN KINERJA 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2	3	4	5
Terfasilitasinya penatausahaan Inventarisasi di setiap SKPD	Mengumpulkan dan merekap laporan inventaris SKPD	Laporan	54
Terfasilitasinya rekonsiliasi data aset SKPD dengan neraca akuntansi	Merekonsiliasi data aset SKPD dengan data akuntansi	kegiatan	4
Terfasilitasinya pengolahan data laporan inventaris semesteran Kabupaten	Mengolah dan Menyimpan data dokumen Barang Milik Daerah	dokumen	54
Terfasilitasinya penatausahaan penetapan status Penggunaan BMD tahunan Kabupaten	Mengumpulkan dan merekap usul penetapan status penggunaan BMD	Laporan	54
Terfasilitasinya inventarisasi BMD di kabupaten	Membantu melakukan inventarisasi/sensus BMD	kegiatan	1
Terfasilitasi rekonsiliasi BMD di setiap SKPD di kabupaten	Menyiapkan bahan rekonsiliasi BMD SKPD	kegiatan	4
terfasilitasinya Naskah dinas yang berhubungan dengan Penatausahaan BMD	Membantu mengetik surat menyurat yang berhubungan dengan penatausahaan BMD	dokumen	25
terfasilitasinya rencana penghapusan BMD di kabupaten	Mengolah Daftar Usul Penghapusan Barang Milik Daerah	dokumen	25
terlaksananya laporan Inventarisasi tahunan	Mengolah Data Laporan Inventaris Tahunan Kabupaten	dokumen	1
terlaksananya Laporan Inventarisasi secara periodik	Mengolah Data Laporan inventaris semesteran kabupaten	dokumen	1
terfasilitasinya Penatausahaan RKBMD dan RKPBM di setiap SKPD	Mengumpulkan dan merekap laporan RKBMD dan RKPBM SKPD	dokumen	27

Pihak Kedua,



Nadya Dewi Sonya Paramita, SE. MM
NIP. 19790919 201101 2 006

Martapura, 15 September 2021
Pihak Pertama,



M. Padell, S.AP
NIP. 19760404 200801 1 026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. Khairil, S.Kom**

Jabatan : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Hj. Dian Sri Lestari Margayanti, SE.M.Si**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Sub Bagian Perencanaan

Hj. Dian Sri Lestari Margayanti, SE.M.Si
NIP. 19811021 200904 2 002

Martapura, 15 September 2021,

Pihak Pertama

Penyusun Program Anggaran
dan Pelaporan

M. Khairil, S.Kom
NIP. 19810818 200701 1 009

PERJANJIAN KINERJA 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2	3	4	5
Terfasilitasinya administrasi perencanaan realisasi kegiatan fisik/keuangan serta pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya administrasi perencanaan realisasi kegiatan fisik/keuangan serta pengadaan barang dan jasa	dokumen	12
Terfasilitasinya pengumpulan data rencana program/kegiatan BPKAD	Terlaksananya pengumpulan data rencana program/kegiatan BPKAD	dokumen	5
Terfasilitasinya pendistribusian formulir sesuai jadwal untuk kelancaran pengumpulan data	Terlaksananya pendistribusian formulir sesuai jadwal untuk kelancaran pengumpulan data	dokumen	5
Terfasilitasinya entry data untuk program/kegiatan	Terlaksananya entry data untuk program/kegiatan	dokumen	2
Terfasilitasinya pengumpulan data/bahan pembuatan dokumen	Terlaksananya pengumpulan data/bahan pembuatan dokumen	dokumen	5
Terfasilitasinya peremajaan data dan informasi	Terlaksananya peremajaan data dan informasi	dokumen	4
Terfasilitasinya pengarsipan dokumen perencanaan	Terlaksananya pengarsipan dokumen perencanaan	dokumen	10
Terfasilitasinya tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya	Terlaksananya tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya	kali	10

Pihak Kedua,

Hi. Dian Sri Lestari Margawanti, SE,M.Si
NIP. 19811021 200904 2 002

Martapura, 15 September 2021

Pihak Pertama,

M. Khairil, S.Kom
NIP. 19810818 200701 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rina Andriana, A.Md**

Jabatan : Pranata Komputer Terampil

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Banjar


Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
NIP. 19660104 198602 1 004

Pihak Pertama

Pranata Komputer Terampil


Rina Andriana, A.Md
NIP. 19870405 201903 2 008

PERJANJIAN KINERJA 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2	3	4	5
Terlaksananya Duplikasi Database	Melaksanakan Duplikasi Database (0.155)	file	12
Terlaksananya penyimpanan dokumen didalam komputer	Membuat Dokumen File yang tersimpan dalam media Komputer (0.048)	dokumen	350
termonitornya Pemeliharaan Perangkat lunak Komputer	Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem operasi komputer (0.125)	Laporan	4
Terfasilitasinya Laporan Hasil Perekaman Data	Membuat Laporan Hasil Perekaman Data (0.477)	Laporan	6
Terlaksananya Laporan Operasi Komputer pada setiap bulan	Membuat Laporan Operasi Komputer (Bulanan) (0.013)	Laporan	12
Terlaksananya Pembuatan Laporan Operasi Komputer harian	Membuat Laporan Operasi Komputer (Harian) (0.013)	Laporan	264
Terlaksananya perekaman data dengna efesien	melakukan perekaman data dengan validasi (0.004)	file	250
Terlaksananya Laporan Perekaman Data	Membuat Laporan Hasil Perekaman Data (0.053)	laporan	12
Terfasilitasinya data penggunaan dan program	Melakukan penggunaan data dan atau program (0.013)	dokumen	264
Terlaksananya Pengarsipan secara digital	Membuat Dokumentasi File Yang Tersimpan dalam Komputer (0.048)	dokumen	350

Martapura, 15 September 2021

Pihak Pertama,



Rina Andriana, A.Md

NIP. 19870405 201903 2 008

Pihak Kedua,



Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si

NIP. 19660104 198602 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A.M. Dian Riswandi**

Jabatan : Pengolah Data Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Fitria Sahriza, SE.MM**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Sub Bidang Belanja Langsung

Fitria Sahriza, SE. MM
NIP. 19791214 200901 2 001

Pihak Pertama

Pengolah Data Belanja Langsung

A.M. Dian Riswandi
NIP. 19830517 201212 1 003

PERJANJIAN KINERJA 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2	3	4	5
Tersusunnya dokumen laporan pertanggungjawaban fungsional dan Penerbitan SP2D UP, GU, TU, LS	Menyiapkan cek list bahan pengujian atas kebenaran penagihan UP, GU, TU, LS dalam rangka penerbitan SP2D	dokumen	400
	Membuat penomoran register SP2D UP, GU, TU, LS, register penolakan SP2D, dan tanda terima SP2D	buku	5
	Menyiapkan dan mengetik penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	dokumen	350
	Mengumpulkan bahan pengujian atas laporan pertanggungjawaban uang persediaan (LPJ-UP) bendahara pengeluaran setiap pengajuan GU/TU persediaan	dokumen	200
	Mengumpulkan laporan pertanggungjawaban fungsional yang disampaikan oleh bendahara SKPD yang diserahkan paling lambat tanggal 10 per bulan	dokumen	150

Pihak kedua,



Fitria Sahriza/SE.MM

NIP. 19791214 200901 2 001

Martapura, 15 September 2021

Pihak Pertama,



A.M. Dian Riswandi

NIP. 19830517 201212 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Eko Wira Nuryadin, SE**

Jabatan : **Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar**

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Muhammad Sapwan, S.Ag**

Jabatan : **Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Banjar**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 15 September 2021

Pihak Kedua

Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai


Muhammad Sapwan, S.Ag
NIP. 19751215 200701 1 011

Pihak Pertama

Analisis Pelaporan dan Transaksi
Keuangan


Eko Wira Nuryadin, SE
NIP. 19830219 200501 1 005

PERJANJIAN KINERJA 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Target
	2	3	4	5
	Tersusunnya dokumen Penerbitan Daftar Gaji, SKPP, SSBP, SSP, SP2D Belanja Tidak Langsung	Mengumpulkan bahan untuk perubahan berkala, pangkat	dokumen	150
		Merekapitulasi realisasi setoran IWP 8%, 2%, Taperum, Pph Pasal 21	dokumen	25
		Menyiapkan SP2D Tunjangan Daerah	dokumen	60
		Merekapitulasi realisasi belanja pegawai	dokumen	150
		Menyiapkan SP2D Gaji PNS Kabupaten Banjar	dokumen	150
		Melakukan Back Up file gaji	dokumen	12
		Menyiapkan bahan untuk mutasi pegawai antar Kabupaten/Kota, provinsi dan antar SKPD	dokumen	15
		Merekapitulasi realisasi BPJS PNSD dan Pimpinan, Anggota DPRD	dokumen	24
		Mengolah Daftar Gaji Terusan	daftar	100
		Mendokumentasikan SP2D Gaji dan Tunjangan Daerah	dokumen	100
		Mengolah Data penyetoran BPJS 3% PNSD dan Pimpinan serta Anggota DPRD	dokumen	12
		Mengolah data penyetoran IWP 8%, 2%, Taperum dan Pph pasal 21	dokumen	12
		Merekapitulasi realisasi JKK-JKM PNS Kabupaten Banjar	dokumen	12
		Merekapitulasi realisasi JKK-JKM Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Banjar	dokumen	12
		Melakukan pengiriman data PNSD ke DJPK melalui Aplikasi Sinergi	daftar	12

Martapura, 15 September 2021

Pihak Pertama,



Eko Wira Nuryadin, SE

NIP. 19830219 200501 1 005

Pihak Kedua



Muhammad Sapwan, S.Ag

NIP. 19751215 200701 1 011

REWARD KEPADA ASN TERBAIK BPKAD

KABUPATEN BANJAR

TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2 Martapura Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222 Faximile (0511) 4720222

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANJAR**

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021 perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

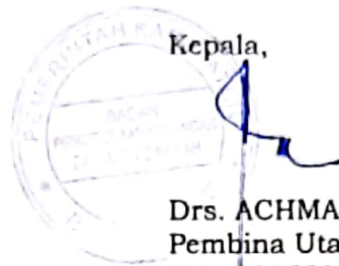
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU :** Menunjuk Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021, yang namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) bertugas menilai dan mengevaluasi kinerja, disiplin, integritas, koordinasi dan inovasi serta pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021, dan hasil penilaian dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Martapura
pada tanggal : 5 Januari 2021

Kepala,


Drs. ACHMAD ZULYADAINI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660104 198602 1 004

LAMPIRAN : Keputusan Kepala BPKAD Kab. Banjar
Nomor : 13 Tahun 2021
Tanggal : 5 Januari 2021

**TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Kegiatan
1.	<u>Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si</u> 19660513 200003 2 003	Ketua	Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar
2.	<u>Abdul Khair, SE</u> 19650424 198602 1 007	Sekretaris	
3.	<u>Zainal Ilmi, SE</u> 19650223 199393 1 009	Anggota	
4.	<u>H. Abdullah Fahtar, SE. MM</u> 19690120 199303 1 012	Anggota	
5.	<u>M. Fahroel Razy, S.ST, MT</u> 19750112 199403 1 002	Anggota	
6.	<u>Gusti Sugian Noor, S.ST</u> 19690414 198903 1 007	Anggota	



Kepala,
Drs. ACHMAD ZULYADAINI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660104 198602 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2 Martapura Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222 Fax/mile (0511) 4720222

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANJAR**

NOMOR 200 TAHUN 2021

TENTANG

ASN TERBAIK

**DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2021**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya menata birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa atau yang disebut Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan usaha pembinaan, bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi terhadap upaya reformasi birokrasi dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa untuk penilaian dan pengevaluasian pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi perlu dibentuk suatu tim yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang terkait dengan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Banjar Tahun 2020 dalam bentuk Keputusan Bupati Banjar.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

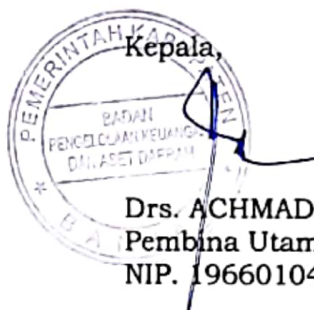
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG ASN TERBAIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2021

- KESATU : Menetapkan ASN Terbaik pada lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : ASN Terbaik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan berdasarkan kepada poin-poin berikut:
- a. Rencana kerja Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (unit) dan rencana aksi tahunan yang selaras dengan Road Map Kabupaten Banjar 2020-2024 serta Rencana Strategis pemerintah daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja ASN yang bersangkutan di unit kerja;
 - c. Disiplin dan Integritas ASN yang bersangkutan di unit kerja;
 - d. Koordinasi dan Kepemimpinan yang diterapkan ASN tersebut di lingkungan unit kerja; dan
 - e. Serta Inovasi dan Pelayanan yang diberikan kepada publik dalam rangka menjalankan tugas sebagai ASN dilingkungan Pemerintahan.
- KETIGA : Biaya yang ditimbulkan akibat dilaksanakannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura
pada tanggal : 27 Desember 2021

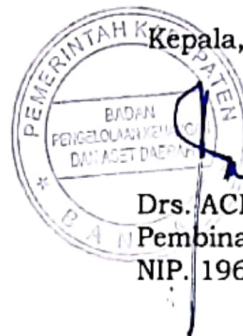


Kepala,
Drs. ACHMAD ZULYADAINI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660104 198602 1 004

LAMPIRAN : Keputusan Kepala BPKAD Kab. Banjar
Nomor : 200 Tahun 2021
Tanggal : 27 Desember 2021

**DAFTAR ASN TERBAIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2021**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Kegiatan
1.	<u>RINA ANDRIANA, A.Md</u> 198704052019032008	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	ASN TERBAIK I
2.	<u>NOR AINI, SE</u> 19800205 200501 1 014	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	ASN TERBAIK II
3.	<u>MURNI SUSANTI, SE, M.Ec.Dev</u> 19850104 200501 2 005	KUSTODIAN KEKAYAAN NEGARA	ASN TERBAIK III



Kepala, 27 Desember 2021

Drs. ACHMAD ZULYADAINI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660104 198602 1 004





PIAGAM PENGHARGAAN

PENGHARGAAN INI DIBERIKAN KEPADA :

Rina Andriana, A.Md

atas pelayanan, kerja keras dan dukungan penuh yang luar biasa sebagai
"ASN TERBAIK I BPKAD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021"

Diberikan pada 30 Desember 2021 , di Kantor
BPKAD Kabupaten Banjar

KEPALA BPKAD KAB. BANJAR,



DRS. ACHMAD ZULYADAINI, M.SI
NIP. 19660104 198602 1 004

PIAGAM PENGHARGAAN

PENGHARGAAN INI DIBERIKAN KEPADA :

Nor Aini, SE

atas pelayanan, kerja keras dan dukungan penuh yang luar biasa sebagai
"ASN TERBAIK II BPKAD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021"

Diberikan pada 30 Desember 2021 , di Kantor
BPKAD Kabupaten Banjar

KEPALA BPKAD KAB. BANJAR,



DRS. ACHMAD ZULYADAINI, M.SI
NIP. 19660104 198602 1 004

PIAGAM PENGHARGAAN

PENGHARGAAN INI DIBERIKAN KEPADA :

Murni Susanti, SE, M.Ec. Dev

atas pelayanan, kerja keras dan dukungan penuh yang luar biasa sebagai
"ASN TERBAIK III BPKAD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021"

Diberikan pada 30 Desember 2021 , di Kantor
BPKAD Kabupaten Banjar

KEPALA BPKAD KAB. BANJAR,



DRS. ACHMAD ZULYADAINI, M.SI
NIP. 19660104 198602 1 004



RKT 2021

Baca selanjutnya... ➔

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN PERIODE 2016-2021

Baca selanjutnya... ➔

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERIODE 2016-2021

Baca selanjutnya... ➔

LKjIP BPKAD 2020

Baca selanjutnya... ➔

Perubahan Rencana Strategis BPKAD

Baca selanjutnya... ➔

← 1 2 3 ... 7

INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Informasi Keuangan Daerah

BANUA BERGERAK



POPULAR POST

- 1 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA
- 2 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR
- 3 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Pangeran Hidayatullah No.2 Telp (0511) 4720222 Faks (0511) 4720222 Kode Pos 70611 Kalsel
MARTAPURA

Martapura, Februari 2021

Kepada
Yth. DPRD Banjar
di-
Martapura.

SURAT PENGANTAR

Nomor : 900/ -04/BPKAD/2020

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2021	10 berkas	Disampaikan dengan hormat, sebagai bahan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
2.	Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021	10 berkas	

Kepala BPKAD,


Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660104 198602 1 004





BERITA ACARA

NOMOR : 900/1198-04/BPKAD

NOMOR : 02/BA/DPRD/2021

PERSETUJUAN BERSAMA

KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari **Rabu** tanggal **Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. H.SAIDI MANSYUR, S.I.Kom | Bupati Banjar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Martapura, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. H. MUHAMMAD ROFIQI, SH. | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar |
| 3. H. AGUS MAULANA | Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar |
| 4. AKHMAD RIZANIE ANSHARI, ST. | Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar |
| 5. H.AKHMAD ZACKY HAFIZIE,SH., MH. | Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar |
| | Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA |

Menyatakan bahwa:

- 1 **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan Penyesuaian dan perubahan sebagaimana yang tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
- 2 **PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Perubahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.



BERITA ACARA

NOMOR : 903/1201-04/BPKAD/2020

NOMOR : 04 /PB/DPRD/2020

PERSETUJUAN BERSAMA

KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari **Senin** tanggal **Tiga Puluh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. H. KHALILURRAHMAN

Bupati Banjar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Martapura, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. H. MUHAMMAD ROFIQI, SH.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banjar

3. H. AGUS MAULANA

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banjar

4. AKHMAD RIZANIE ANSHARI, ST.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banjar

5. H.AKHMAD ZACKY HAFIZIE,SH., MH.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banjar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan Penyesuaian dan perubahan sebagaimana yang tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. **PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
REGISTER SP2D

Periode : 01-Januari-2021 s/d 31-Desember-2021

No	TANGGAL	NO. SP2D	JENIS SPM	URAIAN	NILAI SP2D
1	04/01/2021	000001/SP2D-GJ/DAU/K DH-WKDH/21	Langsung (LS)	Pembayaran Gaji dan Sebagainya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah u/b. Januari 2021, untuk 2 Pegawai / 6 Jiwa. Menurut Daftar Terlampir.	11.900.937,00
2		000002/SP2D-GJ/DAU/S ETDA/21	Langsung (LS)	Pembayaran Gaji PNS dan Sebagainya ub. Januari 2021, untuk 118 Orang Pegawai / 336 Jiwa. Menurut Daftar Terlampir.	540.121.291,00
3		000004/SP2D-GJ/DAU/B PKAD/21	Langsung (LS)	PEMBAYARAN GAJI DAN SEBAGAINYA UB. JANUARI 2021, UNTUK 43 PEGAWAI / 122 JIWA. MENURUT DAFTAR TERLAMPIR	199.378.902,00
4		000006/SP2D-GJ/DAU/IP /21	Langsung (LS)	Pembayaran Gaji dan sebagainya ub. Januari, untuk 46 orang pegawai/125 jiwa menurut daftar terlampir	238.625.356,00
5		000007/SP2D-GJ/DAU/B KDPSPM/21	Langsung (LS)	PEMBAYARAN GAJI DAN SEBAGAINYA UB. JANUARI 2021, UNTUK 38 PEGAWAI / 107 JIWA. MENURUT DAFTAR TERLAMPIR	160.966.601,00
6		000008/SP2D-GJ/DAU/K ESBANGPOL/21	Langsung (LS)	Pembayaran gaji dan sebagainya ub. Januari 2021 untuk 22 Pegawai / 63 Jiwa menurut daftar terlampir	113.707.964,00
7		000009/SP2D-GJ/DAU/P OLPP/21	Langsung (LS)	Pembayaran gaji dan sebagainya Ub. Januari 2021, untuk 65 pegawai/ 190 jiwa. menurut data terlampir	266.537.245,00
8		00001/SP2D-LS/PAD/SE K.DPRD/21	Langsung (LS)	Pembayaran Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD ub. Januari 2021	2.033.691.713,00
9		000010/SP2D-GJ/DAU/T PH/21	Langsung (LS)	Pembayaran Gaji dan Sebagainya u.b. Januari 2021, untuk 155 Pegawai / 427 Jiwa. Menurut daftar terlampir.	789.869.947,00
10		000011/SP2D-GJ/DAU/K ETAPANG/21	Langsung (LS)	Pembayaran Gaji dan sebagainya u/b Januari 2021 untuk 13 Pegawai/33 Jiwa. Menurut daftar terlampir	70.833.066,00
11		000013/SP2D-GJ/DAU/D ISPERINDAG/21	Langsung (LS)	Permintaan Pembayaran Gaji dan Sebagainya u/b Januari 2021, untuk 36 Pegawai / 98 Jiwa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	167.964.730,00
12		000014/SP2D-GJ/DAU/D ISNAKERTRAN/21	Langsung (LS)	Pembayaran Gaji dan sebagainya ub. Januari 2021 untuk 27 Pegawai dan 59 Jiwa menurut Data Terlampir	125.208.933,00
13		000015/SP2D-GJ/DAU/D INKES/21	Langsung (LS)	Pembayaran Gaji dan sebagainya Ub. Januari 2021, untuk 888 Pegawai/2207 Jiwa. Menurut daftar terlampir	3.780.108.672,00
14		000016/SP2D-GJ/DAU/R SRZ/21	Langsung (LS)	Pembayaran Gaji dan sebagainya untuk bulan Januari 2021, untuk 474 pegawai/1.191 jiwa. Menurut Data Terlampir	2.127.658.316,00
15		000017/SP2D-GJ/DAU/D PMPTSP/21	Langsung (LS)	Pembayaran Gaji dan Sebagainya untuk Bulan Januari 2021 untuk 26 Pegawai / 65 Jiwa (Menurut daftar terlampir)	132.868.224,00
16		000018/SP2D-GJ/DAU/D INSOS/21	Langsung (LS)	Pembayaran gaji dan sebagainya Bulan Januari tahun 2021 untuk 26 Pegawai / 74 Jiwa Menurut daftar terlampir	134.020.594,00
17		000019/SP2D-GJ/DAU/D PUPR/21	Langsung (LS)	Pembayaran Gaji dan Sebagainya untuk Bulan Januari 2021 untuk 56 Pegawai / 164 Jiwa menurut daftar terlampir	253.166.601,00
18		000020/SP2D-GJ/DAU/D ISPERKIM/21	Langsung (LS)	Pembayaran Gaji dan Sebagainnya Ub. Januari 2021 Untuk 22 Peg/46 Jiwa .Menurut Daftar Terlampir.	98.921.639,00
19		000021/SP2D-GJ/DAU/D PMD/21	Langsung (LS)	Pembayaran Gaji dan sebagainya untuk bulan Januari 2021, untuk 29 Pegawai/73 Jiwa. Menurut Daftar Terlampir	141.757.140,00
20		000022/SP2D-GJ/DAU/D ISHUB/21	Langsung (LS)	Pembayaran Gaji dan Sebagainya Ub. JANUARI 2021, Untuk 37 Pegawai/110 Jiwa, Menurut Daftar Terlampir.	168.405.031,00
21		000023/SP2D-GJ/DAU/D LH/21	Langsung (LS)	Pembayaran gaji dan sebagainya ub. Januari 2021 untuk 82 pegawai / 224 jiw, menurut daftar terlampir	317.136.432,00
22		000024/SP2D-GJ/DAU/C APIL/21	Langsung (LS)	Pembayaran Gaji dan Sebagainya ub. Januari 2021, untuk 20 Pegawai / 61 Jiwa. Menurut Daftar Terlampir	100.419.428,00
23		000025/SP2D-GJ/DAU/D P2KBP3A/21	Langsung (LS)	PEMBAYARAN GAJI DAN SEBAGAINYA UB. JANUARI 2021, UNTUK 28 PEGAWAI, 68 JIWA. SEBAGAIMANA DAFTAR TERLAMPIR	142.424.717,00
24		000026/SP2D-GJ/DAU/D ISBUTPAR/21	Langsung (LS)	Permintaan Pembayaran Gaji dan Sebagainya u/b Januari 2021, untuk 23 Pegawai/63 Jiwa menurut daftar terlampir	110.502.674,00
25		000027/SP2D-GJ/DAU/D ISPERSTP/21	Langsung (LS)	Pembayaran Gaji dan sebagainya untuk bulan Januari 2021 untuk 23 pegawai 56 jiwa	105.089.924,00
26		000028/SP2D-GJ/DAU/D INKOP/21	Langsung (LS)	Pembayaran Gaji dan sebagainya u/b JANUARI 2021, untuk 22 Pegawai/ 49 Jiwa menurut Daftar Terlampir.-	114.891.945,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Periode : 01-Januari-2021 s/d 31-Desember-2021

STATUS : DRAFT, FINAL, BATAL

Urusan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang : 4.04 Keuangan
Unit Organisasi : 4.04.01 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.04.01.01 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

NO	TANGGAL	NO. SPP	JENIS SPP	URAIAN	NILAI SPP
1	1/15/2021	003/SPP/TU-BTT/BPK AD/2021	Tambah Uang Persediaan (TU)	DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DIKABUPATEN BANJAR KEPADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KAB. BANJAR TAHUN ANGGARAN 2021	951.736.400,00
2	3/25/2021	014/SPP/TU-BTT/BPK AD/2021	Tambah Uang Persediaan (TU)	Pembayaran Dana Belanja Tidak Terduga atas Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Banjar kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Banjar Tahun Anggaran 2021	197.700.000,00
3	5/10/2021	028/SPP/TU-BTT/BPK AD/2021	Tambah Uang Persediaan (TU)	DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DIKABUPATEN BANJAR KEPADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KAB. BANJAR TAHUN ANGGARAN 2021	550.896.071,00
4		029/SPP/TU-BTT/BPK AD/2021	Tambah Uang Persediaan (TU)	Pembayaran Dana Belanja Tidak Terduga atas Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Banjar kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Banjar Tahun Anggaran 2021	974.665.000,00
5	5/11/2021	031/SPP/TU-BTT/BPK AD/2021	Tambah Uang Persediaan (TU)	Pembayaran Dana Belanja Tidak Terduga atas Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Banjar kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Banjar Tahun Anggaran 2021	270.900.000,00
6	6/25/2021	034A/SPP/TU-BTT/BPK KAD/2021	Tambah Uang Persediaan (TU)	Pembayaran Dana Belanja Tidak Terduga atas Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Banjar kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Banjar Tahun Anggaran 2021	120.450.000,00
7		035A/SPP/TU-BTT/BPK KAD/2021	Tambah Uang Persediaan (TU)	Pembayaran Dana Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2021	150.254.500,00
8	7/2/2021	036/SPP/TU-BTT/BPK AD/2021	Tambah Uang Persediaan (TU)	Pembayaran Dana Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Bantuan kepada masyarakat musibah puting beliung dan kebakaran	60.500.000,00
9		037/SPP/TU-BTT/BPK AD/2021	Tambah Uang Persediaan (TU)	Pembayaran Dana Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Bantuan pemulasaran jenazah mr. x dan bantuan kesehatan masyarakat miskin dan terlantar	45.297.164,00
10	7/29/2021	042/SPP/TU-BTT/BPK AD/2021	Tambah Uang Persediaan (TU)	Pembayaran Dana Belanja Tidak Terduga atas Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) masa PPKM level 3 Kab Banjar Tahun Anggaran 2021	125.000.000,00
11	8/25/2021	049/SPP/TU-BTT/BPK AD/2021	Tambah Uang Persediaan (TU)	Pembayaran Dana Belanja Tidak Terduga atas Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) dalam rangka pencegahan dan penanganan covid-19 Kab Banjar Tahun Anggaran 2021	311.000.000,00
12	9/8/2021	053/SPP/TU-BTT/BPK AD/2021	Tambah Uang Persediaan (TU)	Pembayaran Dana Belanja Tidak Terduga Bantuan Sosial yang tidak direncanakan (Bantuan untuk penderita jantung bocor, kebakaran dan puting beliung) di Kab Banjar	30.500.000,00
13	10/26/2021	058/SPP/TU-BTT/BPK AD/2021	Tambah Uang Persediaan (TU)	Pembayaran Dana Belanja Tidak Terduga atas Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19) dalam rangka pencegahan dan penanganan covid-19 Kab Banjar Tahun Anggaran 2021	644.816.000,00
14	11/4/2021	060/SPP/TU-BTT/BPK AD/2021	Tambah Uang Persediaan (TU)	Pembayaran Dana Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00

REGISTAR BUKU
SP2D TUNJANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

J A N U A R I

J A N U A R I 21 =

001. DPRD

001/SP20-LS/PAD/ 121
04 JAN 21.

02. 2.033.651.715

17602416001

002. KEC. PENGARON

002/SP20-LS/PAD/PER/ 21
18 JAN 21

02. 53.280.000. 4.247.277 48.034.723 03.

003. DINAS SOSAL

003/SP20-LS/PAD/DASWIR/ 21
18 JAN 21.

03. 101.690.200. 10.93.513. 90.737.687 03.

0004. DPUP

0004/SP20-LS/PAD/DPUP/ 21
18 JAN 21.

04. 114.647.000. 10.177.338 104.459.682 04.

0005. BPKAD

0005/SP20-LS/PAD/BPKAD/ 21
18 JAN 21

05. 157.878.000. 12.370.504. 145.507.499 05.

0006. DISNARERA

0006/SP20-LS/PAD/DISNARERA/ 21
18 JAN 21.

06. 99.504.700. 8.124.693 91.399.502 05.

0007. SATPOL PP.

0007/SP20-LS/PAD/POL PP/ 21
18 JAN 21.

08. 175.633.800. 11.623.091 164.010.108 07.

0008. TPH.

0008/SP20-LS/PAD/TPH/ 21.
18 JAN 21.

02. 491.624.800. 43.523.495. 448.062.305 02.

0009. PPMPTSP / SATU PUNTU.

0009/SP20-LS/PAD/PPMPTSP/ 21
18 JAN 21

04. 113.226.200. 11.116.688. 101.109.512 09.

0010. DISPERKIM.

0010/SP20-LS/PAD/DISPERKIM/ 21
18 JAN 21.

03. 83.582.000. 8.833.585. 74.694.415 10.

0011. KEAR.SIPAM

0011/SP20-LS/PAD/DISPERKIM/ 21
18 JAN 21.

02. 79.986.000. 7.147.961. 72.828.039 11.

0012. DP2KBP3A.

0012/SP20-LS/PAD/DP2KBP3A/ 21
18 JAN 21

02. 105.893.600 10.987.513 24.902.087 12. S

798	BPKAD	798 / SP20 - LS / PAD / BPKAD / 21 20 Desember 2021	070	4.344.233.891,-	-	4.344.233.891,-	798
799	BPKAD	799 / SP20 - LS / PAD / BPKAD / 21 20 Desember 2021	071	1.083.103.856,-	-	1.083.103.856,-	799
800	BPKAD	800 / SP20 - LS / PAD / BPKAD / 21 20 Desember 2021	075	47.563.824,-	-	47.563.824,-	800
801	BPKAD	801 / SP20 - LS / PAD / BPKAD / 21 22 Desember 2021	078	442.734.776-	-	442.734.776-	801
802	DPMFISP	776 / SP20 - LS / PAD / DPMFISP / 21 15 Desember 2021	042	106.688.000	-	95.549.334	802

REGISTAR BUKU
GAJI SP2D
TAHUN ANGGARAN 2021

NO		J A N U A R I 21		J A N U A R I 21	
01.	ROH - WICDH	0001/SP20 - GJ/DN/ROH-WICDH/21	01.	01.	132.851.300
02.	SETDA	0002/SP20 - GJ/DN/SETDA/21	01.	01.	145.543.012
03.	SET - DPRD	0003/SP20 - GJ/DN/SET-DPRD/21	01.	01.	159.378.902
04.	BPRAD	0004/SP20 - GJ/DN/BPRAD/21	01.	01.	168.852.711
05.	BAPPELITBANG	0005/SP20 - GJ/DN/BAPPELITBANG/21	01.	01.	238.625.355
06.	INSPEKTORAT DAERAH	0006/SP20 - GJ/DN/1P/20	01.	01.	238.625.355
07.	BKORSON	0007/SP20 - GJ/DN/BKORSON/20	01.	01.	147.325.700
08.	KESBANGPOL	0008/SP20 - GJ/DN/KESBANGPOL/21	01.	01.	103.905.100
09.	JATARA	0009/SP20 - GJ/DN/PK PP/21	01.	01.	243.600.900
10.	KPRH	0010/SP20 - GJ/DN/TPH/21	01.	01.	789.869.917
11.	DINAS PETAHANAN PANGAN	0011/SP20 - GJ/DN/DRP/21	01.	01.	70.893.066
12.	DINAS PERIKANAN	0012/SP20 - GJ/DN/DISKAN/21	01.	01.	178.120.510

1205	Kec. Aranio. G. Terusan.	1205/SPDP-GJ/DN/Kec. Aranio/01	35	2.253.890.-	2.232.800	1205.
		01 Des 81				
1206	Kec. Martapura Barat	1206/SPDP-GJ/DN/Kec. MA/21	13	71.538.630.-	65.416.000.	1206
		01 Des 21				
1207	DPMPJP	1124/SPDP-GJ/DN/DPMPJP/2021	039	125.059.630	114.268.000	1207 849
		1 Des 21				



STANDAR HARGA BARANG DAN JASA TAHUN 2022



KERJASAMA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
DENGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2021

NOTULEN RAPAT DAN KELENGKAPANNYA

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

**KABUPATEN BANJAR
TAHUN ANGGARAN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222, Faksimile (0511) 4720222 Web : BPKAD.banjarkab.go.id

Martapura, 9 Maret 2021

Nomor : 800/0144.01 /BPKAD
Lampiran : -
Perihal : Permintaan data capaian kinerja
Perangkat Daerah sebagai bahan
evaluasi Sakip Tahun 2020

Kepada Yth:
1. Sekretaris BPKAD
2. Semua Kabid
3. Semua Kasubbid
4. Semua Kasubbag
5. Staf perencanaan
di -
Tempat

Sehubungan dengan surat dari Sekretariat Daerah Nomor : 065/315/ORG
Tanggal 8 Maret 2021 tentang permintaan data capaian kinerja Perangkat Daerah
sebagai bahan evaluasi Sakip Tahun 2020 untuk menghadiri rapat pada:

Hari/tanggal : Rabu, 10 Maret 2021
Waktu : 10.00 wita s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat BPKAD

Demikian undangan rapat ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Kepala BPKAD,

Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660104 198602 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222, Faksimile (0511) 4720222

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Maret 2021

Waktu : 10.00 s.d Selesai

Tempat : Aula BPKAD

Perihal : Permintaan data capaian kinerja Perangkat Daerah sebagai bahan evaluasi sapk Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	A. Zulhyadimi	Ka BPKAD	
2	Abd. Halim	Setoran	
3	Zulwailuni	Kasubid AKE	
4	H. Abd Fachrur	Kasubid Pabenda	
5	Dupriyadi	Kasubid Perencanaan Anggaran	
6	M. Sapwari	Kasubid BELPEB	
7	Siti Ariyentodhi	Kasubid Peningkatan	
8	VLA	Kasubid KETU	
9	Adha Maya Rosanti	Kasubid AKE 3	
10	Susilawati	Kasubid AKE 2	
11	Fulana Khair	Kasubid AKE 1	
12	Nurizami	Kasubid Pengendalian Anggaran	
13	Daman	Kasubid Peningkatan	
14	Nadya Dewi S. P	Kasubid Perencanaan & Penit	

15	Rina Indriyani	Impes	
16	Hj. Dian Sri Lestari	Pesubbing Perencanaan	
17	Muzdalifah Suprih	staf Perencanaan	
18	GUSTI GELSON RAM	Katrol Myon	
19	M. Ikhsan Hadade	staf Perencanaan	
20	Fitria Sahriza	kambel BR	
21	Nina Apriyani	Staf Perencanaan	
22	Fathurrohman	Perencanaan	
23	Hj Rosita Enai	Kewasbid PRL	
24	Norisa Amelia	staf perben	
25	Esa MIM.R.	unreg	
26	U. Miftah fudy.	staf bd. Aset	
27	M. RIZKA REFHANJ	staf bdd perbend	
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222, Faksimile (0511) 4720222 Web : BPKAD banjarkab.go.id

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Maret 2021
Waktu : 10.00 wita s.d Selesai
Tempat : Aula Berlian
Pimpinan Rapat : Kepala BPKAD
Peserta Rapat : Sekretaris, Kabid, Kasubbid, Kasubbag dan staf
Acara Rapat : Permintaan data capaian kinerja Perangkat Daerah sebagai bahan evaluasi
Sakip Tahun 2020

1. Pembukaan :
Rapat dibuka oleh Kepala BPKAD
2. Pembahasan :
 - Permintaan data dari bagian organisasi untuk mengisi data tersebut diambil dari perjanjian kinerja tahun 2020 yang akan dikoreksi oleh masing – masing sekretaris, Kabid, Kasubbid, Kasubbag
 - Sekalian penandatanganan perjanjian kinerja untuk Sekretaris, Kabid, Kasubbid dan Kasubbag
3. Kesimpulan :
Kepala Badan mengharapkan subbagian perencanaan agar menanyakan kebagian organisasi tentang isian data yang diminta apakah sudah sesuai
4. Penutup :
Rapat ditutup oleh Kepala Badan

Mengetahui :
Sekretaris

Abdul Khair, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19650424 198602 1 007

Notulen Rapat,

Muzdalifah Supridha, SE
Penata (III/c)
NIP. 19810914 201001 2 005







PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222, Faksimile (0511) 4720222 Web : BPKAD banjarkab.go.id

Martapura, 16 Maret 2021

Nomor : 800/0215.4-01/BPKAD
Lampiran : -
Perihal : Persiapan Ekspos Implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP

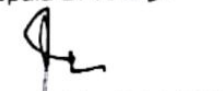
Kepada Yth:
1. Kepala BPKAD
2. Sekretaris BPKAD
3. Kasubbag Perencanaan
4. Staf perencanaan dan umpeg
di -
Tempat

Sehubungan dengan Ekspos Implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr(i) untuk berhadir pada rapat Persiapan Ekspos Implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP dan hal-hal lain yang dianggap perlu guna kelancaran kegiatan yang akan datang untuk menghadiri rapat pada:

Hari/tanggal : Kamis, 18 Maret 2021
Waktu : 10.00 wita s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat BPKAD

Demikian undangan rapat ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala BPKAD


Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660104 198602 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222, Faksimile (0511) 4720222

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : Kamis

Tanggal : 18 / 03 / 2021

Waktu : 10 : 00 Wita s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat BPKAD

Perihal : Persiapan Ekspos Implementasi Reformasi Birokrasi & SAKIP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	A. Zulfadri	Km BPKAD		
2	Abd. Halim	Sehatmas		
3	H. Dian Srisetia M..	Kabid Perencanaan		
4	Nina Apriyani	Staff Perencanaan		
5	M. Ikhsan Hadade	Staff Perencanaan		
6	Fathurrohman	Staff Perencanaan		
7	Rina Andiana	'		
8	Muzdalifah Supriha	Staff Umpeg		
9	Saudkhol Jannah	Staff Umpeg		
10				
11				
12				
13				
14				
15				



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222. Faksimile (0511) 4720222 Web : BPKAD.banjarkab.go.id

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Maret 2021
Waktu : 10.00 wita s.d Selesai
Tempat : Aula BPKAD
Pimpinan Rapat : Kepala BPKAD
Peserta Rapat : Sekretaris, Kasubbag Perencanaan, dan Staf Perencanaan
Acara Rapat : Rapat Persiapan Ekspos Implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP
dan hal – hal yang dianggap perlu

1. Pembukaan :

Rapat dibuka oleh Kepala BPKAD

2. Pembahasan :

- Kepala Badan mendengarkan penjelasan dari Kasubbag Perencanaan tentang berkas apa saja yang diperlukan untuk ekspos implementasi reformasi birokrasi dan SAKIP .
- Kepala Badan menanyakan berkas apa saja yang sudah disiapkan dan berkas apa saja yang masih dalam proses penyusunan.
- Kepala Badan juga mengoreksi berkas yang sudah disiapkan.

3. Kesimpulan :

Kepala Badan mengharapkan agar berkas yang diperlukan disusun dengan seksama dan teliti. Serta memaksimalkan waktu yang tersedia agar ekspos implementasi reformasi birokrasi dan SAKIP bisa dilaksanakan dengan baik.

4. Penutup :

Rapat ditutup oleh Kepala Badan.

Mengetahui :
Sekretaris

Abdul Khair, SE
Pembina UK I (IV/b)
NIP. 19650424 198602 1 007

Notulen Rapat,

Nina Apriyani, S.Kom
Penata Muda (III/a)
NIP. 19880429 201903 2 009







PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pengoran Hidayatullah Nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222, Faksimile (0511) 4720222 Web : BPKAD banjarkab.go.id

Martapura, 23 Maret 2021

Nomor : 800/0215.b.03 /BPKAD
Lampiran : -
Perihal : Persiapan Evaluasi RKPD BPKAD
Triwulan I TA 2021

Kepada Yth:

1. Kepala BPKAD
2. Sekretaris BPKAD
3. Semua Kabid
4. Semua Kasubbid
5. Kasubbag Perencanaan
6. Kasubbag Keuangan
7. Kasubbag Umpeg
8. Bendahara Pengeluaran
9. Semua PPTK
10. Pengurus Barang
11. Staf perencanaan

di -

Tempat

Sehubungan dengan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BPKAD, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr(i) untuk berhadir pada rapat Persiapan Evaluasi RKPD BPKAD Triwulan I TA 2021 dan hal-hal lain yang dianggap perlu guna kelancaran kegiatan yang akan datang untuk menghadiri rapat pada:

Hari/tanggal : Kamis, 25 Maret 2021
Waktu : 10.00 wita s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat BPKAD

Demikian undangan rapat ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala BPKAD,

Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
Pemangku Utama Muda (IV/c)
NNIP 19660104 198602 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222, Faksimile (0511) 4720222

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : Kamis

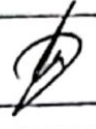
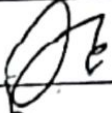
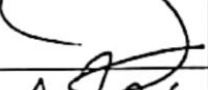
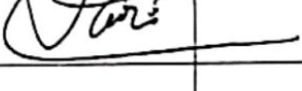
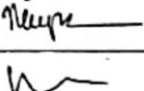
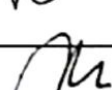
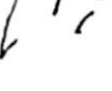
Tanggal : 25 / 03 / 2021

Waktu : 10.00 Wita s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat BPKAD

Perihal : Pergiapan Evaluasi RKPD BPKAD Triwulan I TA.2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	B. Zuliyatun	Ka BPKAD		
2	ABD. KAMIR	Stretang		
3	ZENAL ILMI	KAKAD MKI		
4	Supriyadi	ket PA		
5		BKPD KJ		
6	Nabya Dewi S.	Kasubbid perencanaan dan pencausahan		
7	Siti Daryontahiz	Kasubbid Pengawasan		
8	Hj. Dian Sri Lestari, M.	Kasubbid Perencanaan		
9	Muzdalifah Fupidha	Staf Umpan		
10	Izha Maya R	Kesekretariat	US	
11	Shinta Ayu Via	Kasubbid keuangan	ACE	
12	Muhammad Harbi	Bend. Pengeluaran		
13	Husain	Pemb. bend. pengeluaran		
14	Yuma Wirawati	Pemb. bend. pengeluaran		
15	Risni Aelliani	Staf keuangan		

16	Ahmad Rizki	Umpeg		
17	Gusti Sultan Noor	Kahid Angg		
18	Nuriyani	Kahid Ryzal		
19	Diam	Kahid Ryzal		
20	M. Sopian	Kahid Ryzal		
21	Hi. Ranta Eni	Kahid Ryzal		
22	Fika Sahri	Kahid Ryzal		
23	Charita Rizki	Umpeg		
24	Heri D.	---		
25	Ikhtwan F	Kahid Ryzal		
26	Raudhah Jannah	Umpeg		
27	Yuliana Oest	Umpeg		
28	Ega Mimi R	"		
29	Nurul Huda	"		
30	Nina Apriyani	Graf Perencana		
31	Yuliani Kherol	Kahid Ryzal		



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222, Faksimile (0511) 4720222 Web : BPKAD.banjarkab.go.id

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Maret 2021
Waktu : 10.00 wita s.d Selesai
Tempat : Aula BPKAD
Pimpinan Rapat : Kepala BPKAD
Peserta Rapat : Sekretaris, Kabid, Kasubbid, Kasubbag Umpeg, Kasubbag Keuangan,
Kasubbag Perencanaan, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Staf
Perencanaan
Acara Rapat : Rapat Persiapan Evaluasi RKPD BPKAD dan hal – hal yang dianggap
perlu

1. Pembukaan :

Rapat dibuka oleh Kepala BPKAD

2. Pembahasan :

- Kepala Badan mendengarkan penjelasan dari bendahara pengeluaran tentang jumlah realisasi keuangan sampai saat ini.
- Kepala Badan mendengarkan penjelasan dari Kasubbid, Kasubbag Umpeg, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Perencanaan tentang jumlah realisasi fisik sampai saat ini.
- Kepala Badan juga menyampaikan bahwa pada akhir Triwulan I akan menyusun Laporan Triwulan I agar disiapkan apa saja yang diperlukan untuk laporan tersebut.

3. Kesimpulan :

Semua bidang agar bisa memaksimalkan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2021 dan agar PPTK dapat membuat kartu kendali ditiap triwulan.

4. Penutup :

Rapat ditutup oleh Kepala Badan

Mengetahui :
Sekretaris

Abdul Khair, SE
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19650424 198602 1 007

Notulen Rapat,

Nina Apriyani, S.Kom
Penata Muda (III/a)
NIP. 19880429 201903 2 009







PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222, Faksimile (0511) 4720222 Web : BPKAD.banjarkab.go.id

Martapura, 03 Mei 2021

Nomor : 800 / 0894 - 01 / BPKAD
Lampiran : -
Perihal : Persiapan Penyusunan RENSTRA BPKAD
2021 - 2026

Kepada Yth:

1. Kepala BPKAD
2. Sekretaris BPKAD
3. Semua Kabid
4. Semua Kasubbid
5. Kasubbag Perencanaan
6. Kasubbag Keuangan
7. Kasubbag Umpeg
8. Staf perencanaan

di -

Tempat

Sehubungan dengan Penyusunan RENSTRA BPKAD 2021 - 2026, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr(i) untuk berhadir pada rapat Persiapan Penyusunan RENSTRA BPKAD 2021 - 2026 dan hal-hal lain yang dianggap perlu guna kelancaran kegiatan yang akan datang untuk menghadiri rapat pada:

Hari/tanggal : Rabu, 05 Mei 2021
Waktu : 09.00 wita s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat BPKAD

Demikian undangan rapat ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala BPKAD,

Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660104 198602 1 004



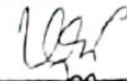
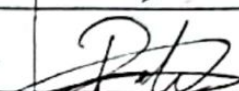
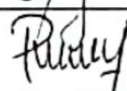
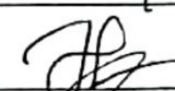
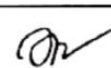
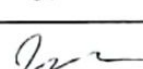
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222, Faksimile (0511) 4720222

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : Rabu.....
Tanggal : 05 Mei 2021
Waktu : 09.00 wita s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat BPKAD
Perihal : Persiapan Penyusunan RENCANA BPKAD.....

NO	NAMA	JABATAN	P/L	TANDA TANGAN
1	A. Zulpadinni	K. BPKAD	L	
2	Abd. Khair	Sejabat	L	
3	W. Falehel Pang	Kabid Aset	L	
4	EUSTI SUELAN NOOR	KABID ANGGARAN	L	
5	ZAINAL ILAMI	KABID MKT	L	
6	H. Abd Faltme	Kid Perband	L	
7	VIA	KASUB. KEU	L	
8	Siti ARIYANTATI	Kasubid perashopusan	P	
9	Supriyadi	Kanlid PA	L	
10	Rina Andriana	staf Umpeg	P	
11	Hs. Dian Sri Lestari M.	Kasubid Perencanaan	P	
12	Nina Apriyani	Staf Perencanaan	P	
13	Wahman F	Kabid Umpeg	L	
14	Muzdalifah Suprih	staf Umpeg	P	

15	Dinar	Ketua Tim Ahli Brd. Anggakan	P	
16	Nurizanni	Kasubid Pengabdian Anggaran	P	
17	Alma Sahrizn	Kasbid BL	P	
18	Sudikawat.	Kasbid AL II	P	
19	Yuhazi Khairil	Kasubid Akt. 1	L	
20	M. Sapwani	KASUBID BELPEG	L	
21	M. Ikhsan Hadade	Staf Perencanaan	L	
22	Fathurrohman	Staf Perencanaan	L	
23	Ridha Mulya.	Kasbid Akt. III	P.	
24	Iwan	Staf	L	
25	Yvana Wiraatari	Staf	P	
26	Reni Andani	Staf	P	
27	M. Hasbi	Staf	L	
28	Eto Wira M.	Staf	L	
29	G. MASRAODAH	Staf	P	
30	yuhana	staf	P	
31	H. Fa. Faisal Rahman	Staf	L	
32	Bambang Siswanto	Kasbid Akt	L	
33	M. Fakhruzzaman	Staf AK4	L	
34	M. Rizki Maulana	Staf AKT	L	
35	Mufid Hikmah	umpes	P	



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222, Faksimile (0511) 4720222 Web : BPKAD.banjarkab.go.id

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Mei 2021
Waktu : 09.00 wita s.d Selesai
Tempat : Aula BPKAD
Pimpinan Rapat : Kepala BPKAD
Peserta Rapat : Sekretaris, Kabid, Kasubbid, Kasubbag dan Staf Perencanaan
Acara Rapat : Rapat Persiapan Penyusunan RENSTRA BPKAD 2021 - 2026 dan hal -
hal yang dianggap perlu

1. Pembukaan :

Rapat dibuka oleh Kepala BPKAD

2. Pembahasan :

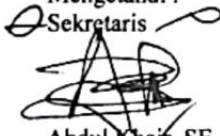
- Kepala Badan memberikan penjelasan tentang alur penyusunan RENSTRA. Secara lebih lanjut dijelaskan bahwa Renstra adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.
- Kepala Badan melakukan koordinasi dengan peserta rapat tentang penyusunan indikator dan target program/kegiatan/subkegiatan yang diampu oleh masing-masing peserta rapat..
- Kepala Badan juga mengoreksi beberapa data yang sudah dihimpun.

3. Kesimpulan :

Kepala Badan mengharapkan agar berkas yang diperlukan disusun dengan seksama dan teliti. Serta memaksimalkan waktu yang tersedia agar penyusunan Renstra BPKAD 2021 - 2026 bisa dilaksanakan dengan baik. Sehingga memberikan manfaat dan peran serta dalam pembangunan pemerintahan Kabupaten Banjar selama 5 tahun ke depan.

4. Penutup :

Rapat ditutup oleh Sekretaris Badan.

Mengetahui :
Sekretaris

Abdul Khair, SE
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19650424 198602 1 007

Notulen Rapat,

Nina Apriyani, S.Kom
Penata Muda (III/a)
NIP. 19880429 201903 2 009







PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangoran Hidayatullah Nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222, Faksimile (0511) 4720222 Web : BPKAD.banjarkab.go.id

Martapura, 08 September 2021

Nomor : 800/ III a -61 /BPKAD
Lampiran : -
Perihal : Rapat Pembahasan RKA menjadi
DPPA

Kepada Yth:

1. Sekretaris BPKAD
2. Semua Kabid
3. Semua Kasubbid
4. Semua Kasubbag
5. Staf perencanaan

di -

Tempat

Sehubungan dengan penetapan RKA menjadi DPPA maka dengan ini mengundang bapa ibu untuk menghadiri rapat pada :

Hari/tanggal : Kamis, 09 September 2021
Waktu : 08.30 wita s.d. selesai
Tempat : Aula Berlian BPKAD

Demikian undangan rapat ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Kepala BPKAD,

Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660104 198602 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222, Faksimile (0511) 4720222 Web : BPKAD.banjarkab.go.id

Hari/Tanggal : Kamis, 08 September 2021
Waktu : 09.00 wita s.d Selesai
Tempat : Aula Berlian
Pimpinan Rapat : Kepala BPKAD
Peserta Rapat : Sekretaris, Semua Kabid, Semua Kasubbid dan semua Kasubbag
Acara Rapat : Rapat Pembahasan RKA menjadi DPPA

1. Pembukaan :
Rapat dibuka oleh Kepala BPKAD
2. Pembahasan :
Kepala BPKAD Menyampaikan Dalam rangka penyusunan RKA BPKAD menjadi DPPA ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :
 - Sebelum di tetapkannya menjadi DPPA Para pejabat dari Esselon III dan IV perlu kembali memverifikasi kegiatan dan sub kegiatan hingga Belanja dan Rincian Belanja pada masing masing bidang dan Bagian.
 - Apabila terdapat kegiatan, sub kegiatan, Belanja dan Rincian Belanja yang tidak sesuai (perlu perbaikan) maka perlu dikoordikasikan pada bagian Sekretariat pada Sub bidang Perencanaan
 - Dalam Koordinasi dengan sub bidang perencanaan hendaknya dilakukan secara akurat dan cepat sehingga dapat selesai tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan
3. Kesimpulan :
Perlunya nya koordinasi Bidang- Bidang dengan Sekretariat
4. Penutup :
Rapat ditutup oleh Kepala Badan

Mengetahui :
Sekretaris

Abdul Khair, SE
Pembina (IV/b)
NIP. 19650424 198602 1 007

Notulen Rapat,

Hj. Dian Sri Lestari Margayanti, SE, MSi
Penata tk 1 (III/d)
NIP. 19811021 200904 2 002



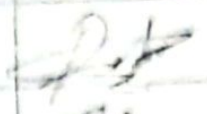
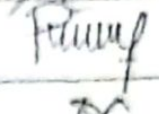
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222, Faksimile (0511) 4720222

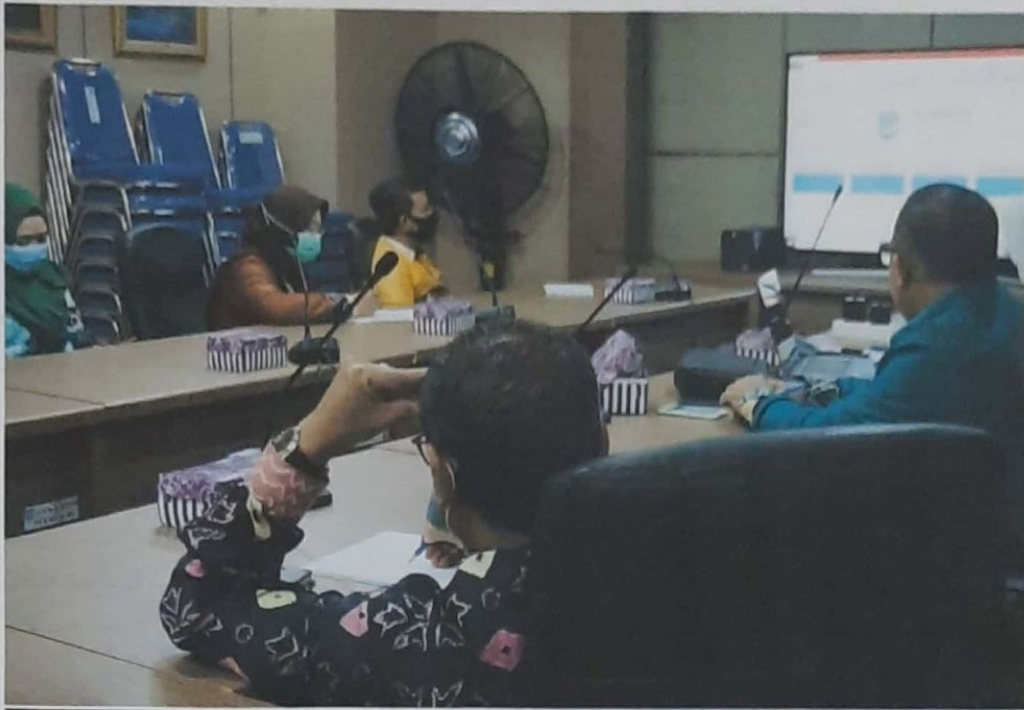
DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : Kamis
Tanggal : 09 Sep 2021
Waktu : 08.30 Wita & Selesai
Tempat : Aula berlian BPKAD
Perihal : Rapat Pembahasan RKA menjadi DPPA

NO	NAMA	JABATAN	P / L	TANDA TANGAN
1	A. Only Dini	ka BPKAD	L	
2	Abd. Khair	sekretaris	L	
3	M. Fahrul Fauz	Kabid Atr	L	
4	Esti Susanto Noor	KASUB ANGGARAN	L	
5	Riswan - P	PERSONAL	L	
6	IKHWAN Fakhri	KAB KUPU	L	
7	Nurizami	PB. Pugroldia Augy	P	
8	Ridha Maya Rosanto	Kasubid Atr II	P	
9	Hj. Dian Sri Lestari M.	Kasubag Perencanaan	P.	
10	M. Khairil	pelaksana perencanaan	L	
11	M. SAPWATI	KASUBID BELAJAR	L	
12	siti Ariyontati	Kasubid Pengawasan	P	
13	Diana	Kasubid Analisis Perencanaan dan peng. anggar	P	
14	Supriyati	Kasubid Perencanaan Anggaran	L	

18	Pdri Selaba	Kantor Br	P	R
19	Zaini Kari	Kantor Aki	L	
20	M. Husein Hardianto	Staf Perencanaan	L	
21	Fathurrahman	Staf Perencanaan	L	
22	Nasir Aprugani	Staf Perencanaan	P	TY
23	Wid	Kantor KES	L	Wid
24	Wid	Staf Subbag Keuangan	P	
25	Rini	Staf Subbag Keuangan	P	
26	Musa	Staf	L	
27	Yuliana	Staf Sekretariat	P	
28	Rini	Staf Urupis	L	
29	Wid	"	P	
30	Eray	Wapay	L	
31	Rendhatul Jannah	Urupis	P	
32	Husein H	-	P	
33	M. Harbi	Staf Subbag keu	L	
34				
35				







PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222, Faksimile (0511) 4720222 Web : BPKAD.banjarkab.go.id

Martapura, 09 November 2021

Nomor : 800/1478 - 01 /BPKAD
Lampiran : -
Perihal : Pembahasan Cascading 2021-
2026 BPKAD

Kepada Yth:

1. Sekretaris BPKAD
2. Semua Kabid
3. Semua Kasubbid
4. Semua Kasubbag
5. Staf perencanaan

di -

Tempat

Sehubungan dengan surat dari Sekretariat Daerah Nomor : 060/1276/ORG
Tanggal 29 Oktober 2021 tentang Asistensi/Desk Cascading/Pohon Kinerja atas
IKU dan Renstra 2021-2026 untuk menghadiri rapat pada:

Hari/tanggal : Rabu, 10 November 2021
Waktu : 08.30 wita s.d. selesai
Tempat : Aula Berlian BPKAD

Demikian undangan rapat ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Kepala BPKAD,

Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660104 198602 1 004

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222, Faksimile (0511) 4720222

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : Rabu
Tanggal : 10 NOV 2021
Waktu : 08.30 ⁹ ke Sesi
Tempat : Aula berlian BPKAD
Perihal : Pembahasan CASCADING 2021 - 2026 BPKAD

NO	NAMA	JABATAN	P/L	TANDA TANGAN
1	A. Zuly Dirm	K. BPKAD	L	
2	Adh. Kadir	Sejabat	L	
3	M. Fahrul Pray	Kabid Aset	L	
4	GUSTI SUSAN NOOR	KABID INGGMAN	L	
5	Rizwan. P	Perbendah	L	
6	IKHWAN F.	10% CASCADING		
7	Nurizami	Kasub. Pengendalian Anggaran	P	
8	Rita Maya P	Kasubid Aset III	P	
9	H. Dan Sri Lestari, M.	Kasubag Perencanaan	P	
10	M. Khairil	Kelompok Perencanaan	L	
11	M. SAPUTRI	KASUBID BELAJAR	L	
12	Sri Ariyontati	Kasubid pengapusan	P	
13	Rizman	Kasubid analisis perencanaan dan pengapusan	P	
14	Supriyadi	Kasubid Perencanaan Anggaran	L	

15	Fitria Sahriza	Karbid BL	P	R
16	ZANAL ILANI	KABID KRI	L	St
17	M. Ikti San Hadade	Staf Perencanaan	L	St
18	Fathurrohman	Staf Perencanaan	L	St
19	Mira Apriyanti	Staf Perencanaan	P	U
20	VIA	KSBK - KBU	P	Young
21	Luna	Staf Subbag Keuangan	P	St
22	Pisni	Staf Subbag Keuangan	P	St
23	Musin	Staf BL	L	St
24	Juliana	Staf	P	St
25	Rizal	Kepu	L	St
26	EGA	"	P	St
27	Eroy	Kepu	L	St
28	Rouhabet Jannah	Kepu	P	St
29	Mukul	"	P	St
30	M. Hathi	Staf Subbag Kew	L	St
31				
32				
33				
34				
35				



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222, Faksimile (0511) 4720222 Web : BPKAD.banjarkab.go.id

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Nopember 2021
Waktu : 09.00 wita s.d Selesai
Tempat : Aula Berlian
Pimpinan Rapat : Kepala BPKAD
Peserta Rapat : Sekretaris, Semua Kabid, Semua Kasubbid dan semua Kasubbag
Acara Rapat : Undangan Pembahasan Cashceding 2021- 2026 BPKAD

1. Pembukaan :
Rapat dibuka oleh Kepala BPKAD
2. Pembahasan :
Kepala BPKAD Menyampaikan Dalam rangka penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis) BPKAD ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :
Perlu penyelarasan Cashceding Renstra BPKAD diantaranya :
 - Perubahan Kinerja, Indikator Kinerja, penambahan Definisi Operasional dan Rumus Indikator Kinerja pada Esselon III bidang Anggaran
 - Karena ada perubahan cashceding pada bidang anggaran diatas maka perlu perubahan kembali dari level Esselon IV hingga level pelaksana/staf hingga terjadi keselarasan sampai ketinggian bawah
 - Perubahan Kinerja, Indikator Kinerja, penambahan Definisi Operasional dan Rumus Indikator Kinerja pada Esselon III bidang Perbendaharaan
 - Karena ada perubahan cashceding pada bidang Perbendaharaan diatas maka perlu perubahan kembali dari level Esselon IV hingga level pelaksana/staf hingga terjadi keselarasan sampai ketinggian bawah
 - Perubahan Kinerja, Indikator Kinerja, penambahan Definisi Operasional dan Rumus Indikator Kinerja pada Esselon III bidang Akuntansi
 - Karena ada perubahan cashceding pada bidang Akuntansi diatas maka perlu perubahan kembali dari level Esselon IV hingga level pelaksana/staf hingga terjadi keselarasan sampai ketinggian bawah
 - Untuk bidang aset dianggap sudah selaras maka tidak dilakukan revisi.
3. Kesimpulan :
Kepala Badan mengharapkan keselarasan hingga dapat menghimpun seluruh kegiatan baik dari sekretariat dan bidang-bidang.
4. Penutup :
Rapat ditutup oleh Kepala Badan

Mengetahui :
Sekretaris

Abdul Khair, SE
Pembina (IV/b)
NIP. 19650424 198602 1 007

Notulen Rapat,

Hj. Dian Sri Lestari Margayanti, SE. MSi
Penata Tk 1 (III/d)
NIP. 19811021 200904 2 002







PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70811
Telepon (0511) 4720222, Faksimila (0511) 4720222 Web : BPKAD banjarkah.go.id

Martapura, 3 Desember 2021

Nomor : 800/168 - 01 /BPKAD
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Kepada Yth:
1. Sekretaris BPKAD
2. Semua Kabid
3. Semua Kasubbid dan staf
4. Semua Kasubbag dan staf
di -

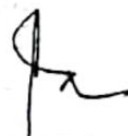
Tempat

Sehubungan dengan surat dari Sekretariat Daerah Nomor :
005/1308/PEM Tanggal, 3 Nopember 2021 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 maka kami
mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat pada :

Hari/tanggal : Senin, 06 Desember 2021
Waktu : 13.00 wita s.d. selesai
Tempat : Ruang Berlian BPKAD Kab. Banjar

Demikian undangan rapat ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Kepala BPKAD,


Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660104 198602 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222, Faksimile (0511) 4720222

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : Senin

Tanggal : 06 Desember 2021

Waktu : 13.00 wita sd selesai

Tempat : Ruang Berlian BPKAD Kab. Banjar

Perihal : Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah TA 2021

NO	NAMA	JABATAN	P/L	TANDA TANGAN	KET
1	A. Zuryanti	K. Himpun	L		
2	Abd. Halim	Sebidang	L		
3	H. Abd. Faltan	Kabid Perbud	L		
4	Hj. Dian Sri Lestari, M.	Kasubbag Renc	P		
5	Nina Apriyani	Staf Perencanaan	P		
6	M. Khairil	Staf. Monev	L		
7	M. Supriat	KASUBID BELPE	L		
8	Fitria Sahriza	Kasubid BZ	P		
9	Rizma P	" BTL	L		
10	Supriyadi	Kasubid Renc	L		
11	Daman	Kasubid Renc	P		
12	Nurizami	Kasubid Renc	P		
13	GUSTI SURIANA Nara	Kasubid Renc	L		
14	Siti Ariyontabla	Kasubid Renc	P		
15	Ridha Maya R	Kasubid Renc	P		
16	Nadya Dewi S.P	Kasubid Renc	P		

40	M. Firdaus Perry	Uchi's Asw	L	
41	M. Pitia nur	B. Amara	L	
42	M. MIZ RIFHUNI	staf BTL	L	
43	Nousa Amelia	Staf BTL	P	
44	Bahrinh	Staf BTL	P	
45	Sugarto	Asst BTL Asst	L	
46	M. SYARWAN	Staf BTL Asst	L	
47	Murni Susanti	STAF BID. ASST	P	
48	Fuady	Staf Bid-Asst	L	
49	M. pandeli	Staf Bid Asst	L	
50	Gt-Nizar Syafii	Staf B. Brggan	L	



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70811
Telepon (0511) 4720222, Faksimile (0511) 4720222 Web : BPKAD.banjarkab.go.id

Hari/Tanggal : Senin, 06 Desember 2021
Waktu : 11.00 wita s.d Selesai
Tempat : Aula Berlian
Pimpinan Rapat : Kepala BPKAD
Peserta Rapat : Sekretaris, Kabid, Kasubbid, Kasubbag dan staf
Acara Rapat : Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
: pada BPKAD

1. Pembukaan :

Rapat dibuka oleh Kepala BPKAD

2. Pembahasan :

- Berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Nomor : 005/1308/PEM tanggal 3 Nopember 2021 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2021

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan pembuatan laporan dan Evaluasi LPPD yaitu :

1. Perlunya Koordinasi dari subbag Perencanaan kepada Bidang-Bidang Terutama bidang Akuntansi dan Aset.
2. Apabila menemui permasalahan yang agak sulit hendaknya dibahas kembali pada forum rapat internal
3. Dalam memaksimalkan kerja pembuatan LPPD hingga tepat waktu bisa di buat jadwal khusus pembagian laporan tersebut.
4. Perlu adanya evaluasi ke pjabat yang lebih tinggi setelah rampung laporan LPPD yang susun oleh subbag Perencanaan.

3. Kesimpulan :

Kepala Badan mengharapkan dalam pembuatan LPPD lebih dimaksimalkan lagi hingga selesai sebelum waktu yang di tentukan

4. Penutup :

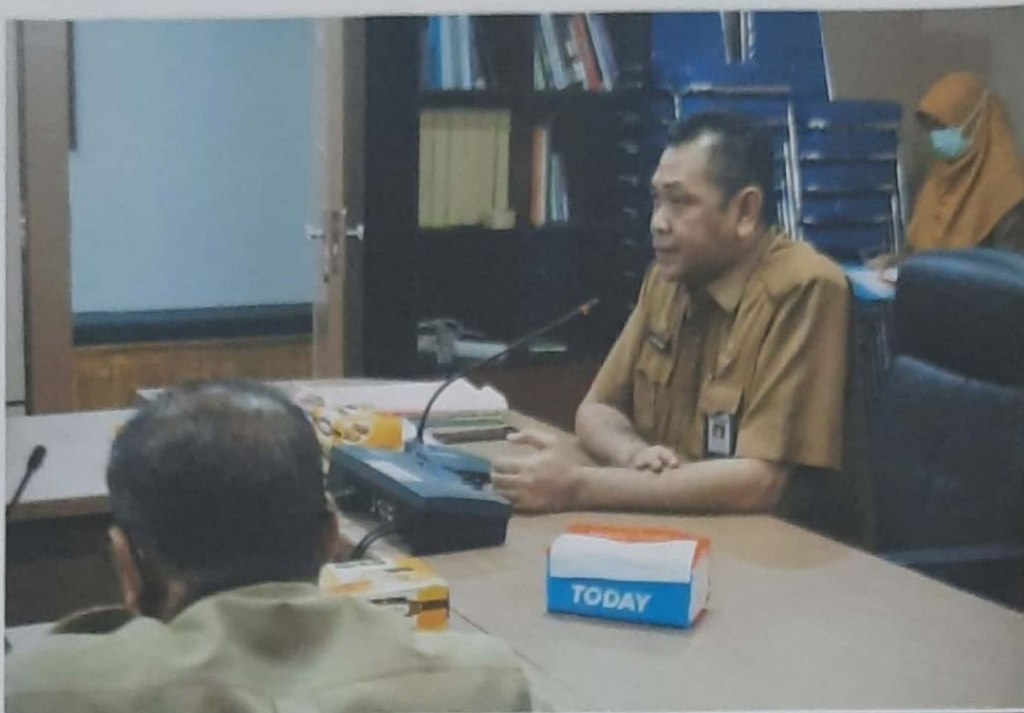
Rapat ditutup oleh Kepala Badan

Mengetahui :
Sekretaris

Abdul Khair, SE
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19650424 198602 1 007

Notulen Rapat,

Hj. Dian Sri Lestari Margayanti, Se, M.Si
Penata tk. 1 (III/d)
NIP. 198110212009042002







PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222, Faksimile (0511) 4720222 Web : BPKAD banjarkab.go.id

Martapura, 14 Desember 2021

Nomor : 800/1686 - 01 /BPKAD
Lampiran : -
Perihal : Rapat Penyempurnaan
Chascade

Kepada Yth:
1. Sekretaris BPKAD
2. Semua Kabid
3. Semua Kasubbid
4. Semua Kasubbag
5. Staf Perencanaan
di -

Tempat

Sehubungan dengan berita acara pembahasan Pohon kinerja tahun 2021-2026 pada hari Selasa 14 Desember 2021 di Aula Bappedalitbang maka perlu dilakukan rapat lanjutan untuk semua bidang yang ada di BPKAD pada :

Hari/tanggal : Rabu, 15 Desember 2021
Waktu : 11.00 wita s.d. selesai
Tempat : Aula Berlian BPKAD Kab. Banjar

Demikian undangan rapat ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala BPKAD,

Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660104 198602 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Hidayatullah Nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70011
Telepon (0511) 4720222, Faksimile (0511) 4720222 Web : BPKAD banjarkab.go.id

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Desember 2021
Waktu : 11.00 wita s.d Selesai
Tempat : Aula Berlian
Pimpinan Rapat : Kepala BPKAD
Peserta Rapat : Kepala BPKAD, Sekretaris BPKAD, Semua kapid dan Kasubbag,
Serta staf perencanaan
Acara Rapat : Rapat Penyempurnaan Cashcade

1. Pembukaan :
Rapat dibuka oleh Kepala BPKAD
2. Pembahasan :
Sehubungan dengan Berita Acara Pembahasan/Desk pohon Kinerja (Cashcading) Renstra tahun 2021-2026 pada tanggal 14 Desember 2021 bertempat di Aula Bappeda-litbang, adapun hasil berita acara tersebut ada beberapa point yang perlu penyempurnaan :
 - Untuk target Indikator kinerja/kondisi tertinggi akan ditinjau kembali, disampaikan ke bappedalitbang pada hari Rabu tanggal, 15 Desember 2021 pada pukul 17.00. wita
 - Kinerja yang telah dibuat bisa disempurnakan kembali untuk disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang selaras dengan indikator kinerja
 - Untuk level 2 yang menjadi IKU kepada BPKAD pada kinerja akuntabilitas keuangan daerah meningkat dan akuntabilitas aset daerah meningkat di hapus (level tujuan = sasaran)
 - Indikator indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah agar diberikan landasan hukum berupa surat surat keputusan Bupati Banjar

Tindak lanjut

- Pada point 1 memakai apa yang disarankan oleh tim Bappeda libang pada target indikator kinerja
 - Pada point 2 perlu ada koordinasi dari sekretaris, dan semua bidang
 - Pada point 3 menyetujui dengan dihapusnya untuk level 2 yang menjadi IKU kepala BPKAD
 - Pada point 4 segera dibuatkan draft SK Bupati Banjar tentang Indeks Pengelolaan Keuangan dan aset daerah
- 3 Kesimpulan :
Meningat waktunya yang sangat pendek sesuai point 1 diharapkan selesai tepat waktu
 - 4 Penutup :
Rapat ditutup oleh Kepala Badan

Mengetahui :
Sekretaris

Abdul Khair, SE
NIP. 19650424 198602 1 007

Notulen Rapat,

Hj. Dian Sri Lestari Margayanti, SE. MSI
NIP. 19811021 200904 2 002



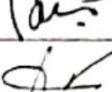
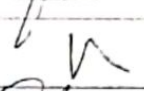
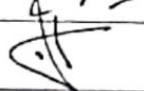
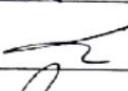
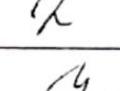
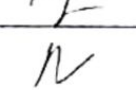
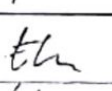
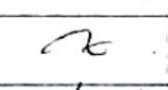
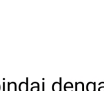
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Halayutullah Nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan Kode Pos 70611
Telepon (0511) 4720222, Faksimile (0511) 4720222

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Des 2021
Waktu : 11.00 wita s.d selesai
Tempat : Aula gedung BPKAD Kab. Banjar
Perihal : Penyempurnaan Chascade

NO	NAMA	JABATAN	P/L	TANDA TANGAN	KET
1	A. Dedy Arni	Ka BAKAM	L		
2	Abd. Khair	sekretaris	L		
3	Hj. Dican Sri Lestari. M.	Kasubag Percek	P		
4	M. Fauzan Pray	Kasubid Aset	L		
5	H. Abd. Fauzan	Kasubid Percek	L		
6	Sugilawati	Kasubid Aset	P		
7	Siti Ariyontotile	Kasubid Percek	P		
8	Rutha Maya R	Kasubid Aset 3	P		
9	Maya Dewi Sonya P	Kasubid Aset	P		
10	Andi Hani R. S.E. Mm	Staf Aset	L		
11	V. I. R.	Kasubid Aset	P		
12	Jugianto	Staf Aset	L		
13	Fitria Shoriza	Kasubid Aset	P		
14	Pirman P	BTL	L		
15	M. Harbi	Staf	L		
16	H. Fauzan P	Kasubid Aset	L		

17	Supriyadi	As-p. A	L	
18	Xurizyanti	Kab. Bogor	P	
19	Budi Nugraha	Kab. Bogor	L	
20	Diana	Kab. Bogor	P	
21	U. Kurnia	Staf. Pemas	L	
22	Nina Agriyani	Staf Perencanaan	P	
23	Fathurrohman	Staf perencana	L	
24	Ikhwan Hachdo	Staf perencana	L	
25	Yulias Kurni	Kab. Bogor	L	
26	Zaini Kurni	Kab. Bogor	L	
27	Budi	Kab. Bogor	L	
28	Hasan Hilau	Staf	L	
29	Fuli	Staf	P	
30	Nopur	Staf	P	
31	Hery	Staf	L	
32	Chandra	Staf	L	
33	Ega	Staf	P	
34	Bu. A. L.	Staf Unpay	P	
35	Elroy	Staf	L	
36	Hasan	Staf	L	
37	Risni	Staf keu	P	
38	Zaini	Staf planter	L	
39	Zora	Staf paksi	L	
40	Fuad	Staf Asst	L	

41	Pupiyati	Wk Karna Angga	L	fh
42	Bambang	Kabidat Pengabdian	L	Bz
43	Fadli	Staff	L	fh
44	Rubman	Staff	L	fh
45	Syarwani	Staff	L	fh
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				



